AKATIGA

Sofwan Samandawai

MIKUNG

BERTAHAN DALAM HIMPITAN

Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya



Kata Pengantar :
Sediono M. P. Tjondronegoro

GRARIA
A
0824

AKATIGA Pusat Analisis Sosial adalah lembaga penelitian nirlaba yang melakukan berbagai kegiatan penelitian, pelatihan, penerbitan, pengembangan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan, dan advokasi kebijakan pembangunan.

Dalam menjalankan aktivitasnya, AKATIGA mengembangkan prinsip independen, multidisiplin, partisipatif dan berorientasi pada upaya penguatan posisi masyarakat sipil, khususnya mereka yang lemah dan tertinggal dalam proses pembangunan. Upaya penguatan tersebut dilakukan melalui kajian kritis terhadap proses dan kebijakan pembangunan yang berdampak pada rakyat kecil. Ada tiga topik besar yang menjadi fokus analisis kritis AKATIGA. Pertama, masalah perburuhan dan hubungan kerja/hubungan industrial. Penelitian ini juga memberikan perhatian khusus pada buruh perempuan dan anak, Kedua, masalah dinamika usaha kecil dalam konteks pengembangan ekonomi rakyat, Ketiga, masalah ketimpangan distribusi sumber daya utama rakyat. Ketiga topik kajian AKATIGA tersebut dilakukan dalam upaya membuka peluang kelompok miskin untuk membangkitkan kemandiriannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan.

YAYASAN AKATIGA
Pusat Analisis Sosial
Jl. Cilamaya 7, Bandung 40115 Indonesia
Telp. 022 - 4235526, Fax. 022 - 4260875
E-mail : akatiga@indosat.net.id
Homepage : www.akatiga.or.id

ISBN : 979-8589-36-3

PUST
P
36

MIKUNG : BERTAHAN DALAM HIMPITAN

Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya

Diterbitkan atas kerjasama :
Yayasan AKATIGA
dengan
Yayasan Perisai Biru-Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya

MIKUNG : BERTAHAN DALAM HIMPITAN

Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya

Sofwan Samandawai

AKATIGA

Pusat Analisis Sosial

MIKUNG : BERTAHAN DALAM HIMPITAN

Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya

Penulis : Sofwan Samandawai
Kata pengantar : Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro
Penyunting bahasa : A. Diana Handayani
Tata letak & Desain sampul : Budiman Pagarnegara

Desain Gambar : Febby Firdian

Dipersilahkan mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini, sepanjang menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Katalog Dalam Terbitan (KDT) :
SAMANDAWAI, Sofwan
Mikung : Bertahan Dalam Himpitan : Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya / Sofwan Samandawai. --Kata Pengantar : Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro. - Bandung: Yayasan AKATIGA, 2001.
xxi, 130 hlm.; 21,5

Bibliografi
ISBN 979-8589-36-3

1. Tasikmalaya -- Kemiskinan
2. Keadaan Ekonomi
3. Keadaan sosial
I. Judul

362. 5:32(92)

Diterbitkan pertama kali oleh Yayasan AKATIGA
Bandung, Maret 2001

© Hak cipta dilindungi undang-undang

RINGKASAN

Penelitian ini menggambarkan dinamika sosial-ekonomi-politik yang berpengaruh terhadap pemarjinalan masyarakat dan implikasinya terhadap pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Gambaran dinamika ini cukup penting untuk diperhatikan dalam konteks memahami bagaimana sebenarnya sebuah masyarakat menjadi miskin dan marjinal. Pemahaman terhadap proses tersebut diharapkan dapat memberikan pengertian yang lebih tepat bagi upaya-upaya pemberdayaan terhadap mereka.

Model pembangunan pemerintah Orde Baru yang bersifat *top-down* dan mengejar pertumbuhan ekonomi secara fisik pada gilirannya telah memarjinalkan dan memiskinkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Pada kasus tertentu seperti yang terjadi pada Kelompok Mikung dalam masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah, proses pemarjinalan terjadi selain karena faktor struktural akibat model pembangunan pemerintah tersebut juga disebabkan karena faktor perbedaan ideologi agama antar kelompok di dalam masyarakat. Kedua faktor tersebut bekerja demikian kuat dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perubahan sistem politik nasional mulai dari masa Orde Lama hingga Orde Baru.

Kelompok Mikung merupakan sekelompok orang dalam masyarakat yang dianggap menyimpang dari agama Islam karena pengaruh kepercayaan sinkretis, sedangkan di dalam masyarakat tersebut terdapat kelompok-kelompok pendukung organisasi Islam NU dan Persis yang kuat. Perbedaan ini menjadi sangat tajam ketika gerakan DI/ TII terjadi di Tasikmalaya. Ketika itu kelompok-kelompok organisasi Islam tergabung menjadi satu dalam payung Masyumi dan sebagian besar tergiring menjadi pendukung gerakan tersebut. Pemicu konflik antara para pendukung gerakan dan Kelompok Mikung terjadi saat seorang tokoh gerakan terbunuh dan tudingan diarahkan kepada orang-orang dalam kelompok itu sebagai pelakunya. Peristiwa yang dianggap bermotif masalah pribadi ini kemudian depolitisasi ketika sistem politik nasional berubah. Para pendukung gerakan DI/ TII yang dimusnahkan berpencar kembali ke dalam kelompok organisasinya masing-masing dan mendukung partai politik yang berbendera Islam, sementara Kelompok Mikung justru menjadi simpatisan organisasi massa PKI yang dianggap dapat mengakomodasi kehidupan sosial mereka. Hal ini yang kemudian melekatkan Kelompok Mikung dengan stigma PKI, tetapi tidak berarti PKI adalah mikung.

Kelompok Mikung dan warga yang terkena stigma PKI menjadi tersisih di dalam struktur sosial ekonomi politik masyarakat. Wacana pembangunan pemerintah menggelar program-program yang menyingkirkan mereka, seperti program Litsus, bersih diri dan bersih lingkungan. Mereka pun dikucilkan oleh anggota masyarakat yang lain. Pengucilan sosial yang dialami tidak terjadi secara fisik dalam arti tempat tinggal mereka dipisahkan, melainkan dalam sikap dan pandangan masyarakat yang menyudutkan mereka. Pengawasan dan pengendalian yang ketat dilakukan tokoh masyarakat Islam dari golongan NU melalui kegiatan keagamaan dan keamanan lingkungan.

Kondisi kesejahteraan ekonomi kelompok Mikung dan warga kampung tidak berbeda, dalam arti tidak menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi kelompok Mikung lebih miskin ketimbang warga kampung. Karakteristik mata pencaharian utama warga kampung secara umum sebagai pedagang membuat mereka bisa leluasa melakukan transaksi ekonomi ke luar wilayah kampung. Hal ini harus mereka lakukan karena di dalam hubungan ekonomi, stigma-stigma yang melekat pada mereka menyebabkan *trust*/kepercayaan antar-kelompok dalam wilayah kampung terdekat berkurang.

Pemarjinalan yang lebih berat menghimpit kelompok Mikung dan warga kampung adalah pemarjinalan ideologi keagamaan dan politik. Dukungan politik masa lalu sebagian besar warga kampung terhadap partai komunis menyebabkan timbulnya stigma terhadap kampung sebagai basis komunis. Tuduhan sebagai penghambat pembangunan sering menjadi teror bagi warga apabila mereka tidak menyetujui program pembangunan yang dilakukan pemerintah orba di lingkungan kampung sedangkan mereka tidak memperoleh manfaatnya bahkan dirugikan. Bagi warga, tuduhan itu bermakna ancaman yang mengangkat stigma PKI, sementara kebijakan politik orba tegas-tegas menyatakan bahwa segala bentuk bahaya laten komunis harus ditiadakan. Warga yang dikenai stigma PKI dicabut hak-haknya sebagai warga negara, tidak mempunyai kebebasan berkehendak. Rentetan aturan, kegiatan pembinaan dan pengawasan bahkan pemberian tanda khusus pada kartu identitas diri harus dijalani. Doktrin Pancasila dan ajaran agama selalu menjadi materi pembinaan dan pengawasan bagi warga terkena stigma PKI dan Mikung. Mikung walaupun tidak mengalami pencabutan hak, tetapi tetap dilekatkan dengan stigma PKI. Bagi Mikung serangan terhadap mereka selalu datang dari golongan Islam, yang mencap mereka menyimpang dari kebenaran Islam.

Perlawanan yang bisa mereka lakukan agar dapat bertahan dalam himpitan struktur tersebut adalah perlawanan atau resistensi secara terselubung yang sangat simbolis. Perlawanan ini mereka pilih secara sadar karena dalam posisi terselubung itu keamanan mereka terjaga. Penghindaran dan kepatuhan pura-pura yang ditunjukkan oleh warga di tingkat kampung atau oleh orang Mikung di tingkat kelompok memiliki pola yang relatif sama. Kelompok Mikung memiliki kebiasaan melakukan pertemuan di antara mereka sebagai sarana untuk bertukar pikiran atau membahas kondisi sosial ekonomi politik lokal bahkan nasional, yang tak jarang menjadi menghasilkan rencana strategis bagi upaya resistensi terselubung yang dilakukan oleh kelompok mereka. Ada satu kasus bahwa mereka dapat menggunakan tangan orang lain di luar kelompok mereka untuk melakukan suatu aksi massa yang sebetulnya bukan tujuan mereka.

Dalam konteks reformasi sebagai peluang perubahan sistem sosial ekonomi politik dan juga upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, faktor-faktor penyebab pemarjinalan dan resistensi-resistensi terselubung perlu dikaji untuk memahami kondisi masyarakat yang akan diberdayakan. Pengalaman mereka dihimpit sekian lama menyebabkan tingkat kecurigaan mereka yang tinggi terhadap intervensi dari luar masyarakat sehingga mereka akan melakukan resistensi terselubung pula terhadap intervensi tersebut. Mereka cenderung menutupi akar permasalahan sebenarnya karena pengungkapan akar permasalahan tersebut malah akan menambah berat risiko beban himpitannya. Tampaknya reformasi bagi mereka masih angan-angan karena perubahan sistem sosial ekonomi politik yang bisa berarti perbaikan status mereka masih merupakan pertanyaan besar.

SUMMARY

This research describes the social, economic and political dynamic, which influence the marginalization of the society, and its implication to the empowerment of the society itself. The description of this dynamic is worth- observing in the context of comprehending how actually a society can become poor and marginal. The understanding of this process is expected to give more precise comprehension for the efforts of empowerment dedicated to them.

The development model of the New Order Administration that was top-down in nature and focused more on physical economic growth had marginalized and impoverished certain groups in the society. For certain cases like the one that happened to the Mikung people of Kampung Gunung Kembang Tengah community, marginalization process had taken place on the basis of structural factors caused by the government's development model and at the same time because of differences in religious ideology among groups in the society. The two factors dominantly influence the life of the society following the change in the national political system starting from the period of Old Order to New Order regime.

The Mikungs is a group of people in the community which is considered deviating from the Islamic teachings because they led their life under the influence of syncretism, whilst in the community there are groups which strongly support the NU Moslem organization and also PERSIS. This difference grew more significant when the DI/TII movement came to surface in Tasikmalaya. At that time the groups of Moslem organization were under the same supervision of Masyumi and most of them were led to become the supporters of the movement. The incident that had pulled the trigger of the conflict between the supporters of the movement and the Mikung people was when a leader of the movement was killed and this had been blamed to the latter. The incident that was considered having personal motive was then politicized when the political system changed. The supporters of the DI/TII movement, which were to be demolished, have dispersed into their own organization and support the political party carrying Islamic flag. And the Mikung Community decided to support the Indonesian Communist Party which they considered having the ability to accommodate their social life. This is why thereafter this community is stigmatized as members of the Indonesian Communist Party although not necessarily the Indonesian Communist Party is the Mikung people.

The Mikung Community and the people stigmatized as members of the Indonesian Communist Party have been marginalized in the social, economic as well as political structure of the society. The government's development discourses, such as the Litsus program, 'bersih diri' and 'bersih lingkungan' – terms that are used to declare that someone has nothing to do with the communist party – proposed programs which have purged them more. Other members of the society have isolated them as well. This social isolation they experience is not physical in nature, in term that their houses are separated, but it is more in the form of attitude and vision of the society

that move them aside. Strict control and watch coming from the NU leaders are brought about in the form of religious activities and activities to ensure the people's safety.

The economic condition of the Mikung Community is not different to that of the villagers. The Mikung Community is not poorer than the villagers are. The villagers generally work as vendors and this make them free to have business deal outside their village. They have to do this in economic framework because the stigma given to them make the trust of the people in the neighbouring villages reduced.

The more firm marginalization, which put the Mikung community and the villagers in discrimination situation, was the marginalization in religious and political ideology. The political preference of most of the villagers to the communist party had created stigma to the villages as a communist base. They were accused of hampering the development and this often became a terror for the villagers when they did not give their approval to the development program brought about by the new order regime in the villages. In fact, they do not have any benefit from it, but, unfortunately, they have to face the inconveniences. For the villagers, such accusation was a threat, which have raised the communist stigma, whilst the political approach of the new order regime is affirmatively declare that each and every communist latent threat must be eliminated. The villagers with the communist stigma have no right as a citizen; they have no freedom to act. They have to accept and face series of rules and regulations, the cultivation and control meant for them and they even have a special sign in their identity card. The doctrine of *Pancasila* 'five basic principles of the state' and religious teachings always become part of the cultivation and control to the people with communist and Mikung stigmas. The Mikung community, al-

though still have their rights, had to bear the communist stigma infinitely. The offense directed to the Mikung people always came from the Moslem people, who claimed that they have deviated from the truth of the Islamic teachings.

To survive the structural discrimination, the people struggle with a very symbolic clandestine resistance. They chose this kind of resistance consciously on the basis of the fact that the clandestine way kept them secure. The make-believe obedience showed by the villagers or by the Mikung people at community level have relatively the same pattern. The Mikung people has a sort of tradition to hold a meeting among themselves as a way to exchange ideas and discuss the local and even national condition socially, economically and politically. This meeting has often created strategic plans for the clandestine resistance performed by their group. There is a case when they are able to use other people's hand, people who is not part of their community, to manage mass actions that actually is not of their objective.

In the reform context as an opportunity of change in social, economic and political system and also the efforts to empower the society, the factors caused by the marginalization and clandestine resistance need to be studied in order to have clearer comprehension about the condition of the society to be empowered. Their experience of being discriminated all the time makes them very suspicious facing the outside intervention, so they might also use clandestine resistance upon the intervention. They tend to cover the actual source of the problems because if they try to disclose it, the risk of being discriminated will be even harder for them. Apparently, for them, reform is still a dream since the change of the social, economic and political system that might award them with a better status is still a big question.

KATA PENGANTAR

Kemiskinan dalam masyarakat pedesaan merupakan topik yang telah sering dibicarakan. Demikian pula, berbagai upaya untuk menanggulangi persoalan klasik itu sudah banyak dipikir dan dilakukan oleh berbagai pihak di negara ini. "Pemberdayaan" merupakan salah satu kata kunci yang digunakan untuk menanggulangi persoalan kemiskinan yang dialami oleh masyarakat pedesaan. Tercakup di dalam pengertian upaya pemberdayaan itu adalah menumbuhkan kesadaran di kalangan petani miskin bahwa mereka mempunyai "daya" untuk memikirkan, mensiasati, serta melakukan tindakan untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali kekuatan-kekuatan yang menjadi penyebab dari kemiskinan mereka. Suatu hal yang sangat kental terkandung dalam pendekatan tersebut, walaupun sangat tersirat pula, adalah asumsi bahwa orang miskin atau warga miskin sangat lemah-daya dalam menghadapi berbagai kekuatan yang menekannya. Tulisan yang merupakan penelitian antropologis ini juga bermaksud memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya pemberdayaan warga miskin di pedesaan, tetapi melalui cara melihat yang agak berbeda. Ini suatu kesimpulan pula dari Haswinar Arifin, MA pakar Antropologi yang sekarang menjabat Direktur Eksekutif AKATIGA dan yang telah membaca naskah lebih seksama.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat miskin, langkah pertama yang sangat penting dilakukan adalah memahami cara hidup dan proses-proses sosial yang menjadi konteks kehidupan orang miskin itu sendiri. Intinya, kondisi kemiskinan yang terjadi sekarang bukan suatu hal yang hadir dalam keadaan vakum. Ia merupakan hasil dari paduan proses-proses sosial, politik, dan ekonomi dari sejarah lokal desa dengan proses-proses dalam konteks regional dan nasional yang lebih luas. Melalui pemahaman tersebut kita dapat melihat bahwa kemiskinan tidak hanya merupakan persoalan "lemah-daya" dalam soal mengakses sumber daya, tapi juga mencakup relasi tekan- menekan dan tawar-menawar di antara kelompok-kelompok yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya di antara masyarakat desa yang miskin dengan mereka yang tergolong tidak miskin.

Di dalam upaya menyoroti relasi-relasi itulah studi ini berusaha memberikan sumbangan bagi upaya pemberdayaan. Selain mencoba untuk memperlihatkan kompleksnya dinamika relasi-relasi sosial-politik di dalam konteks desa yang menyebabkan sekelompok warga masuk ke dalam posisi marjinal dan miskin, studi ini juga berupaya memperlihatkan bahwa tidak sepenuhnya benar bahwa masyarakat miskin tidak mempunyai daya dalam menghadapi tekanan-tekanan kekuatan yang menindasnya. "Perlawanan tersembunyi" merupakan kata kunci yang digunakan dalam studi ini untuk memperlihatkan bahwa sampai titik tertentu masyarakat miskin sebenarnya mempunyai daya atau energi untuk melawan kekuatan-kekuatan yang menindasnya. Perlawanan tersembunyi ini bukannya tidak mempunyai kekuatan yang berarti. Berbagai sindiran halus, ungkapan cemoohan terhadap penguasa desa yang hanya dimengerti oleh kelompok miskin di desa, hingga ketidakpatuhan yang dilakukan secara sadar tapi tersembunyi merupakan senjata-senjata orang miskin untuk

memperlihatkan – paling tidak kepada dirinya sendiri – bahwa mereka tidak sepenuhnya bisa ditindas oleh mereka yang berkuasa.

Ketidakpatuhan dan sabotase kecil-kecilan yang tersembunyi sering menyebabkan berbagai upaya perubahan dan pembangunan yang diprakarsai oleh penguasa dan agen pembangunan desa maupun luar desa sering mengalami hambatan. Dari perspektif penguasa dan agen pembangunan, ketidak-pahaman terhadap perlawanan seperti itu mengakibatkan mereka melihat tindak-tanduk serta sikap masyarakat miskin desa sebagai kebodohan, kurangnya pendidikan, ketidakmengertian terhadap pembangunan, atau sikap kolot yang tidak mau menerima "kemajuan". Ironisnya, kesimpulan-kesimpulan seperti itulah yang kemudian mendorong mereka untuk lebih lanjut lagi menanggulangi hambatan-hambatan tersebut dengan suatu upaya yang secara populer disebut sebagai "pemberdayaan".

Seperti yang mungkin akan cepat terlintas dalam benak pembaca, studi tentang perlawanan tersembunyi di kalangan orang miskin bukan merupakan topik baru di dalam kajian tentang masyarakat. Beberapa tahun yang lalu isyu ini sudah dibahas oleh James C. Scott di dalam bukunya *Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasant Resistence* (1985). Sumbangan penting dari tulisan Sofwan Samandawai ini terletak pada upayanya untuk menghubungkan temuan-temuan Scott tentang perlawanan tersembunyi tersebut dengan kegiatan pemberdayaan yang diarahkan kepada warga desa miskin. Pemahaman terhadap corak perlawanan tersembunyi ini penting bagi segala upaya untuk memberdayakan warga desa miskin karena resistensi seperti itu akan dilakukan kepada siapa saja yang oleh warga miskin tersebut dianggap akan membahayakan dan merugikan mereka, termasuk juga pihak-pihak LSM yang bersimpati membantu mereka.

Studi yang mengambil judul Mikung : Bertahan dalam Himpitan, Kajian Masyarakat Marjinal di Tasikmalaya dilakukan Akatiga sebagai lembaga penelitian yang mempunyai perhatian terhadap penguatan institusi masyarakat akarrumput, bekerja sama dengan Yayasan Perisai Biru-Unit Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya yang mempunyai kepedulian terhadap isu yang sama. Melalui studi yang masih merupakan upaya awal ini, diharapkan ada lebih banyak lagi kajian serupa yang dapat memberikan pemahaman kepada siapapun yang berniat membantu warga miskin di pedesaan.

Prof. Dr. Sediono M.P. Tjondronegoro
Ketua Badan Pengurus

PENGANTAR PENULIS

Tema studi dari tulisan mengenai masyarakat marjinal-miskin dan pemberdayaan ini sangat menarik. Sebenarnya kemiskinan dan orang miskin merupakan tema klasik yang telah banyak diangkat para peneliti, hal yang agak berbeda dari tulisan ini adalah cara melihat permasalahan orang miskin tersebut melalui pendekatan historis lokal desa yang kemudian dikaitkan dengan isu pemberdayaan masyarakat yang sedang marak dilakukan banyak pihak. Proses sejarah sosial ekonomi dan politik lokal desa yang terkait erat dengan dinamika sosial ekonomi dan politik yang lebih luas menghasilkan kelompok orang marjinal dan miskin yang memiliki resistensi terselubung terhadap berbagai hal yang masuk dari luar lingkungan mereka, termasuk kegiatan pemberdayaan sekali pun.

Di dalam lingkungan penelitian Akatiga, pendekatan kualitatif dan metode penelitian yang dilakukan pun relatif baru Pencatatan sejarah lisan dan pengamatan terlibat selama kurang lebih empat bulan hidup dalam lingkungan masyarakat lokal di Tasikmalaya dan menjadi bagian dari mereka yang mereka percaya, merupakan kerja berat yang menantang. Cara-cara tersebut penting dilakukan dalam upaya memahami siapa dan bagaimana sebenarnya mereka ketimbang datang, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mereka tidak mengerti untuk apa, setelah itu selesai.

Penulisan laporan akhir dari studi ini cukup luar biasa menyita waktu dan perhatian penulis. Pelajaran berharga bagi penulis bahwa menulis itu tidak mudah. Tentunya ini menjadi dorongan bagi penulis untuk menulis lebih baik lagi.

Banyak orang yang memberikan kontribusinya di dalam proses studi secara keseluruhan. Febby Firdian Djuarsa, yang menjadi bagian Tim Peneliti, sangat membantu dengan diskusi dan dalam pengumpulan data di lapangan selama empat bulan. Haswinar Arifin, MA yang dengan sabar membimbing penulis dari awal studi hingga diselesaikannya laporan akhir ini. Lindy D. Backues, MSc., pembimbing peneliti di lapangan dari Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya (SNT). Para pembaca kritis yang memberikan banyak sekali masukan berharga dalam tulisan ini, Ibu Dr. Joan Hardjono dan Selly Riawanti, MA. serta Dra. Erna Ermawati Chotim. Juga rekan-rekan peneliti dan staf AKATIGA yang sangat mendukung penulis. Terutama orang-orang Mikung beserta keluarga yang tetap bertahan dalam himpitan. Terima kasih tak terhingga penulis limpahkan kepada mereka semua, sehingga tulisan ini menjadi lebih baik.

Sofwan Samandawai

DAFTAR ISI

Ringkasan v
Summary ix
Kata Pengantar xiii
Pengantar Penulis xvii
Daftar Isi xix

SATU

PENDAHULUAN

Latar Belakang 1
Pemberdayaan Masyarakat 3
Marjinalisasi dan Pemiskinan Masyarakat Akar Rumput 5
Kemiskinan dan Dinamika Masyarakat 9
Resistensi Masyarakat Akar Rumput terhadap Kemiskinan dan Marjinalisasi 14
Metode Penelitian
a.Pemilihan Lokasi 17
b.Teknik Penelitian 17
c.Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data 18
Sistematika Pembahasan 20

DUA

STRUKTUR MASYARAKAT KAMPUNG GUNUNG KEMBANG

Setting Penelitian 23

Pembagian Wilayah Kampung 26

Pola Pemukiman dan Aktivitas Masyarakat 27

Sumber Daya dan Stratifikasi Masyarakat 33

Perekonomian Lokal dan Hubungan Kerja 36

Hubungan Kekerabatan dalam Masyarakat 47

TIGA

IDEOLOGI DAN KELOMPOK DALAM MASYARAKAT DI KAMPUNG GUNUNG KEMBANG

Ideologi dan Pengelompokan Masyarakat di Kampung Gunung Kembang 50

Kelompok "Mikung" dan "Jiwa Tengah" 56

Kelompok Masyarakat dan Model Institusi Masyarakat dalam Orde Baru 64

EMPAT

PENGARUH PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU TERHADAP MASYARAKAT GUNUNG KEMBANG

Sepintas Sejarah Gerakan Sosial Politik di Jawa 1920 - 1965 69

Sejarah Gerakan dan Perkembangan Sosial Politik pada Masyarakat Kampung Gunung Kembang 75

Masyarakat Kampung Gunung Kembang, Kelompok Mikung dan Tragedi 1965 81

Kampung Gunung Kembang di Masa Orde Baru 84

Kampung dalam Pembangunan 88

LIMA

KEMISKINAN, RESISTENSI MASYARAKAT, DAN PEMBERDAYAAN

Kemiskinan Masyarakat 93
Resistensi terhadap Pemerintah dan Aktor Swasta 97
Resistensi terhadap Tekanan Politis dan Ideologis 102
Resistensi dalam Angin Reformasi 110
Implikasi Resistensi terhadap Pemberdayaan Masyarakat 114

ENAM

PENUTUP

Kesimpulan 119
Rekomendasi 123

Daftar Pustaka 127

Lampiran

Peta Lokasi Penelitian

SATU

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penelitian yang mengambil topik masyarakat marjinal dan pemberdayaan ini dilakukan sebagai upaya untuk memahami proses dan dinamika sosial ekonomi politik masyarakat akar rumput[1] dan apa implikasi proses-proses itu bagi upaya pemberdayaan dan program bantuan yang masuk ke dalam kehidupan komunitas pedesaan.

Proses sosial ekonomi politik akan dilihat sebagai konteks yang mengandung berbagai faktor yang telah mendorong masyarakat akar rumput masuk kedalam posisi marjinal dan miskin. Faktor-faktor struktural seringkali menjadi sorotan utama dalam proses marjinalisasi masyarakat miskin. Persoalan-persoalan struktural dan intervensi pemerintah Orde Baru (Orba) ditengarai sering menyebabkan kondisi pemiskinan dan pemarjinalisasian masyarakat akar rumput. Namun demikian apabila dicermati,

---

[1] Masyarakat akar rumput didefinisikan sebagai masyarakat lapisan terbawah yang mengalami masalah kemiskinan dan pengucilan dan tidak memiliki akses terhadap pasar tenaga kerja, tanah, distribusi produk, dan hak-hak tertentu. Lihat AsiaDHRRA Secretariat. 1998. *The Impact of Globalization on the Social-Cultural Lives of Grassroots People in Asia.* Grasindo. Jakarta.

faktor struktural ternyata tidak bekerja sendiri untuk menghasilkan kemiskinan. Varian-varian agama dan pluralitas ideologi di dalam masyarakat turut berperan menciptakan penyingkiran satu kelompok masyarakat ke posisi marjinal dan miskin. Bahkan konflik-konflik yang timbul karena kemajemukan kelompok masyarakat tersebut dapat mengambil porsi krusial dalam proses pemiskinan. Seringkali konflik bersumber pada konflik pribadi antarwarga masyarakat yang kemudian berdampak luas. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memperhatikan pula faktor-faktor non-struktural dalam proses pemiskinan dan marjinalisasi masyarakat. Melalui studi kasus, tulisan ini akan melihat apa implikasi dan bagaimana bekerjanya faktor-faktor struktural, pluralitas agama dan ideologi sosial terhadap upaya pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan.

Penelitian dilakukan terhadap kelompok "Mikung"[2], sebuah model masyarakat akar rumput yang menjadi bagian dari masyarakat Kampung Gunung Kembang di Kotif Tasikmalaya. Kelompok Mikung mengalami pemarjinalan karena memiliki ideologi keagamaan yang dianggap menyimpang dari ideologi agama-agama besar yang ada, serta keterlibatan mereka dalam organisasi massa politik dilarang pemerintah Orba. Pemarjinalan tersebut berkaitan erat dengan bentuk-bentuk kemiskinan yang mereka alami. Hasil penelitian Hefner (1990) di daerah dataran tinggi Tengger yang kondisinya mirip dengan kelompok Mikung memaparkan bahwa masyarakat dataran tinggi Tengger yang menganut Agama Majapahit berkembang menjadi pendukung partai

---

[2] Definisi Mikung : *(1) Tacan dewasa, tacan jangjangan (jangkrik, simeut, jsb.). (2) Palsu atawa nyimpang tina ajaran nu bener, contona Arjuna mikung (Arjuna palsu/ bobodoan), hakekat mikung (elmu hakekat anu henteu bener).* (1) Belum dewasa, belum bersayap (jengkrik, belalang, dsb.). (2) Palsu atau menyimpang dari ajaran yang benar, contohnya Arjuna mikung (Arjuna palsu/ bohong-bohongan), hakikat mikung (ilmu hakikat yang tidak benar). Lihat Kamus Umum Basa Sunda. 1985. Hal 313.

politik komunis dan nasionalis yang dapat mengakomodasi kepercayaan mereka. Pemaparan Hefner hanya sampai pada terjadinya perubahan struktur masyarakat desa yang menjadi sangat otoriter dan hegemonis di bawah kekuasaan pemerintahan Orba.

Perubahan struktur masyarakat desa semisal mengganti lurah dengan orang militer dan menjalankan berbagai program 'pembersihan' serta pembangunan merupakan cara-cara pemerintah pusat menjaga stabilitas politik negara. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan tekanan kuat terhadap kelompok masyarakat yang diwaspadai mewarisi ajaran politik kekiri-kirian. Tekanan-tekanan demikian tentunya menimbulkan perlawanan. Pertanyaan yang menjadi penting dalam konteks ini, apakah kelompok akar rumput seperti Mikung dapat melakukan perlawanan? Bagaimana mereka melakukan perlawanan terhadap kekuasaan yang demikian besar tersebut? Studi James C. Scott (1985) mengenai bentuk-bentuk perlawanan terselubung di Desa Sedaka Malaysia pada masyarakat petani merupakan contoh perlawanan masyarakat akar rumput yang penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan keterjejasan kelompok Mikung. Bedanya, pada kelompok Mikung terdapat isu agama Islam versus kepercayaan dan isu partai politik Islam versus partai politik komunis dalam sejarah masyarakat lokal. Dalam konteks itu pula kajian perlawanan masyarakat akar rumput akan bernilai positif bagi upaya-upaya untuk memberdayakan mereka dari kemiskinan.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat saat ini menjadi bahan perbincangan hangat mulai dari tingkat konsep hingga upaya praktis. Dalam pandangan birokrat negara, pemberdayaan

sama dengan pembangunan yang dilakukan selama masa sebelum era reformasi[3]. Sementara dalam atmosfir LSM, pendampingan adalah suatu bentuk yang dianggap nyata dalam konteks pemberdayaan. Terlepas dari berbagai pandangan tersebut, konsep pemberdayaan mengandung makna perubahan melalui pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat dari suatu keadaan tidak berdaya menjadi berdaya untuk menggunakan segala sumber daya yang ada pada dirinya dan lingkungannya, sehingga tercapai suatu kondisi keberdayaan yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan keamanan kehidupannya.

Istilah pemberdayaan makin marak terangkat seiring dengan dilancarkannya program-program IDT, JPS, dan KUT di akhir masa Orde Baru. Saat itu isu pemberdayaan seolah menjadi lawan tema dari program-program yang cenderung bersifat bantuan ekonomi sesaat dalam keadaan darurat bagi masyarakat. Kenyataan di lapangan menunjukkan kasus-kasus kegagalan berkaitan dengan sifat program yang darurat tersebut. Kecerobohan penentuan *target group* dari program yang dijalankan menjadi salah satu butir yang banyak dikemukakan sebagai sumber kegagalan.

Konsep pemberdayaan secara umum sebenarnya dapat diaplikasikan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk didalamnya birokrasi pemerintahan, sebagai upaya pemulihan kondisi masyarakat setelah lebih dari 30 tahun 'dilemahkan' oleh pemerintah pusat Orba. Sudah seharusnya fokus perhatian dari upaya pemberdayaan diarahkan kepada kelompok masyarakat yang paling tidak berdaya secara sosial ekonomi dan politik, yaitu masyarakat miskin. Masyarakat miskin berada pada posisi terbawah dalam struktur masyarakat. Mereka menjadi *floating mass* yang selalu dimobilisasi

---

[3] Pemberdayaan masih digulirkan secara *top-down*, seperti dinyatakan oleh Ginandjar Kartasasmita. 1996.

untuk kepentingan elit-elit masyarakat. Mereka sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menawar perlakuan yang dijalankan para elit. Mereka menjadi obyek penderita dari kebijakan ataupun perlakuan yang dilancarkan tersebut. Berkaca dari pengalaman di masa Orba, konsep pemberdayaan mengangkat masyarakat miskin dan marjinal sebagai subyek yang penuh potensi untuk berdaya dan berpartisipasi dalam menentukan nasibnya.

Marjinalisasi dan Pemiskinan Masyarakat Akar Rumput

Kemiskinan selalu menjadi masalah krusial di negara-negara berkembang. Di Indonesia, secara historis persoalan kemiskinan bahkan sudah terjadi sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda[4]. Secara kuantitatif pada pertengahan tahun 1960 — pada masa pemerintahan Orde Lama (Orla)—, jumlah penduduk miskin mencapai 52 – 61% dari jumlah penduduk saat itu[5].

Pada masa pemerintahan Orba yang mencatat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan ideologi pembangunanisme-nya, angka kemiskinan turun menjadi 7 - 10%[6]

---

[4] Politik etis diluncurkan pemerintah kolonial Belanda sebagai program anti kemiskinan atau penciptaan kesejahteraan masyarakat, walaupun kebijakan tersebut tetap menguntungkan pemerintah kolonial. Lihat Loekman Soetrisno..1994. *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia dan* Heru Nugroho. *Kemiskinan Ketimpangan dan Pemberdayaan*. Makalah dalam Panel Ahli Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Diselenggarakan di Yogyakarta, tanggal 28 – 29 Januari 1994. Juga lihat Robert Cribb dalam. Frans Husken, Mario Rutten dan jan-Paul Dirkse. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial : Indonesia Dibawah Orde Baru*. PT Gramedia. Jakarta. Hlm 265-271.

[5] Lihat " table 2.1 Indicators of Indonesian economic development, 1965 –90" dalam Hall Hill. Ed. 1994. *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. Allen & Unwin Pty Ltd. Australia. Hlm 57.

[6] Hall Hill. Ed. 1994. Ibid. Hlm 57.

melalui program pengentasan kemiskinan yang dilancarkannya. Di masa orba ini pertumbuhan GDP per kapita mencapai 5% pada periode tahun 1988 - 1990, yang jauh meningkat dibandingkan dengan pertumbuhannya pada pertengahan periode tahun 1960-1965 (masa Orla) yang hanya mencatat - 0,4%[7]. Hasil produksi pertanian yang meningkat dua kali lipat di Pulau Jawa menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras, sehingga pada akhir tahun 1980-an Presiden Soeharto sempat menerima penghargaan internasional sebagai negara yang berhasil dalam program produksi pangan. Output industri per kapita bahkan mencapai lebih dari 600 persen. Revolusi juga terjadi pada sektor infrastruktur transportasi. Tampaknya seluruh sektor perekonomian mencatat pertumbuhan positif yang sangat mengesankan.

Akan tetapi, di balik catatan-catatan keberhasilan itu terdapat pula fakta-fakta kemiskinan tersembunyi sebagai kegagalan pemerintahan Orba. Beberapa contoh kegagalan dapat disebutkan di sini adalah kasus-kasus pengambilalihan tanah bagi kepentingan pembangunan di Kedung Ombo, penyalahgunaan HGU dan HPH yang menyingkirkan masyarakat adat, kasus transmigrasi yang seringkali menimbulkan konflik antara para transmigran dan penduduk lokal yang merasa tanahnya terampas untuk kepentingan transmigrasi tersebut, serta ketimpangan kesejahteraan buruh yang tinggi. Kekuatan pemerintah yang besar dan didukung kekuatan militer dapat dengan mudah meredam gejolak ketidakpuasan masyarakat yang dirugikan. Fakta dari kasus-kasus inilah yang kemudian 'ditemukan' dan dilansir para pakar pembangunan, juga banyak LSM. Realitas yang terbuka ketika rezim pemerintahan Orba jatuh dibarengi krisis ekonomi dan krisis sosial politik memperlihatkan 'secara mengejutkan' kondisi-kondisi masyarakat dan kemiskinan yang sebenarnya.

---

[7] Hall Hill. Ed. 1994. Ibid. Hlm 57.

Berbagai studi dan wacana mengenai kemiskinan sudah banyak digelar dan menghasilkan berbagai cara pandang terhadap kemiskinan dan upaya penanggulangannya. Kemiskinan merupakan suatu fenomena sosial yang mempunyai sebab-sebab sosio-politik dan ekonomi yang mendasar[8], sehingga kemiskinan tidak bisa dipandang hanya dari satu sisi tetapi harus dilihat secara menyeluruh. Pembangunan yang dilakukan pemerintah secara sektoral tidak menyentuh sisi-sisi poleksosbudhankam masyarakat secara riil, malah menghasilkan dampak ikutan terjadinya perubahan-perubahan yang merugikan masyarakat akar rumput. Program revolusi hijau misalnya, yang menghasilkan label swasembada pangan pada masyarakat desa tertentu menyebabkan terjadinya perubahan kelembagaan atau institusi yang secara sosial ekonomi mendukung kehidupan masyarakat desa[9]. Perubahan ini lebih lanjut menyebabkan terjadinya diferensiasi sosial masyarakat yang semakin besar, karena terjadi proses pemiskinan dan pemarjinalan pada masyarakat akar rumput.

Sumber-sumber daya lokal pedesaan beralih tangan dan beralih rupa. Sumber daya lokal tidak lagi hanya dikuasai para elit desa yang biasanya menjadi patron warga masyarakat lokal. Aktor dari luar turut menguasai sumber-sumber daya lokal. Mereka datang dan mempunyai akses terhadap sumber daya lokal melalui para para patron lokal yang seringkali berperan sebagai saluran-saluran masuk pemerintah dan aktor swasta dalam permainan kehidupan masyarakat di pedesaan. Akibatnya, struktur

---

8 Diangkat dari E. Leontine Visser. Mensiasati Kemiskinan. Dalam Frans Husken, Mario Rutten dan jan-Paul Dirkse. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial : Indonesia Dibawah Orde Baru*. PT Gramedia. Jakarta.

9 Lihat antara lain dalam Yujiro Hayami dan Masao Kikuchi. 1987. *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Desa di Asia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

sosial masyarakat desa mengalami perubahan karena berubahnya relasi-relasi sosial antarkomponen struktur tersebut. Perubahan ini mengakibatkan corak interaksi sosial-ekonomi yang bersifat timbal balik dan rasional[10] mengalami perubahan pula. Scott (1993) menyatakan bahwa ikatan patron-klien melemah disebabkan beberapa faktor, antara lain terjadinya diferensiasi sosial di dalam desa yang acuannya dari luar desa. Scott pun menyebutkan bahwa kesenjangan pemilikan dan penguasaan tanah dapat memperkuat ikatan patron-klien karena ketergantungan buruh tani menjadi semakin kuat pada hubungan kerja atas tanah, tetapi dapat pula mengakibatkan hal sebaliknya, yaitu penggusuran buruh tani tetap terjadi dan buruh tani makin banyak yang tidak berpatron lagi. Kelompok masyarakat desa yang kemudian tidak lagi memiliki patron dan akses terhadap sumber daya alternatif. Apabila tidak mendapatkan mekanisme strategi adaptasi yang tepat boleh jadi malah menambah tingginya angka kemiskinan yang telah ada.

Masyarakat desa yang tergusur ini menjadi strata masyarakat yang dimiskinkan dan terabaikan dalam payung pembangunan. Mereka termarjinalisasi hingga ke pinggir atau ke bawah struktur masyarakat desa. Posisi tawar (*bargaining position*) mereka terhadap kekuasaan pemerintah dan kelompok kroninya yang pro pemerintah sangat lemah. Segala bentuk ketidakpuasan masyarakat akar rumput terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan kroninya yang merugikan mereka diredam pemerintah dengan tuduhan menghambat pembangunan. Bahkan dapat pula muncul stigmatisasi sebagai orang yang pro-komunis, terutama apabila desa atau

---

[10] Didalam relasi patron-klien terdapat aliran sumber daya sosial ekonomi dari satu pihak ke pihak lain secara dua arah. Aliran sumber daya bersifat materi biasanya lebih banyak mengalir dari patron (yang mempunyai status kesejahteraan lebih tinggi) kepada klien. Sementara dari klien kepada patron biasanya berupa tenaga dan penghambaan. Lihat James C. Scott. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. YOI. Jakarta. Hlm 9-10.

wilayah tersebut mempunyai sejarah traumatis yang berkaitan dengan lembaran gelap sejarah politik nasional tahun 1965 yang sangat diwaspadai rezim Orba[11]. Proses pemiskinan dan pemarjinalan masyarakat dapat terjadi pada berbagai kelompok masyarakat dalam berbagai hal dan dengan cara yang berbeda.

Kemiskinan dan Dinamika Masyarakat

Umumnya orang dipandang miskin karena tingkat kesejahteraan ekonominya rendah, yang dicirikan dengan kondisi rumah kecil, reyot, dan kotor serta minimnya atau tidak adanya sumber pendapatan rumah tangganya. Kondisi tersebut baru menggambarkan kemiskinan dari satu sisi, yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan sebenarnya berdimensi lebih luas lagi. Kesejahteraan materi (*material well-being*) hanya satu dimensi kuantitatif bagi kepentingan tertentu dan digunakan pihak tertentu baik formal maupun informal. Ukuran kuantitatif yang digunakan pun beragam seperti garis batas kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia US $ 50 per kapita per tahun untuk daerah pedesaan dan US $ 75 per kapita per tahun untuk daerah perkotaan[12], juga ukuran garis batas kemiskinan yang dikemukakan Sayogyo berdasarkan kebutuhan pokok beras perkapita per tahun.

---

[11] Pemerintah Orba melakukan antisipasi terhadap 'bahaya laten' yang dianggap akan merongrong kekuasaannya dengan mengkampayekan istilah "bersih lingkungan", "penataan" dan "normalisasi". Lihat Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. Ed. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Penerbit Mizan. Bandung. Hlm 31-33.

[12] Dikutip dari Heru Nugroho. Makalah Seminar. Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 28-29 Januari 1994. Lihat juga Sajogyo, dkk. 1987. *Analisa Pendapatan Petani Berdasarkan Data Sensus Pertanian 1983*. BPS dan PSP - LP IPB. Hlm. 4.

Dimensi lain dari kemiskinan adalah kemiskinan relatif[13]. Dimensi kemiskinan yang ini bersifat fundamental dan sangat manusiawi. Salah satu contoh konkrit dari kemiskinan relatif adalah pemiskinan partisipasi politik masyarakat akar rumput di Indonesia pada masa pemerintahan Orba. Masyarakat hanya menjadi *floating mass* yang dapat dengan mudah dimobilisasi untuk kepentingan-kepentingan pemerintah dan elit tertentu. Hafidz (1997) menyatakan bahwa dengan memahami kemiskinan dalam kerangka kebutuhan manusiawi yang sangat mendasar, pembangunan akan dapat dilakukan secara lebih komprehensif, dengan kata lain manusia diperlakukan sebagai subyek dalam proses pembangunan.

Pembangunan yang dilakukan selama masa pemerintahan Orba lebih melihat masyarakat sebagai obyek. Bila dicermati kondisi-kondisi tersebut tidak terlepas dari struktur kekuasaan pemerintah yang dibangun, yang mencerminkan proses jawanisasi dalam pengejawantahannya. Geertz (1972) menyebut penegakan kekuasaan di Indonesia dengan istilah Negara Teater. Menurutnya, kekuasaan ditegakkan lewat ritualitas dan produksi aneka simbol raja sebagai pusat hirarki kosmosnya. Negara disimbolkan sebagai panggung. Raja sebagai pusat yang berkuasa atas segala-galanya. Oleh karena itu, dalam skenario perkembangan pemerintahan terjadi pembenaran akan tindakan-tindakan pemerintah. Salah satu pembenaran yang terjadi adalah penggelaran figur sakral "Bapak Pembangunan" bagi Soeharto sebagai legalisasi struktur kekuasaan yang dibangunnya untuk mengesankan kemajuan dalam

---

[13] Kemiskinan relatif diartikan kemiskinan-kemiskinan di luar kemiskinan ekonomi antara lain kemiskinan perlindungan, kemiskinan afeksi, kemiskinan pengetahuan, kemiskinan partisipasi, dan kemiskinan identitas, seperti yang dilukiskan Max Neef (1989) dalam tulisan Wardah Hafiz; *Kemiskinan-Kemiskinan di Luar Ekonomi.* Dalam. Frans Husken. Dkk. ed. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial : Indonesia Dibawah Orde Baru.* PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.

menciptakan masyarakat yang bersih, teratur dan modern (Guinness, dalam Hill, 1994). Pemerintah mengangkat formula Pancasila sebagai prinsip berbangsa dan bernegara bagi masyarakat melalui berbagai wacana yang terkontrol. Pancasila menjadi obsesi ideologis[14] pemerintah dan menjadi dasar bagi kontrol negara terhadap pergerakan sosial masyarakat. Sullivan (1992:208) melihat Pancasila sebagai simbol kunci 'masyarakat yang diimpikan' *(imagined community)* dari wacana negara-bangsa pemerintah Orba. Pemerintah Orba membentuk wacana pembangunan yang dibalut konsep demokratisasi dan partisipasi rakyat. Padahal sebenarnya semakin mengukuhkan posisi pemerintah sebagai penguasa segala sumber daya. Dwifungsi ABRI, pengendalian prilaku politik pemuda, pembentukan daerah otonomi dengan UU no. 5/ 1974, dan birokratisasi desa[15] adalah beberapa wacana pembangunan yang sangat berhasil mendukung kelestarian kekuasaan pemerintah.

Struktur masyarakat desa tradisional mengalami perombakan besar. Proses memasukkan desa ke dalam negara dan negara ke dalam desa[16] melalui wacana-wacana pembangunan membawa desa ke dalam kotak pengontrolan dan pendisiplinan dibawah kendali pemerintah pusat. Penguatan terjadi bukan pada masyarakat desanya melainkan pada pemerintah pusat sendiri. Konsep otonomi daerah dan pembentukan kelembagaan desa menjadi salah satu senjata pemerintah untuk menghisap begitu besar sumber daya hidup masyarakat desa. Pemerintah pusat berperan sebagai dalang

---

[14] J. Bowen. 1991. *Sumatran Politics and Poetics : Gayo History 1900 – 1969*. Yale University Press. New Haven and London. Dalam Guinness, *Patrick. Local Society and Culture*. Dalam Hall Hill. Ed. 1994. *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. Allen&Unwin Pty Ltd. Australia. Hlm 272.

[15] Lihat Dr. Mohtar Mas'oed. 1994. Politik Birokrasi dan Pembangunan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm 4-19.

[16] Dr. Mochtar Mas'oed,. 1994. Ibid, Hlm 15-18.

bagi pemerintah lokal agar bertindak sesuai dengan keinginannya. Menurut Sullivan (1992:212) masyarakat lokal menjadi suatu 'masyarakat yang diciptakan' *(invented community)* agar dapat dikendalikan pusat dan harus melayani kepentingan pemerintah pusat melalui institusi-institusi bentukan pemerintah seperti gotong-royong yang bermakna sebagai metode mobilisasi massa ketimbang sebagai upaya mengakomodasi modal sosial masyarakat bagi keamanan sosial ekonominya. Perilaku pemerintah dengan wacana-wacananya tersebut tidak terlepas dari sistem ekonomi politik internasional yang berlaku, yang akhir-akhir ini mengembangkan konsep-konsep global semisal globalisasi ekonomi yang sebenarnya digulirkan oleh negara-negara kapitalis dengan tujuan negara berkembang terangkum dalam kekuasaan mereka.

Di tingkat lokal serbuan kepentingan nasional yang didorong kepentingan-kepentingan negara luar tersebut berpengaruh terhadap dinamika sistem dalam struktur masyarakat desa seperti halnya sistem relasi patronase tradisional masyarakat. Relasi patron-klien menjadi terganggu karena para patron ~ elit dan pemimpin desa yang memiliki sumber daya lokal besar ~ saling berkompetisi mendapatkan 'perhatian' pemerintah pusat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Gelombang kekuasaan pemerintah pusat membawa para elit atau pemimpin formal dan informal lokal ke arah perebutan peran sebagai penyalur suara pemerintah pusat. Insentif sosial ekonomi dan politik bagi mereka dari pemerintah pusat sangat menjanjikan peningkatan status. Status birokratis dan kapitalis yang sangat dekat dengan pemerintah Orba menjadi sangat mendesak bagi mereka. Relasi patron-klien lokal mengalami perubahan seiring dengan pengaruh sistem ekonomi global yang penuh dengan definisi komersial yang membalut wacana pembangunan hingga tingkat masyarakat akar rumput. Kepentingan elit dan pemimpin lokal terhadap para klien terbatas pada ketertarikan mereka pada keuntungan-keuntungan sosial ekonomi yang

dapat memperkuat posisi mereka dalam perebutan peran sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah pusat. Relasi patron-klien sebagai suatu sistem asuransi sosial bergeser menjadi lebih eksploitatif ketimbang mutualistis.

Proses dinamika masyarakat secara internal juga dipengaruhi oleh terjadinya perbedaan-perbedaan ideologi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Aliran-aliran keagamaan dan religi yang masih banyak hidup dalam masyarakat Indonesia turut berperan penting membentuk ideologi kelompok-kelompok masyarakat. Persinggungan ideologi antarkelompok seringkali mewarnai permasalahan sosial ekonomi politik masyarakat. Terutama apabila satu ideologi tertentu mendapatkan tempat yang leluasa dalam kekuasaan pemerintahan lokal. Hal ini terjadi pada kelompok Mikung di Kampung Gunung Kembang Tasikmalaya.

Peristiwa 'hitam' G30S PKI dalam sejarah politik Indonesia pada tahun 1965 membawa pengaruh sangat besar terhadap perkembangan kelompok Mikung. Dukungan warga masyarakat terhadap PKI sebagai partai yang menyuarakan 'kemiskinan' mereka dalam kepercayaan dan penguasaan sumber daya, ternyata menyebabkan terjadinya proses pemiskinan saat terjadi perubahan pemerintahan dari Orla ke Orba. PKI menjadi partai terlarang dan orang-orang yang dikaitkan dengannya menjadi orang penuh dosa dan harus 'dicabut' hak-haknya sebagai warga negara.

Kondisi kemiskinan yang dialami masyarakat dengan demikian adalah efek dari sebab-sebab yang terakumulasi sedemikian jenuhnya. Masalah-masalah struktural saling mempengaruhi kondisi internal masyarakat, seperti sejarah dan perbedaan ideologi antarkomunitas yang ada dalam masyarakat lokal. Variabel-variabel internal yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat lokal menjadi sangat penting untuk

dipertimbangkan, mengingat pluralitas masyarakat Indonesia yang sangat tinggi. Kompleksitas budaya masyarakat sudah seharusnya mendapatkan pendekatan dan perlakuan yang lebih bijaksana. Keberagaman tersebut memberikan keragaman pengalaman dan dinamika perkembangan terhadap masing-masing masyarakat. Konsep *bottom up development* (partisipasi lokal) yang diangkat dalam atmosfir aktivitas berbagai lembaga yang menunjukkan perhatian terhadap penguatan masyarakat miskin sudah seharusnyalah menyentuh sisi kompleksitas tersebut. Diabaikannya keberagaman tersebut berpengaruh pula terhadap kegagalan program-program pengentasan kemiskinan yang pernah dilakukan, seperti program IDT.

Resistensi Masyarakat Akar Rumput Terhadap Kemiskinan dan Marjinalisasi

Di dalam kemiskinannya masyarakat akar rumput mengembangkan perilaku resistensi atau perlawanan. Berbeda dengan bentuk resistensi frontal yang keras dan besar-besaran dalam bentuk demonstrasi atau kerusuhan massa, resistensi yang dikembangkan masyarakat akar rumput bersifat terselubung dan diam-diam[17]. Scott (1993) menggambarkan contoh kondisi perlawanan tersebut seperti yang dilakukan oleh kaum buruh tani di Desa Sedaka Malaysia. Hilangnya peluang memperoleh alat produksi, hilangnya jaminan sosial, marjinalisasi pekerjaan dan pendapatan, serta perkembangan kapitalis, menjadi alasan kaum buruh tani melakukan perlawanan secara diam-diam terhadap para pemilik tanah. Bentuk perlawanan yang dilakukan mulai dari sabotase, pencurian, penghambatan, kepatuhan pura-pura[18] dan sebagainya

[17] Scott menyebutnya sebagai bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari (*everyday forms of resistance*), diangkat dari James C. Scott 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

[18] Bentuk-bentuk perlawanan seperti kepatuhan pura-pura, menghambat dsb diistilahkan Scott sebagai *Weapons of the weak*. Lihat James C. Scott. 1985.

yang bersifat menggerogoti sedikit demi sedikit kekuasaan elit tanpa pihak yang digerogoti mampu berbuat apa-apa untuk menghentikannya.

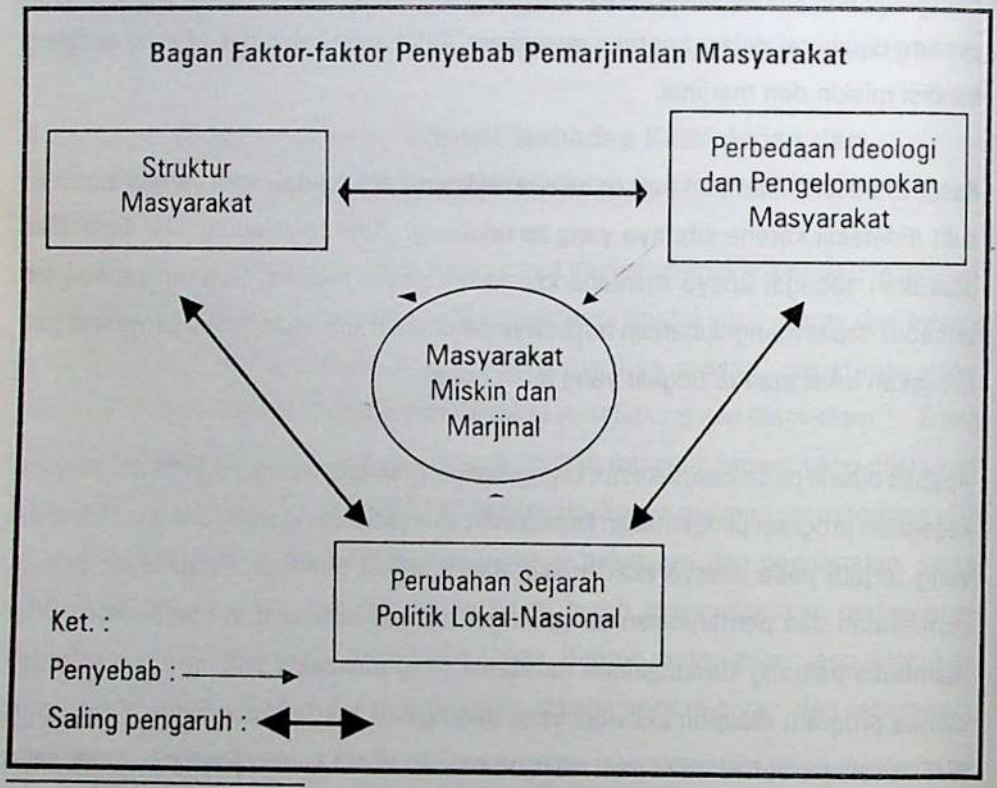
Kelompok Mikung menghadapi permasalahan yang serupa dengan masyarakat petani Sedaka tersebut. Pemarjinalan akses terhadap *resources* dan kekuasaan menyebabkan mereka tidak mampu secara nyata mengubah ketakberdayaannya. Akan tetapi, ternyata mereka tetap mampu bertahan hidup dalam tekanan-tekanan tersebut. Bentuk-bentuk perlawanan sehari-hari yang dilakukan seperti pada kasus Sedaka penting dipahami dalam konteks memahami ketahanan kelompok Mikung di dalam kondisi miskin dan marjinal.

Kasus di Sedaka memperlihatkan bahwa resistensi atau perlawanan yang dilancarkan sulit dideteksi karena sifatnya yang terselubung. Sifat terselubung dan diam-diam dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan posisi mereka. Gerakan perlawanan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya perubahan kebijakan[19] oleh penyelenggara kebijakan lokal atau di tingkat yang lebih tinggi.

Apabila ditarik pada kasus-kasus kegagalan program pemerintah di Indonesia seperti kegagalan program pengentasan kemiskinan, menjadi perlu menengarai pola resistensi yang terjadi pada masyarakat miskin dan marjinal tersebut. Pengalaman proses pemiskinan dan pemarjinalan yang sangat represif selama masa pemerintah Orba membuka peluang kemungkinan resistensi yang mengakar pada mereka terhadap semua program ataupun aktivitas yang datang dari luar lingkungannya. Pada kasus KUT misalnya, petani tidak mau mengembalikan kredit karena jumlah bantuan tidak

[19] James C. Scott. 1993. Op cit.

sesuai dengan kebutuhannya. Mereka memandang negara telah menghisap pajak kemudian dikorupsi hingga trilyunan rupiah, sementara kebutuhan mereka tidak pernah dipenuhi[20]. Kecurigaan mereka atas perlakuan dari luar sebagai proses pemiskinan dan pemarjinalan baru akan sangat tinggi. Berkaitan dengan diskursus mengenai pemberdayaan, selain penyebab proses pemiskinan dan pemarjinalisasian, pola resistensi dapat menjadi jalan masuk bagi pendekatan program pemberdayaan yang akan dilakukan.



[20] Diangkat dari Studi Implementasi Kelompok Informal Perdesaan Dalam Pembangunan Pertanian yang Berwawasan Lingkungan, Akatiga-Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup, September 1998 - Januari 1999.

Metode Penelitian

a. Pemilihan Lokasi

Studi ini dilakukan di Kampung Gunung Kembang yang secara administratif termasuk kedalam wilayah Kelurahan Sukaati Kecamatan Citepus Kota Administratif Tasikmalaya. Demi keamanan masyarakat lokal semua nama tempat dan sebutan lainnya disamarkan dalam tulisan ini. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposif*, berdasarkan kenyataan bahwa lokasi tersebut ditengarai sebagai basis pendukung organisasi massa PKI. Stigma sebagai daerah basis partai dan organisasi terlarang ini diharapkan dapat menjelaskan bagian proses marjinalisasi yang terjadi pada masyarakat akar rumput. Kampung Gunung Kembang terbagi menjadi tiga RW yaitu RW 9 Gunung Kembang Kaler, RW 10 Gunung Kembang Tengah, dan RW 11 Gunung Kembang Kidul, masing-masing secara dominan menganut aliran religi yang berbeda. Perbedaan inilah yang berpengaruh terhadap terjadinya pembagian wilayah Kampung Gunung Kembang.

Penentuan lokasi penelitian ini juga tidak terlepas dari kerja sama dengan LSM lokal Tasikmalaya yaitu Yayasan Perisai Biru - Unit Sumbangsih Nuansa Tasikmalaya yang menjadi mitra kerja Akatiga dalam studi ini. Kerja sama dapat terwujud karena minat yang sama dalam kajian studi institusional dan pemberdayaan masyarakat.

b. Teknik Penelitian

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan alasan bahwa dinamika sosial ekonomi dan politik yang menghasilkan kondisi miskin dan marjinal pada masyarakat

akar rumput berkaitan dengan interaksi dan perubahan dalam realitas masyarakat dapat digali lebih mendalam. Penelitian lapangan dilakukan selama empat bulan, mulai Desember 1999 hingga Maret 2000. Teknik penelitian antropologis Pengamatan Terlibat dilakukan dengan cara tinggal di lokasi selama waktu penelitian berlangsung. Selain itu, dilakukan pula metode penelitian *Participatory Rural Appraisal* (PRA) untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan mengenai peristiwa sejarah sosial ekonomi dan politik lokal.

c. Teknik Pengumpulan dan Pencatatan Data

Kebutuhan data dirancang dalam bentuk daftar kebutuhan data dan cara memperolehnya. Daftar data dilengkapi dengan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara. Daftar data dan pedoman wawancara ini menjadi kerangka agar peneliti tidak kehilangan fokus penelitian. Wawancara mendalam *(indepth-interview)* dilakukan terhadap beberapa informan pangkal (*basic informants*) dan informan kunci (*key informants*). Wawancara terhadap informan pangkal dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum lokasi penelitian lokal kampung dan kondisi umum desa dan prasarananya, struktur penguasaan aset produksi, institusi sosial ekonomi masyarakat lokal, dan program-program pembangunan pemerintah termasuk upaya-upaya penanggulangan krisis. Para informan pangkal ini terdiri dari aparat desa dan tokoh RW. Sedangkan wawancara dengan informan kunci dilakukan untuk memperoleh data mengenai status sosial ekonomi informan dalam masyarakat, bentuk-bentuk represi yang dialami informan dalam wacana pembangunan pemerintah Orba, bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan informan, dan institusi lokal yang berperan dalam resistensi yang dilakukannya. Informan kunci adalah warga masyarakat, dipilih secara purposif yang terkait dengan isu organisasi terlarang

pada masa rezim pemerintah Orba . Dalam wawancara mendalam ini juga dilakukan metode *oral history* yaitu pencatatan sejarah lisan yang dialami oleh informan pokok yang menjadi pelaku sejarah pada masa perang kemerdekaan dan peralihan pemerintahan dari Orla ke Orba . Penelaahan data kondisi sosial ekonomi dan politik secara diakronis melalui sejarah lokal sangat diperlukan berkaitan dengan keberadaan stigma-stigma yang melekat dan proses pembagian wilayah lokal kampung.

Diskusi kelompok dilakukan pula sebagai salah satu metode menjaring informasi melalui metode penelitian PRA. Diskusi dilakukan dengan tujuan menjaring data tentang persepsi, sikap, dan tanggapan informan mengenai kondisi sosial ekonomi dan politik lokal. Orang-orang yang dilibatkan dalam diskusi kelompok ini dipilih secara *purposif* berdasarkan kriteria : penduduk asli Kampung Gunung Kembang Tengah, termasuk dalam kelompok Mikung, dan merupakan orang yang dikenai stigma PKI atau keturunannya.

Pengumpulan data sekunder, antara lain dari data Monografi Desa dan Potensi Desa dimaksudkan untuk melihat gambaran umum desa dan kaitannya dengan kondisi kampung lokasi penelitian. Data sekunder lainnya adalah data keluarga dari PLKB untuk mengetahui jumlah keluarga sejahtera (KS) dan keluarga pra-sejahtera (Pra-KS). Data-data sekunder ini digunakan sebagai pedoman kondisi masyarakat secara umum karena seringkali kenyataannya data-data yang tertera tidak sesuai dengan kondisi yang ada.

Pencatatan data dilakukan dengan pencatatan di dalam buku catatan dan rekaman kaset. Data rekaman kaset dipindahkan dengan teknik penulisan kata per kata. Penggunaan teknik pemindahan hasil rekaman kaset ke dalam bentuk tulisan kata

per kata memerlukan waktu yang cukup lama. Kesulitan juga bertambah karena wawancara dilakukan dengan menggunakan bahasa daerah Sunda, sehingga setelah dipindahkan ke dalam bentuk tulisan harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian dipindahkan kedalam Program Software Ethnograph versi 5.0 untuk memudahkan pengolahan data untuk kepentingan analisis yang dilakukan secara **kualitatif.**

Sistematika Pembahasan

Penulisan laporan ini disusun dalam enam bagian. Tujuan dan kerangka pemikiran penelitian dituangkan pada Bagian Pertama. Bagian Kedua berisi uraian tentang struktur sosial sebagai satu faktor besar yang bekerja dalam menyebabkan kemiskinan dalam masyarakat akar rumput di lokasi penelitian. Struktur formal pemerintahan disorot dengan melihat variabel pembangunan formal yang dilancarkan ke dalam lokasi penelitian, dan bagaimana pengaruhnya saling berjalin dengan kepentingan pihak-pihak tertentu. Fokus perhatian pada struktur informal masyarakat, memperlihatkan relasi-relasi sosial di dalam pemilikan dan akses pada bidang sosial ekonomi dan politik yang juga sangat dipengaruhi variabel struktur formal.

Bagian selanjutnya menguraikan kondisi perbedaan ideologi di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat di lokasi penelitian yang berkaitan erat dengan terjadinya perbedaan dukungan masyarakat terhadap partai pada masa orde lama. Di dalamnya dijelaskan pula bagaimana penganutan ideologi kepercayaan membentuk suatu kelompok yang disebut kelompok Mikung. Kemudian bagaimana ideologi agama Islam berbenturan dengan ideologi kepercayaan hakekat yang bersifat filsafati, menciptakan label stigma yang dikaitkan pula dengan stigma politis akibat dukungan

terhadap partai terlarang. Pemaparan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana konflik ideologi antar-kelompok masyarakat turut berperan dalam memperkuat proses marjinalisasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Proses marjinalisasi terhadap masyarakat termasuk didalamnya yaitu kelompok masyarakat yang diberi stigma PKI beserta keturunannya dan kelompok masyarakat mikung yang berideologi sosial ~ sementara stigma PKI sangat lekat dengan stigma mikung ~ ternyata memunculkan berbagai resistensi.

Bagian Keempat memaparkan perjalanan sejarah lokal dalam kaitannya dengan sejarah struktur politik nasional yaitu untuk menengarai proses marjinalisasi terhadap masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat dengan bentuk kemiskinan yang ada sekarang sebagai akibat dari perubahan-perubahan dalam struktur politik nasional. Perubahan sistem pemerintahan dari pemerintahan Orla ke Orba pada tahun 1966 yang dipicu oleh kejadian puncak G30 S tahun 1965 menjadi titik balik perubahan kehidupan masyarakat yang dikaitkan dengan partai pelaku kejadian tersebut. Stigmatisasi yang dilancarkan diwarnai dengan sentimen para mantan pendukung partai fundamental Islam yang merasa pernah berseteru dengan mereka saat gerakan pendirian negara Islam dicoba dibangkitkan. Tekanan-tekanan kemudian dilakukan pemerintah yang mengakar hingga ke pelosok pedesaan untuk membabat 'bahaya laten komunis', seperti dengan memberikan tanda khusus pada pengenal diri warga.

Bagian Kelima, mengidentifikasi bentuk-bentuk resistensi yang dilakukan masyarakat Kampung Gunung Kembang khususnya kelompok Mikung dalam menghadapi proses pemiskinan. Identifikasi dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa masyarakat akar rumput sebenarnya tidak tinggal diam dalam proses marjinalisasi terhadap dirinya. Mereka menggunakan mekanisme-mekanisme perlawanan yang

terselubung dan sulit dideteksi sebagai pertahanan diri. Sementara itu upaya pemberdayaan yang akan dilancarkan menjadi sangat penting untuk memahami penyebab ketidakberdayaan masyarakat, agar upaya tersebut berhasil guna bagi keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.

Bagian Penutup dari tulisan ini memuat kesimpulan dari uraian mengenai permasalahan masyarakat marjinal dan pemberdayaan. Bab ini diakhiri dengan butir-butir rekomendasi yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam memahami kondisi masyarakat, yang diharapkan memiliki kontribusi yang berarti bagi upaya pemberdayaan masyarakat.

DUA

STRUKTUR MASYARAKAT KAMPUNG GUNUNG KEMBANG

Bagian ini menggambarkan relasi dan interaksi yang terjadi antar-komponen masyarakat yang saling berjalin membentuk jaringan hubungan yang kompleks. Jaringan hubungan ini meliputi komponen masyarakat yang berada di lingkungan birokrasi pemerintah, masyarakat sipil non-birokrasi pemerintah, dan masyarakat dari luar wilayah kampung tetapi berperan penting dalam interaksi dengan masyarakat lokal.

Setting Penelitian

Kampung Gunung Kembang termasuk dalam wilayah Desa Sukaati Kecamatan Citepus Kota Administratif Tasikmalaya. Desa Sukaati yang berpenduduk 17874 Jiwa dengan 3984 KK (Potensi Desa, 1999) dan terbagi ke dalam 17 RW tergolong daerah berpenduduk padat. Sementara Kampung Gunung Kembang yang terdiri dari tiga RW berpenduduk sekitar 3000 jiwa. Pertambahan penduduk desa karena adanya pendatang yang masuk dan menjadi penduduk setempat tidak tercatat dalam data potensi desa, padahal kenyataannya di Kampung Gunung Kembang terjadi pertambahan penduduk. Hal ini tidak terlepas dari kondisi wilayah kampung yang cukup terbuka dari segi kemudahan akses transportasi.

Kampung Gunung Kembang gampang dicapai karena terletak di tusukan jalan raya dan dilalui banyak kendaraan mulai dari angkutan kota hingga angkutan antar- kota

dan antar-propinsi. Jalan raya Tasikmalaya - Ciamis adalah jalan utama yang membelah kampung Gunung Kembang menjadi dua bagian. Di kiri kanan jalan raya berdiri rumah-rumah permanen bercat putih biru dan beberapa warung kecil. Sebuah warung telekomunikasi (wartel) berdiri di pinggir jembatan kecil . Di ujung jalan yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, terdapat sebuah pom bensin. Di seberang pom bensin ada Obyek Wisata Kembang Asri berupa taman yang luasnya mencapai sisi Sungai Cibodas. Taman ini sekaligus menjadi batas antara Kota Administratif Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis.

Jarak Kampung Gunung Kembang ke kantor pemerintahan desa tidaklah terlalu jauh. Posisi Kantor Kelurahan Sukaati terletak di pinggir jalan raya dan dapat dicapai kira-kira 5 menit perjalanan menggunakan angkutan umum, membuka kemungkinan interaksi yang kerap antara kelurahan dan masyarakat Gunung Kembang. Sedangkan Kantor Kecamatan Citepus lebih jauh dan untuk mencapainya dengan kendaraan umum harus melalui jalan yang memutar melalui daerah alun-alun Tasikmalaya terlebih dahulu.

Jalan raya yang melalui Kampung Gunung Kembang termasuk jalan utama yang ramai dilalui kendaraan besar dan kecil baik dari dalam maupun ke luar kota menuju daerah Jawa Tengah. Angkutan umum perkotaan yang melalui jalan ini adalah jurusan Terminal Parung – Kembang Asri. Pada kenyataannya angkutan tersebut tidak memiliki terminal pemberhentian angkutan di daerah Kembang Asri ~ yang berada di dalam wilayah Kampung Gunung Kembang Tengah ~ tetapi berhenti di Terminal Singaperbangsa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis. Keramaian di depan taman wisata yang tadinya menjadi terminal sementara pindah ke daerah Singaperbangsa. Peluang warga yang mencari nafkah dengan berjualan makanan dan minuman di

terminal sementara tersebut menjadi hilang. Sementara Terminal Parung dapat dicapai sekitar 10 menit perjalanan naik angkutan umum tersebut dari Kampung Gunung Kembang Tengah. Jarak Kampung Gunung Kembang dari pusat ekonomi seperti pasar tradisional juga tidak terlalu jauh, karena letaknya bersebelahan dengan Terminal Parung. Situasi ini menunjukkan bahwa Kampung Gunung Kembang menjadi daerah yang cukup terbuka bagi arus informasi dan transportasi ke dalam dan keluar kampung.

Kondisi topografis daerah Kampung Gunung Kembang seperti juga umumnya kampung-kampung lain di Tasikmalaya cenderung berbukit-bukit dengan ketinggian kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi perbukitan ini terlihat dari nama daerah yang terdapat di wilayah tersebut, seperti Gunung Bengkung, Gunung Bintul dll. Daerah tersebut dinamai 'gunung' karena merupakan bukit kecil atau gundukan tanah menggunung. Pada awalnya bukit-bukit yang menggunakan nama gunung-gunung tersebut merupakan daerah hutan kayu. Demikian juga Kampung Gunung Kembang, awalnya adalah daerah hutan yang kemudian dibuka menjadi hunian atau menjadi lahan produktif berupa sawah (*serang*) dan kebun. Aliran Sungai Cibodas yang deras mendukung pengusahaan lahan tersebut, dengan pembuatan saluran-saluran air kecil secara tradisional. Kondisi topografis yang berbukit-bukit ini juga yang membagi Kampung Gunung Kembang menjadi tiga wilayah, yaitu Kampung Gunung Kembang Kidul, Kampung Gunung Kembang Tengah, dan Kampung Gunung Kembang Kaler.

Hubungan kekerabatan warga Gunung Kembang di ketiga wilayah dibangun melalui kaitan-kaitan yang sangat erat berdasarkan pertalian darah dan perkawinan. Berdasarkan sejarah perkembangan masyarakatnya, keturunan asli perintis pembuka kampung sekarang ini hidup di Kampung Gunung Kembang Tengah. Hubungan

kekerabatan sangat mempengaruhi akses warga Kampung Gunung Kembang terhadap sumber daya dan kekuasaan. Sekarang ini tinggal beberapa orang warga keturunan asli yang memiliki aset produksi tanah pertanian mendekati luas 0,5 hektar karena terjadinya proses penjualan tanah oleh berbagai sebab.

Pembagian Wilayah Kampung

Pada mulanya, secara administratif Kampung Gunung Kembang berada dalam satu kesatuan Rukun Warga namun kemudian terpecah menjadi tiga Rukun Warga. Pemekaran pada tahun 1989 dipicu oleh konflik intern antara warga masyarakat dari wilayah kidul, kaler, dan tengah. Perselisihan antara golongan NU dari wilayah kidul dan golongan Persis dari wilayah kaler muncul akibat sentimen negatif sejumlah orang golongan NU terhadap orang golongan Persis karena perbedaan pemahaman mereka dalam pengajian dan kurban. Konflik inilah yang kemudian mendorong terjadinya pembagian wilayah secara administratif oleh Pemerintah Desa. Selain perselisihan kelompok NU-Persis, ternyata ada pula kelompok lain yang merasa pemahaman keagamaan mereka tidak sama dengan golongan NU ataupun Persis dan kelompok ini juga ingin dipisahkan secara administratif dengan kedua golongan tersebut. Kelompok ketiga ini adalah warga dari wilayah tengah yang memiliki pemahaman agama Islam yang didominasi kepercayaan sinkretis dan memiliki konflik politis yang menimbulkan stigma terhadap mereka. Oleh karena itu, mereka tidak mau disatukan dengan golongan NU ataupun golongan Persis. Proses pembagian wilayah ini secara terperinci akan diuraikan dalam Bagian Keempat tulisan ini. Akhirnya, Kampung Gunung Kembang terbagi menjadi tiga wilayah , yaitu : Golongan Nahdlatul Ulama (NU), Golongan Persatuan Islam (Persis), dan golongan yang menyatakan diri sebagai Golongan Tengah.

Proses pembagian wilayah dilakukan berdasarkan musyawarah yang alot karena ada pula pihak-pihak yang tidak ingin wilayah mereka dipisah-pisahkan. Di masing-masing wilayah ada orang-orang yang menolak. Mereka yang menolak dipisah memandang masyarakat Gunung Kembang masih satu kerabat dekat. Akhirnya disetujui untuk membuat pembatasan wilayah berdasarkan ciri-ciri alam seperti sungai. Hasilnya, terbentuklah Kampung Gunung Kembang Kidul untuk golongan NU, Gunung Kembang Kaler untuk golongan Persis dan Gunung Kembang Tengah untuk golongan Tengah. Dengan pembagian tersebut sebenarnya tidak menutup kemungkinan dalam setiap wilayah baru itu terdapat sejumlah orang dari golongan yang berbeda. Seperti, di wilayah Tengah terdapat pula beberapa keluarga dari golongan NU Pembagian wilayah tetap berfungsi membagi wilayah secara administratif, adanya beberapa rumah orang golongan lain yang masuk ke dalam wilayah lain itu tidak bisa dihindarkan karena keputusan pembatasan berdasarkan batas alam. Batas alam seperti sungai tidak mungkin bisa dipindahkan dari samping kiri sebuah rumah ke samping kanannya. Sementara membagi wilayah berdasarkan rumah pendukung golongan sifatnya relatif tidak tetap, misalnya rumahnya dibongkar atau dibangun lebih luas bisa berarti terjadi perubahan dalam batas juga.

Pola Pemukiman dan Aktivitas Masyarakat

Ada cerita lokal yang menyebutkan bahwa wilayah Kampung Gunung Kembang dimulai dengan pembukaan daerah hutan oleh beberapa orang sesepuh Gunung Kembang. Namun, cerita lokal mengenai perintis kampung ini sudah tidak begitu dikenal masyarakat setempat. Beberapa orang tokoh masyarakat yang sudah lanjut usia pun hanya dapat menjelaskan bahwa kakek nenek mereka hingga 3 - 4 generasi keatasnya adalah keturunan tokoh perintis wilayah kampung tersebut tanpa kaitan runtut yang

jelas. Seperti umumnya terjadi dalam pembukaan daerah baru secara tradisional di Indonesia, pemilikan lahan dikuasai para tokoh perintis yang kemudian diturunkan melalui proses waris. Mereka membuat rumah-rumah tinggal panggung khas sunda yang terbuat dari bilik bambu dan kayu yang diambilnya dari hutan. Rumah-rumah dibangun mengelompok di sepanjang jalan setapak yang mereka buat sebagai sarana transportasi keluar masuk daerah, termasuk jalan ke lahan pertanian mereka. Posisi pemukiman sekarang pun masih berpola mengumpul sepanjang jalan utama kampung. Luas lahan pemukiman bertambah seiring dengan pertambahan penduduk.

Kampung Gunung Kembang Kidul

Kampung Gunung Kembang Kidul merupakan kampung pertama dari 3 kampung yang menyatu dalam Kampung Gunung Kembang, yang dilalui terlebih dahulu oleh jalan raya Tasikmalaya - Ciamis. Jalan tersebut sekaligus membelah kampung ini menjadi dua wilayah yang berseberangan jalan. Kampung bagian selatan jalan berbatasan dengan RW lain Desa Sukaati. Sedangkan wilayah bagian utara jalan berhubungan dengan Kampung Gunung Kembang Tengah yang dibatasi oleh empang ikan dan pesawahan. Empang ikan banyak pula terdapat di samping atau belakang rumah penduduk, tetapi tidak semua rumah rata-rata memilikinya. Umumnya hanya rumah yang mempunyai halaman samping atau belakang cukup luas yang bisa membuat empang ini. Empang-empang kecil umumnya dimanfaatkan untuk keperluan pangan keluarga, sedangkan empang-empang besar biasanya untuk dijual hasilnya. Ada beberapa rumah yang memiliki empang besar, selebihnya kecil saja. Pemilik empang besar umumnya terhitung orang kaya di kampung. Namun, di wilayah ini ada area khusus empang ikan yang letaknya berdampingan dengan sawah-sawah. Empang-empang di area ini ukurannya cukup besar. Pemilik empang di area ini adalah orang-

orang kaya dari wilayah kampung Gunung Kembang Kidul dan Gunung Kembang Tengah.

Di pinggir jalan, tertancap plang besar sebuah pesantren NU bernama Al-Fath. Pesantren itu mempunyai beberapa bangunan besar, antara lain sebuah masjid besar dengan sebuah bedug besar, sebuah pondokan santri laki-laki dan sebuah bangunan pondokan santri perempuan. Pondokan tersebut terutama disediakan untuk para santri dari luar kota. Santri di Pesantran Al-Fath kebanyakan berasal dari Kampung Gunung Kembang, terutama dari Kampung Gunung Kembang Kidul. Pada pagi hari para santri laki-laki sibuk bekerja di sawah, kebun atau empang di belakang masjid. Siang hari setelah waktu dzuhur, semua santri laki-laki dan perempuan memenuhi masjid untuk belajar mengaji.

Kampung Gunung Kembang Tengah

Pada jalan raya Tasikmalaya - Ciamis beberapa meter sebelum mencapai pom bensin terdapat sebuah jalan aspal selebar penampang bis antar propinsi yang merupakan jalan utama masuk ke wilayah kampung Gunung Kembang Tengah dan Gunung Kembang Kaler. Jalan tersebut dapat menembus hingga ke daerah kampung Cikeusik ~ masih wilayah Desa Sukaati ~ juga bisa digunakan sebagai jalan tembus hingga ke wilayah Kecamatan Parongpong Tasikmalaya. Bagian jalan yang termasuk ke wilayah kampung Gunung Kembang kurang lebih 100 meter. Bagi warga yang bekerja sebagai pedagang secara tidak langsung berpengaruh karena soal akses masuk dan keluar kampung yang terbuka.

Keadaan lingkungan fisik pemukiman dalam Kampung Gunung Kembang Tengah yang dilalui jalan tersebut cukup teratur dan bersih. Pola pemukiman terbangun memanjang

mengikuti panjang jalan. Bangunan rumah-rumah di kiri kanan jalan semua permanen. Beberapa rumah terlihat memasang antene parabola rata-rata ukuran 12 *feet*, ada yang ditanam di halaman rumahnya, ada pula yang memajangnya diatas atap rumahnya yang berlantai dua sekaligus berdampingan dengan tiang jemuran. Satu dua rumah memiliki mobil termasuk mobil yang dioperasikan menjadi angkutan penumpang umum. Rumah-rumah tersebut umumnya berpagar tembok atau besi yang tingginya sekitar 1 sampai 1,5 meter dan ada pula beberapa rumah yang berpagar besi lebih tinggi lagi. Tetapi rumah-rumah semi permanen dan tidak berpagar pun banyak yang terdapat di pinggir jalan ini. Di dalam gang-gang kecil, rumah-rumah semi permanen lebih banyak lagi. Rumah-rumah dengan kondisi semi permanen ini terdapat baik di wilayah Kidul, Tengah dan Kaler. Banyak di antara rumah-rumah tersebut memiliki empang /kolam ikan di halaman samping atau di belakang rumahnya. Tepat di halaman belakang sebuah mesjid bercat putih yang terletak di pinggir jalan di antara jajaran rumah-rumah tersebut pun terdapat dua buah kolam yang cukup besar. Seperti juga di wilayah kampung Gunung Kembang Kidul, pemilik kolam besar ini termasuk golongan orang kaya di kampung. Pemilikan kolam atau empang oleh keluarga di daerah Tengah ini hampir sama dengan di kampung Gunung Kembang Kidul.

Di sepanjang jalan ini ada dua buah warung kecil yang menjual barang kebutuhan sehari-hari, satu buah warung cukup besar dan satu buah warung khusus menjual barang-barang kelontong perlengkapan rumah tangga seperti sapu lidi, sapu ijuk dan tudung saji. Dari 2 warung kecil tersebut, 1 buah warung nampak selain menjual barang keringan (seperti rokok, sabun, dll.) dan menjual bahan pangan siap olah seperti sayuran juga menjual makanan olahan (makanan masak siap makan).

Sementara warung yang cukup besar yang letaknya tepat berseberangan dengan warung tersebut, lebih mirip toko dengan sistem etalase kaca dengan barang dagangan yang tersusun rapih kemudian dilengkapi pula dengan mesin pendingin minuman dan es krimnya. Sebuah bangunan di antara rumah-rumah dan warung-warung tersebut memiliki bengkel sederhana yang bangunannya beratapkan seng, dan dua buah badan mobil yang mesinnya sudah terkena bongkar pasang menghiasi bengkel tersebut.

Pada pagi dan sore hari, di beberapa rumah terlihat penghuni-penghuninya yang melakukan aktivitas di samping atau halaman rumahnya, seperti menyapu halaman, menjemur pakaian, sampai mencuci mobil atau kadang terlihat duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Beberapa orang ibu berasal dari Kampung Gunung Kembang Kaler terlihat berganti-ganti berkeliling ke rumah-rumah di seluruh kampung untuk menjajakan lauk-pauk olahan.

Kampung Gunung Kembang Kaler

Pada bagian jalan besar yang termasuk wilayah Kampung Gunung Kembang Kaler, hanya terdapat beberapa rumah saja dan dua warung kecil terbuat dari bilik. Rumah-rumah tersebut terletak pada bagian sisi kiri jalan, hanya ada satu buah rumah besar bertaman dengan garasi mobil yang besar pada sisi kanan jalan tersebut. Sisi kiri jalan setelah rumah-rumah tersebut didominasi oleh pesawahan dan empang-empang ikan, sumber airnya berasal dari saluran-saluran irigasi semi teknis dari hulu Sungai Cibodas. Sementara pada sisi kanan yang kondisi topografinya bertebing-tebing terdapat sebuah sekolah menengah tingkat pertama negeri, bangunannya terlihat masih baru. Di samping sekolah tersebut terhampar sebuah lokasi pemakaman umum

warga, yang dikelilingi hamparan kebun singkong dan sayuran. Penduduk yang tinggal di daerah ini lebih sering berinteraksi dengan penduduk Kampung Gunung Kembang Tengah karena letaknya yang lebih berdekatan.

Ada dua jalan masuk ke daerah pemukiman penduduk Gunung Kembang Kaler, yang pertama melalui jalan setapak di samping pemakaman umum warga. Jalan kedua berupa jalan kecil berbatu dan sebagain bersemen terletak di ujung Kampung Gunung Kembang Tengah. Jalan yang kedua lebih banyak digunakan warga. Beberapa meter dari jalan masuk terdapat sebuah bangunan WC umum bercat putih biru di bagian dindingnya tergambar *silhouette* tunas kelapa. Jalan ini bercabang-cabang menjadi gang-gang cacing asimetris yang padat dengan rumah-rumah baik rumah permanen maupun semi permanen. Beberapa warung kecil menghiasi jalan dan gang-gang ini. Ujung jalan ini pun bercabang dua dan terdapat sebuah masjid bercat hijau pada salah satu belokan cabangnya tersebut. Sekelompok anak berusia sekitar 7 - 10 tahun dengan tekun sedang belajar mengaji di bawah bimbingan seorang ustadz muda. Rombongan anak-anak tersebut terlihat berdatangan dari Kampung Gunung Kembang Tengah dan Kaler, pada jam-jam belajar mengaji seperti sehabis Dzuhur dan Asyar.

Di satu gang beberapa orang ibu separuh baya nampak sedang duduk berkeliling disebuah bangunan bilik, dan terlihat tekun menuliskan canting-cantingnya pada helaian mori yang disangga pada dudukan kayu. Di tengah mereka kompor kecil menyala dengan wajan berisi lilin warna yang mendidih, mengepulkan asap berbau khas. Di gang yang lain nampak pula beberapa orang ibu yang melakukan kegiatan yang sama tetapi bertempat di halaman rumahnya. Pemandangan ini tidak terlihat di wilayah Kampung Gunung Kembang Tengah dan Kidul. Beberapa meter dari lokasi

ibu-ibu yang kedua ini terdapat sebuah bangunan yang nampaknya adalah sebuah pabrik rumah tangga produsen sandal kulit dan sintetis. Lima orang pemuda terlihat sibuk membuat pola, menggunting dan menjahit bahan.

Sungai Cibodas yang berarus deras membelah pesawahan di bagian utara Kampung Gunung Kembang Kaler menjadi tanda batas dengan wilayah Ciamis. Daerah utara kampung ini memiliki kondisi topografi yang lebih berbukit-bukit. Di wilayah kampung ini jarang penduduk yang memiliki kolam ikan di halaman rumahnya tidak seperti di Kampung Gunung Kembang Tengah dan Gunung Kembang Kidul.

Sumber Daya dan Stratifikasi Masyarakat

Daya dukung sumber daya alam lokal yang tersedia di wilayah Kampung Gunung Kembang, terutama lahan tidak merangkum banyak warga masyarakat lokal. Akses terhadap sumber daya alam seperti lahan produksi pertanian didominasi para pemilik modal dari luar kampung. Kondisi seperti ini sudah sangat lazim terjadi pada masyarakat pedesaan di Indonesia, berbagai kajian pembangunan pedesaan telah menengarainya. Warga masyarakat lokal yang memiliki lahan produktif hanya tercatat beberapa orang saja. Itu pun dengan pemilikan lahan yang umumnya dibawah 0,5 hektar. Proses fragmentasi lahan karena sistem waris dan penjualan lahan menjadi sebab utama kondisi rendahnya pemilikan lahan. Namun lahan masih dianggap merupakan aset produksi yang sangat bernilai. Stratifikasi berdasarkan kategori ekonomis pada masyarakat lokal masih menyertakan pemilikan lahan dalam pengakuan strata-strata yang ada, tetapi tidak berlaku ketat. Sekarang ini pemilikan lahan tidak lagi menjadi kategori pokok yang menentukan kelas sosial seseorang di masyarakat. Sistem perekonomian masyarakat lokal sudah sangat berubah, mereka

tidak lagi menjadi masyarakat pertanian tetapi menjadi masyarakat yang bertumpu pada usaha perdagangan dan kredit barang. Selain tanah ada sumber-sumber daya ekonomi di luar kampung yang memungkinkan kelangsungan penghidupan masyarakat. Sarana dan prasarana transportasi yang semakin baik menunjang peluang akses menuju sumber daya tersebut.

Namun di Kampung Gunung Kembang orang yang mampu menghimpun modal untuk melakukan usaha perdagangan dan atau kredit yang dapat mempekerjakan warga masyarakat sekitarnya, biasanya adalah orang yang berdasarkan garis keturunan memiliki kekayaan berupa tanah. Mereka ini merupakan penduduk yang memiliki kesejahteraan yang baik. Lahan menjadi modal yang cukup bertahan apabila digunakan sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan pangan subsisten, tetapi kemudian lahan menjadi sarana pula untuk memperoleh uang dengan jumlah yang besar dalam waktu singkat. Uang ini menjadi modal awal memulai usaha perdagangan. Sementara warga yang tidak memiliki kemampuan menghimpun modal awal seperti itu, lebih banyak menjadi buruh atau pekerja bagi pemilik usaha. Fenomena di tiga RW Gunung Kembang menunjukkan kondisi yang sama.

Lahan milik warga yang digunakan untuk usaha pertanian padi ataupun kebun sudah sangat berkurang. Seorang warga Kampung Gunung Kembang Tengah pemilik satu-satunya usaha penggilingan padi (*huller*) akhirnya menjual mesin dan tempat penggilingan padinya karena pengguna jasa penggilingan sudah sangat jarang. Lahan di pekarangan rumah biasanya dimanfaatkan untuk membuat kolam ikan yang hasilnya selain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga juga bisa dijual. Beberapa orang mengusahakan kolam ikan secara khusus untuk dijual.

- Pendidikan formal - penduduk lokal rata-rata hanya sampai tingkat pendidikan dasar. Adanya bangunan Sekolah Menengah Pertama Negeri di lokasi Kampung Gunung Kembang Tengah sejak sekitar tahun 1996, tampaknya belum mampu mengangkat kondisi tingkat pendidikan dari sekolah dasar ke tingkat pendidikan dasar tiga tahun berikutnya. Apalagi pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

> *"Emang abdi oge sakapeung sok jadi ngama'lum kana kayaan eta teh, atuda sepuhna sakola teu tamat sd-sd acan... Ngan manghanjakalkeun na teh... Cik atuh peupeuriheun kolotna... atuh budakna mah usahakeun sina sakola rada luhur... tapi da katingalna teh teu aya kaisin mun murangkalih nu tos rada ageung cekap umur sakola tapi masih keneh kukulunuan teu sakola, nu parutus sakola ge... sigana teh dianggap biasa wae.. Atuh ibu-ibuna oge kitu mun ngarobrol, matak pantes mun aya nu jarudi di bumina diantep oge..."*
>
> (Memang saya juga kadang-kadang harus memaklumi terhadap kondisi demikian itu, karena memang orang tua sekolahnya tidak tamat sd sekalipun... Namun yang disesalkan itu... Coba lah kalau memang terlanjur orang tuanya demikian...nah anaknya itu diupayakanlah supaya bisa sekolah agak tinggi... tapi ternyata kelihatannya tidak ada rasa malu jika anak yang agak besar- cukup umur sekolah masih saja berkeliaran belum sekolah, yang putus sekolah juga... sepertinya sudah menjadi hal lumrah... Demikian pula ibu-ibunya kalau mengobrol, makanya wajar jika ada yang berjudi di rumahnya dibiarkan). Sumber : interview ethn record.

Kondisi ini seringkali dikaitkan dengan ketidakmampuan ekonomi sebagian warga masyarakat. Hanya beberapa orang pemuda dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan baik yang mampu melanjutkan pendidikannya ke tingkat perguruan tinggi di luar kota. Sementara itu pendidikan nonformal dalam hal keagamaan tampak cukup tinggi. Kondisi ini dimungkinkan karena ada pesantren Al-Fath di Kampung

Gunung Kembang Kidul dan satu madrasah di Kampung Gunung Kembang Kaler. Menarik untuk mencermati pesantren Al-Fath, pesantren yang menginduk pada organisasi Islam NU ini menjadi tempat belajar agama Islam yang lebih diminati santri dari dari luar daerah, peminat dari ketiga kampung itu sendiri tidak terlalu banyak. Sedangkan di Kaler kegiatan agama dipusatkan di madrasah dengan mengembangkan pendidikan agama Islam melalui sejenis Taman Pendidikan Alquran (TPA) terutama bagi anak-anak. Sementara para pemudanya melakukan aktivitas keagamaan di masjid. Anak-anak yang belajar di madrasah terutama berasal dari Kampung Gunung Kembang Tengah dan Kaler.

Perekonomian Lokal dan Hubungan Kerja

Masyarakat Kampung Gunung Kembang membangun sistem perekonomian utamanya melalui usaha perdagangan dan kredit barang seperti pakaian, sandal, sepatu, dan benih ikan. Warga yang memiliki modal biasanya merintis usaha kecil dalam pembuatan komoditas yang menjadi produk dagangnya. Masyarakat memiliki kemampuan tinggi untuk melihat peluang-peluang pasar bagi barang yang dapat menjadi komoditas menarik dan menguntungkan. Perkembangan usaha kain batik tulis dan usaha jual beli pakaian jadi di daerah Kampung Gunung Kembang merupakan contoh dari kejelian tersebut, lain dengan sabak dan sisir tanduk. Usaha kain batik tulis dimulai ketika menjelang peristiwa kemerdekaan RI. Ketika itu para penjual kain batik dari daerah Pekalongan mencari kain untuk pembuatan batik hingga ke daerah Tasikmalaya yang saat itu banyak memproduksi kain putihan. Hal ini menarik minat orang di Kampung Gunung Kembang untuk belajar membuat kain batik, karena keuntungan dari kain batik lebih besar bila dibandingkan dengan hanya menjual kain putihannya. Sehingga kemudian berkembanglah usaha pembuatan batik di daerah ini (lihat ilustrasi pada halaman berikut ini).

DI balik kemampuan melihat pasar tersebut, ada kebiasaan yang disebut *"obor barangbang"* yang seringkali menimbulkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat. *Obor barangbang* adalah istilah lokal mengenai kebiasaan warga masyarakat meniru usaha yang dilakukan oleh warga yang lainnya karena dianggap menguntungkan. Proses ini terjadi meluas bila ada satu produk yang laku di pasaran. Hal ini akan menimbulkan persaingan pasar yang berdampak menjatuhkan usaha mereka sendiri. Walaupun tidak diakui secara jelas terjadi persaingan, akibatnya tetap mereka rasakan. Dampak yang paling jelas adalah ketika terjadi krisis ekonomi awal tahun 1997 lalu, mereka mengalami kejatuhan bersama. Para pengusaha dan pedagang kecil ambruk. Sementara yang masih memiliki modal terpaksa beralih pada usaha lain yang lebih kecil dan tidak terlalu besar risikonya.

> *"Waktos keuna ku krismon we pareum. Anu modalna kiat mah untungna ageung, kumargi anu aralitna kan laliren janten pesenan barang teh lalebet ka aranjeunna. Sareng da di dieu mah gening kitu, hiji ngadamel, nu sanesna teh ngariring. Janten pareum hiji teh pareum sadayana, da aralit. Ayeuna mah mung meseran anggoan tos janten ti grosir teras diical deui ka pasar-pasar, eta ge saalit. Da bade ngadamel deui modalna teu kiat, sareng deui pangaos ayeuna kan teu tangtos"*
> (Waktu terkena krismon berhenti. Yang memiliki modal kuat untungnya besar, sebab yang kecil-kecil semuanya berhenti sehingga pesanan barang masuk ke mereka. Dan lagi disini [Gunung Kembang - pen] ini begitu, satu membuat, yang lain mengikuti. Jadi berhenti satu berhenti semuanya sebab kecil-kecil. Sekarang cuma membeli pakaian jadi dari grosir kemudian dijual lagi ke pasar-pasar, itu juga cuma sedikit. Mau mulai membuat lagi modalnya tidak kuat, dan lagi harga-harga sekarang kan tidak tentu). Sumber : interview ethn record.

Ilustrasi di atas menimpa seorang perintis usaha pakaian jadi. Sebelum terjadi krisis ekonomi ia membuat sendiri pakaian yang akan dijualnya dengan mempekerjakan 15 orang penjahit dan 5 orang tenaga penjual. Setelah krisis, ia mengistirahatkan 15

mesin jahitnya, kemudian membeli pakaian jadi di daerah Bandung untuk dijual lagi di pasar-pasar lokal.

Dalam sejarah perkembangan usaha kecil dan perdagangan lokal, gejala/ kecenderungan "obor barangbang" selalu terjadi mulai dari usaha pembuatan sisir tanduk, sabak, batik tulis, dan konveksi pakaian jadi. Ilustrasi berikut memperlihatkan proses imitasi dan adopsi yang dilakukan warga masyarakat dalam konteks perkembangan usaha ekonomi lokal.

> *"Urang Gunung Kembang mah khususna di dieu sok aricalan. Icalana teh sok ngiringan anu nuju rame, istilahna teh ngobor barangbang, dimana aya anu nuju ceuyah seueur we nu narurutan. Sapertos kapungkur mah urang dieu teh sok ngarical boeh ka daerah Jawa Tengah, da terang di ditu teh boeh nuju sesah. Terang soteh di ditu peryogieun boeh sok seueur anu milarian dugi ka daerah dieu, saurna kanggo ngadamel batik. Urang dieu ngical kaditu da awis gen ditebak wae, janten ngicalna teh sok arawis, kenging meser di dieu 1000 diical 10000. Teras lami-lami urang dieu dialajar ngabatik da terang pami boeh anu tos janten batik teh awis pisan pangaosna. Tariasa na teh nya kitu, aya anu ningal di ditu waktos ngical boeh tea, teras we diajar. Aya ogen kumargi aya urang ti Jawa nya ti Wonogiri atanapi ti Solo anu ka dieu teras ngadamel batik di dieu. Waktos nuju rame batik, di dieu seueur anu janten juragan batik, nyaeta anu kiat modalna teras ngadamel pabrik batik, garaduh padamel sababaraha urang. Abdi gen kantos janten kulina (padamelna). Tangtos aya bentenna batik serat di dieu sareng batik wonogirian atanapi batik soloan. Batik wonogirian sareng batik soloan mah kualitasna langkung sae. Nya tina kaenna langkung kandel, teras nganggo mori na ogen seueur. Ari anu didamel di dieu mah asal enggal janten artos wae. Janten produksi batik na teh seueur pisan bari kualitasna mah pasaran. Rame pisan di dieu mah batik teh, dugi ka aya Koperasi Mitra Batik atuh. Ari kadieunakeun nyerat teh janten lesu kumargi lebet batik printing atanapi batik plinting tea. Batik serat teh kawon ari ku plinting mah da ngadamel na gampil kantun diceplokeun, sareng pangaosna langkung mirah. Tapi da eta gen lami-lami mah kirang pajeng da produksina seueur. Upami di dieu ayeuna masih keneh aya anu ngadamel*

batik plinting caket Pasantren Al-Fath, upami batik serat mah di Ciroyom daerah Cigeureung".

(Orang Gunung Kembang khususnya di sini <Gunung Kembang Tengah - pen> suka berjualan. Berjualannya suka mengikuti apa yang sedang ramai, istilahnya 'ngobor barangbang' di mana ada yang sedang laku dan ramai banyak yang mengikuti. Seperti dulu, orang di sini menjual kain ke daerah Jawa Tengah, tahu disana kain sedang susah. Bisa tahu di sana sedang memerlukan kain karena suka banyak yang mencari sampai ke daerah sini, katanya untuk membuat batik. Orang sini menjual kesana mahal juga dibeli, jadi suka menjual dengan harga mahal, dapat membeli di sini 1000 dijual 10000. Kemudian lama-lama orang sini belajar membuat batik sebab tahu kain yang sudah menjadi batik harganya jauh lebih mahal. Bisanya ya begitu, ada yang melihat di sana sewaktu menjual kain lalu belajar. Ada juga yang karena ada orang dari Jawa yaitu dari Wonogiri atau Solo yang datang kesini kemudian membuat batik di sini. Waktu batik sedang ramai, di sini banyak yang menjadi juragan batik, yaitu orang yang modalnya kuat lalu memdirikan pabrik batik, punya pekerja beberapa orang. Saya juga pernah jadi pekerjanya. Tentu ada perbedaan antara batik tulis di sini dengan batik wonogirian <dari wonogiri- pen> atau batik soloan <dari solo -pen>. Batik wonogirian dan batik soloan kualitasnya lebih bagus. Kainnya lebih tebal, menggunakan mori-nya juga lebih banyak. Sedangkan kalau yang dibuat orang sini asal cepat diuangkan saja. Jadi jumlah hasil produksinya banyak sementara kualitasnya pasaran <maksudnya cenderung biasa untuk jenis barang yang diproduksi besar-besaran - pen>. Di sini batik ramai sekali, sampai berdiri Koperasi Mitra Batik. Dalam perkembangan kesini membuat batik tulis semakin lesu sebab masuk batik printing atau batik plinting. Batik tulis kalah oleh batik plinting sebab membuatnya gampang tinggal dicetakkan, dan harganya lebih murah.Tapi itu juga lama-lama kurang laku sebab produksinya banyak. Kalau di sini sekarang masih ada yang membuat batik plinting dekat Pesantren Al-Fath, sedangkan yang membuat batik tulis ada di Ciroyom daerah Cigeureung). Sumber : interview ethn record.

Selain karena kebiasaan obor barangbang, kejatuhan usaha-usaha lokal tersebut sebenarnya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal perubahan dan perkembangan usaha secara makro. Usaha lokal sisir tanduk misalnya, ambruk karena serbuan produk

sisir plastik yang terjadi secara besar-besaran. Usaha sabak jatuh karena berkembangnya buku tulis yang dipergunakan secara nasional. Demikian pula dengan batik tulis lokal yang hancur karena munculnya usaha pembuatan batik cap atau disebut batik printing. Sedangkan usaha konveksi pakaian jadi, runtuh karena terjadinya krisis ekonomi secara nasional.

Sistem pertanian tidak lagi bisa menjamin kebutuhan subsisten warga yang menyandarkan mata pencaharian sebagai buruh tani. Lahan produksi pertanian sawah sudah didominasi oleh orang-orang dari luar daerah seperti dari wilayah Ciganjur Ciamis. Para pemilik lahan dari luar daerah tersebut umumnya menguasakan pengelolaannya pada orang-orang kepercayaan berikut buruh-buruhnya yang juga berasal dari daerah Ciganjur, yang letaknya sangat berdekatan dengan wilayah Gunung Kembang. Kondisi ini berpengaruh terhadap akses masyarakat lokal yang menjadi buruh tani semakin kecil pada proses produksi pertanian.

Pada jenis mata pencaharian pertanian, hanya sedikit orang-orang berumur lanjut di atas 50 tahun yang masih bertahan, sementara hampir tidak ada orang berusia di bawah 50 tahun dalam bidang ini. Para pemuda banyak juga yang menggeluti pekerjaan sebagai pedagang kredit tetapi lebih terkonsentrasi pada jasa transportasi angkutan umum yang tampaknya semakin marak atau pada industri rumah tangga pembuatan sandal.

> *"Ari barudak ngora-mah seueur nu teu baretaheun di dieu teh. Masing anu garaduh sawah sapetak-petaken oge, seseurna mah nyaba ku jalan dagang atawa ngiriditkeun naon wae barang nu aya. Majarkeun teh ngurus sawah mah ngan saukur cape ngurus jeung cape nungguan, da ari hasilna geuning ngan saukur tamba teu dahar teuing".*

(Untuk anak-anak muda, sebagian besar tidak betah di kampung. Walaupun diantara mereka ada yang memiliki sawah sepetak-dua petak sekalipun, sebagian besar melakukan merantau lewat jalan dagang atau mengkreditkan apa saja barang yang ada. Mereka berpendapat bahwa mengurus sawah itu hanya sekedar mendapatkan capek mengurus dan bosan menunggu panen, sementara hasil yang didapat hanya sekedar untuk makan). Sumber: interview ethn record.

Para buruh tani berusia lanjut ini masih bisa masuk ke dalam proses produksi pertanian kepunyaan pemilik lahan lokal ~yang hanya beberapa orang saja~ yang masih berkerabat dengannya. Kadang sebagai penggarap dengan sistem maro ataupun hanya buruh tani pada tahapan-tahapan produksinya.

Seperti juga dalam hubungan kerja di bidang usaha kecil non pertanian, hubungan kerja dalam produksi pertanian padi umumnya bersifat komersial seiring dengan proses diferensiasi masyarakat yang terjadi dengan cepat. Pertimbangan sosial walaupun masih ada tetapi hanya merupakan balutan tujuan utama yang sangat rasional ekonomis. Tetapi kondisi ini sebenarnya tidak sama sekali menghilangkan hubungan-hubungan patron-klien yang terjadi dalam hubungan kerja yang dibangun.

"Ema' mah da nitipkeun nyawa nitipkeun awak. Da anak Ema' hiji anu istri pan diurus jeung disakolakeun ku Bapa' O. Bubuhan Ema' mah jalmi teu gaduh atuh. Nya asa henteu ngaragap maneh ari naroskeun sabaraha-sabarahana ... nya ema mah sakumaha dipasihanana we. Eta ogen upami mangmoekeun pare anu nembe dibuat, Bapa' O teh sok naroskeun ... ari maneh geus nyokot pare teh acan ?... kitu cenah ... nya ari teu acan Ema' teh nembe nyandak ..."

(Ema' menitipkan nyawa menitipkan badan. Satu anak Ema' yang perempuan kan dirawat dan disekolahkan oleh Bapa' O. Karena Ema' orang tidak punya. Rasanya tidak sadar diri kalau menanyakan berapa-berapanya ... Ema' sih bagaimana diberinya saja. Itu juga kalau menjemurkan padi yang baru dipanen, Bapa' O suka menanyakan ... kalau kamu sudah ngambil padi belum ? ... begitu katanya ... ya kalau belum Ema' baru mengambil ..."). Sumber : interview ethn record.

Ilustrasi tersebut memperlihatkan suatu bentuk hubungan patron-klien dalam konstruksi kelembagaan/ institusi pertanian yang masih terdapat di masyarakat lokal. Hubungan patron-klien dalam ilustrasi di atas menunjukkan sifat tradisional yang kuat dengan hubungan kekerabatan sebagai dasarnya. Pernyataan klien (si Ema') tentang *"nitipkeun nyawa nitipkeun awak"* (menitipkan nyawa menitipkan badan) berarti 'aturan-aturan' etika subsistensi yang harus dijalaninya memiliki risiko *bargaining position*-nya menjadi sangat lemah. Penggunaan bahasa dalam komunikasi antara klien terhadap patron dan patron terhadap klien pun memperlihatkan adanya perbedaan status, walaupun dalam garis kekerabatan mereka adalah saudara sekandung.

Bentuk relasi patron-klien ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat lokal masih terdapat institusi/kelembagaan yang tidak sepenuhnya terpengaruh oleh perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat akibat hegemoni kekuasaan pemerintah pusat dengan wacana pembangunannya[21]. Sepertinya bentuk relasi ini masih bisa dipertahankan karena adanya hubungan kekerabatan fiktif yang cukup kuat di antara mereka. Hubungan kekerabatan ini menjadi sebentuk ikatan moral yang mempertahankan relasi patron-klien tersebut.

Sedangkan Ilustrasi berikut dibawah ini memperlihatkan bentuk hubungan kerja

---

[21] Salah satu perwujudan dari proses pembangunan dan modernisasi di Indonesia dipandang sebagai suatu bentuk rekayasa kebudayaan yang memasukkan secara paksa budaya industri formal ke budaya agraris tradisional yang pada gilirannya mengubah solidaritas sosial pengikat kehidupan masyarakat pedesaan yang lebih komunal beralih ke arah yang lebih individual. (Hotman M. Siahaan. 1991. *Proses Keterasingan Potensi Kerakyatan Dalam Kebudayaan Indonesia Masa Kini* dalam; Fauzie Ridjal & M. Rusli Karim. Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan. PT. Tiara Wacana. Yogya).

pertanian yang sifatnya lebih komersial, akibat komersialisasi di bidang pertanian sebagai salah satu pengaruh dari wacana pembangunan.[22]

> *"Ayeuna teh abdi ngagarap serang anu gaduhna Pak K ... nengah atanapi nu disebat maro tea, aya kinten-kinten 200 bata mah, serangna dipengkereun Kembang Asri. Tiasa maro teh kumargi ditawisan ku jalmi nu dipercanten ku Pak K eta di dieu da ari anjeun na mah henteu linggih di dieu. Pak K teh bumina mah di daerah Kecamatan Nagarasari ... di Jakarta ogen gaduheun bumi. Janten abdi mah sagala rupi urusan na teh sareng jalmi kapercantenanana. Mung ... kitu ayeuna mah maro teh rada teu kahartos, teu kahartos na ku lantaran nu gaduh serang teh teu merhatoskeun kana kedahna bagean maro masing-masing. .... Teras tos kinten-kinten dua taunan, abdi dipiwarang ngagarap kebon cabe keriting, sami ogen anu Pak K. Upami cabe mah kekenginganana sistim gajih, ... Tina piket mah upah na benten deui eta mah sasihan, sasasih na teh kirang langkung Rp 100.000. Tapi duka ayeuna mah naha bade sakitu deui kumargi pan kamari pangaos cabe teh tos ngageblos pisan lungsurna teh ....".*
>
> (Sekarang saya menggarap sawah milik Pak K ... nengah atau yang juga disebut maro, ada kira-kira 200 bata, sawahnya dibelakang Kembang Asri. Bisa maro karena ditawari oleh orang yang dipercaya Pak K disini sebab beliau sendiri tidak tinggal disini. Pak K rumahnya di daerah Kecamatan Nagarasari ... di Jakarta juga punya rumah. Jadi segala macam urusannya kepada orang kepercayaannya itu. Tapi ... maro sekarang ini kurang bisa dimengerti <maksudnya informan ialah sistemnya yang memungkinkan pemilik sawah seenaknya-pen> , tidak dimengertinya sebab pemilik sawah tidak memperhatikan keharusan perhitungan bagian maro masing-masing

---

[22] Perubahan besar struktur sosial masyarakat perdesaan di Indonesia muncul sejalan dengan pengenalan pembangunan dan modernisasi dengan indikator terjadinya perubahan mendasar dalam tata hubungan ekonomi dan sosial. Salah satunya adalah sistem produksi pertanian yang asalnya tunduk kepada sistem nilai tradisional menjadi sistem produksi yang lebih didasarkan atas pertimbangan ekonomis, rekruitmen tenaga kerja lebih didasarkan atas pertimbangan rasional tinimbang pertimbangan sosial. (Mulyadi S. 1991. *Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Transformasi Sosial* dalam; Fauzie Ridjal & M. Rusli. Karim Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan. PT. Tiara Wacana. Yogya).

... Lalu kira-kira sudah dua tahunan, saya disuruh menggarap kebun cabe keriting, milik Pak K juga. Kalau dari cabe pendapatannya sistem gaji, Dari piket upahnya beda lagi yaitu bulanan, sebulannya kurang lebih Rp 100.000. Tapi tidak tahu kalau sekarang apakah akan begitu lagi <upahnya-pen> karena kemarin harga cabe sudah jatuh sekali...). Sumber : interview ethn record.

Ilustrasi berikut, memperlihatkan bahwa bentuk hubungan kerja di luar bidang pertanian lebih merujuk pada pertimbangan rasional dibanding pertimbangan sosial. Hal ini terlihat dari pemikiran logis tentang kondisi sosial pekerja yang digunakan dalam proses produksi yang dilakukan.

"Ayeuna teh nya rada lumayan lah, istilahna mah ... turut mengurangi pengangguran..saeutikna oge... Produksi kueh teh nya kirang langkung kana opat kuintal rata-rata saminggu, malah dugi ka ke... [Informan menghitung dulu dengan kalkulator], kirang-langkung lima koma genep kuintal saminggu pami dirata-ratakeun mah.. Alhamdulillah, kanggo tiasa mroduksi sakitu teh ayeuna didieu aya dua belas padamelna... seuseurnamah urang tebih janten marondok didieu... nu opat mah tiasa keneh di dugdag anu hiji asli urang dieu... ngan hiji-hijina nu urang dieu mah... Atuda kumaha nya pamuda di dieu mah garengsian... Jaba kapungkur ogen kantos nganggo padamel ti dieu tapi kitu musingkeun... nuju dibutuhkeun pisan didieu teh der didamel ka batur majarkeun teh gajihna alit, diditu mah ageung... diantep we ku abdi teh bari jeung keuhuel ogen, eeh teu lami tidinya baralik deui hoyong didamel didieu da perusahaan nu ituna bangkrut... tah mun geus kitu pan musingkeun ari teu ditampi kumaha... ari ditampi da ngadon jadi ngarudetkeun engkena... Tos we saatos kajantenan eta mah milari padamel teh mening tinu tebih sakalian... Puguh-puguh digarawena oge da barutuheun keur ngirim meureun ka lemburna, mun bade araruih sering teuing da pan siganateh teu kahartos cacandakanana... Ari kitu mah ka abdina oge langkung raos, mun mingguan teh sok bari dipeupeujeuh ka barudak ... yeuh tong dihambur-hambur duit teh diarajar nyimpen... "
(Sekarang itu ya agak lumayan lah... Istilahnya turut mengurangi pengangguran... sedikitnya... Produksi kue itu ya kurang lebih mencapai empat kuintal rata-rata seminggu, malah sampaikan ke... sebentar... [Informan menghitung dulu dengan kalkulator -pen], kurang-lebih lima koma enam kuintal jika dirata-ratakan seminggu itu. Alhamdulillah, untuk bisa

berproduksi sebanyak itu pada saat ini ada dua belas pekerja di sini... kebanyakannya orang jauh sehingga mereka tidur disini... yang empat itu masih bisa pulang-pergi yang satu orang asli dari sini... cuma satu-satunya orang sini itu... Habis bagaimana yah pemuda disini itu pada gengsian [dalam pengertian bahasa Sunda gengsian dalam konteks kerja lebih diartikan memilih-milih pekerjaan yang berprestise dan rasa malu terhadap pekerjaan-pekerjaan sebagai kuli atau buruh -pen], Selain itu dulu juga pernah menggunakan pekerja setempat tapi begitulah memusingkan... pas lagi dibutuh-butuhkannya tenaga kerja disini malah kerja ke orang lain mereka bilang gajinya kecil, di sana itu gajinya besar... saya biarkan saja sambil kesel juga... eh nggak lama dari itu mereka pada pulang lagi ingin bekerja di sini karena perusahaan yang itunya bangkrut... kalau sudah begitu kan memusingkan nggak diterima bagaimana... diterima juga bisa mengesalkan nantinya... Sudah saja sejak kejadian itu mencari pekerja itu lebih baik dari tempat jauh sekalian... Pada sungguh-sungguh bekerjanya karena mungkin pada butuh untuk mengirim ke desanya, kalaupun mau sering pulang kan sepertinya tidak berarti bawaannya [uang yang dibawa pulang -pen], kalau begitu itu ke saya juga jadi lebih enak, kalau mingguan itu [saatnya gajian -pen] saya suka kasih pengertian pada anak-anak [pekerja -pen],... hai jangan dihambur-hamburkan cobalah belajar menyimpan uang...). Sumber : interview ethn record.

Trust atau kepercayaan ternyata turut berperan penting dalam hubungan kerja yang dibangun dalam sistem perekonomian masyarakat lokal. Contohnya adalah sistem perdagangan benih ikan dan barang, pemilik barang menggunakan sistem jual-titip pada penjualnya. Si penjual tidak memberikan kolateral atau sejenis jaminan barang apapun untuk mendapatkan barang dagangan dari pemilik barang. Pemilik barang hanya menetapkan harga standar jualnya dan seharga itulah yang akan diterima pemilik sejumlah barang yang terjual. Si penjual (istilah lokalnya 'kuli') dapat menjual barang tersebut dengan harga berapapun, kelebihannya itulah yang menjadi penghasilannya. Perbedaan blok wilayah seolah tidak menjadi variabel menghambat dalam melakukan relasi antar pelaku. Bentuk kepercayaan ini berlaku sebagai pengikat hubungan antar pelaku. Kepercayaan menjadi transformasi lain dari sistem

kekerabatan fiktif yang dijalin dalam masyarakat. Tetapi sejak konflik ideologis dan politis terjadi, *trust* yang tercipta di antara warga antar-blok mengalami perubahan. Warga tiap blok menjadi lebih mempercayai hubungan sosial ekonomi di dalam wilayahnya masing-masing. Bahkan masing-masing warga yang melakukan usaha dagang, lebih suka berhubungan dengan kuli atau penjual dari luar daerah daripada dengan warga dari blok tetangganya tersebut.

Pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari warga masyarakat lokal menjadi salah satu hal penting yang dapat tertanggulangi dengan *trust* sebagai katup penyelamat pada saat-saat kebutuhan tersebut mendesak.

> *"Di dieu mah upami bade icalan teh, kantun nyarios we kanu gaduh barangna. Nya bade icalan naon wae ogen, binih lauk, anggoan, atanapi nu sanesna. Teu kedah meser, nyandak we sabarahaeun, nu gaduhna mung nantoskeun ti anjeunna sakitueun. Umpama na lauk sapelastikna teh 2500 ti anjeunna. Engke nu anjeunna nampi harga eta dikalikeun sabaraha pelastik anu kaical, kitu. Ari ngicalna mah ka pasar tiasa sabaraha wae. Abdi gen kantos, ngical sapelastik na teh dugi ka 8500. Ari langkung na mah nya janten komisi kangge nu ngical. Abdi sareng nu sanesna di Gunung Kembang tiasa wae pami bade ngiring mangicalkeun, kantun nyarios. Panginten tos percanteneun. Angot abdi mah ka Pak M teh da masih keneh wargi. Da pami kanu tebih mah sapertos anu ti Panjalu mah, kedah meser wae".*
>
> (Disini kalau mau jualan, tinggal bilang saja sama yang punya barang. Ya mau jualan apa saja, benih ikan, pakaian, atau yang lainnya. Tidak usah membeli, mengambil saja sejumlah tertentu, pemiliknya cuma menentukan harga dari dia sejumlah itu. Misalnya harga ikan satu plastik dari dia 2500. Nanti dia tinggal menerima harga itu dikalikan dengan berapa plastik yang terjual, begitu. Kalau [penjual] menjualnya ke pasar bisa harga berapa saja. Saya juga pernah, menjual satu plastik sampai harga 8500. Kelebihannya [dari harga pemilik] itu menjadi komisi untuk penjual. Saya dan yang lainnya di Gunung Kembang bisa saja kalau akan ikut menjualkan, tinggal bilang. Mungkin sudah percaya. Apalagi saya dengan Pak M masih terhitung

saudara. Sebab kalau kepada orang jauh seperti dari Panjalu [Ciamis] harus beli). Sumber : interview ethn record.

"Nya nu karaos ku abdi, upami dina perkawis pangabutuh sadidinten mah, aya ogen warung anu sosial, nyametkeun, pan aya ogen warung anu teu masihan sametan. Atanapi nya ti sepuh, ti tatanggi caket kadang sok aya ari tuangeun-tuangeun sakadarna mah".
(Yang terasa oleh saya, kalau dalam masalah kebutuhan sehari-hari, ada warung yang sosial, memberikan utang, kan ada juga warung yang tidak memberikan utang. Atau dari orang tua, dari tetangga dekat terkadang suka ada kalau makanan-makan sekedarnya). Sumber : interview ethn record.

Dua ilustrasi diatas menunjukkan adanya keeratan relasi saling tolong-menolong sebagai institusi sosial yang berlaku dalam masyarakat lokal yang menjaga kondisi survival mereka dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Hal lain yang patut diperhatikan adalah kuatnya rasa saling percaya di antara mereka yang terlihat muncul dalam jenis-jenis penghutangan dan dalam hubungan kerja antara pemilik barang dan pengecer barang.

Hubungan Kekerabatan dalam Masyarakat

Hubungan kekerabatan masyarakat mempunyai fungsi penting sebagai institusi ekonomi yang seringkali menjadi katup penyeimbang kondisi perbedaan kesejahteraan warga. Hubungan kekerabatan ini juga menjadi salah satu modal sosial (*social capital*) bagi masyarakat. Seperti pada kasus penguasaan tanah pertanian dengan cara *maro* kepada kerabat yang memiliki tingkat kesejahteraan lebih rendah. Namun, ideologi politik dan agama yang kerap masuk ke dalam sistem kekerabatan dapat menjadi sumber konflik yang berdampak sangat besar terhadap fungsi-fungsi kekerabatan lainnya. Sepertinya tidak ada hubungan yang signifikan antara institusi ekonomi yang dibangun oleh sistem kekerabatan dan konflik yang terjadi di dalam

masyarakat. Tetapi sebenarnya ada alasan-alasan lain dibalik hubungan ekonomi. Kasus seorang tertuduh PKI misalnya, yang bekerja pada seorang tokoh masyarakat Kampung Gunung Kembang Kidul ~ yang menjadi salah satu tokoh gerakan DI ~ sepulangnya dari Pulau Buru, tampaknya terbebas dari konflik ideologis yang terjadi antara kelompok warga masyarakat. Boleh jadi alasan politis-agamis menjadi dasar pertimbangan hubungan ekonomi yang dibuat tokoh tersebut terhadap informan, dengan tujuan pengontrolan, pengawasan dan pendisiplinan yang terselubung.

> *"Uih ti P. Buru teh abdi didamel di Pak Haji F ngadamelan sabak. Nya bade kumaha deui, da harita teh abdi tos teu gaduh nanaon. Seep pisan waktos kajantenan baledogan tea. Teu nanaon da masih keneh saderek eta teh."* (Sepulang dari P. Buru, saya bekerja di Pak Haji F membuat sabak. Ya mau bagaimana lagi, saat itu saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Semua habis waktu peristiwa pelemparan itu. Tidak apa-apa beliau masih terhitung saudara). Sumber : interview ethn record.

> *"Pak E ngadamel sabak di Pak Haji F di Kidul, da didinya waktos eta teh kaetang pangageungna dina usaha sabak teh. Pak Haji F teh pan jalmi beunghar atuh. Anjeunna teh kaetang emang ka Pak X , gegedug DI anu dipaehan ku bangsana sorangan. Pak Haji F ogen tokoh masyarakat di Kidul teh. Pan anjeunna anu ngiring nunjukan saha-saha anu kalibat PKI teh."* (Pak E bekerja membuat sabak di Pak Haji F di Kidul, waktu itu disitu terhitung paling besar dalam usaha sabak. Pak Haji F itu kan orang kaya. Dia terhitung paman dari Pak X, tokoh DI yang dibunuh oleh temannya sendiri. Pak Haji F juga tokoh masyarakat di Kidul. Dia juga yang ikut menunjukkan siapa-siapa yang terlibat PKI). Sumber : interview ethn record.

Kasus tersebut tidak terlepas dari kepentingan golongan. Tokoh masyarakat dari wilayah NU dan Persis secara ideologi agama mempunyai kepentingan melakukan syiar terhadap masyarakat Tengah yang berbeda dengan mereka. Alasan kepentingan ini berdampak psikologis kuat terhadap masyarakat Tengah karena latar belakang peristiwa politis-agama yang pernah terjadi.

TIGA

IDEOLOGI DAN KELOMPOK DALAM MASYARAKAT DI KAMPUNG GUNUNG KEMBANG

Kompleksitas permasalahan sosial ekonomi dan politik masyarakat sangat terkait dengan kondisi kemajemukan di dalam masyarakat itu sendiri. Keberagaman etnis dan agama seringkali menjadi variabel utama perbincangan kritis dalam topik pluralitas masyarakat, khususnya di Indonesia. Keberagaman tersebut secara internal berperan didalam proses perkembangan masyarakat. Pengelompokan warga masyarakat berjalan seiring dengan perjalanan sejarah lokal bahkan nasional dan cenderung terjadi karena keberpihakan terhadap etnis dan atau agama mereka yang terbentuk atau membentuk ideologi[23] mereka secara individu atau kelompok. Interaksi-interaksi yang dijalin antar kelompok selalu tidak terlepas dari keberpihakan tersebut, yang berdampak pada dinamika perkembangan dan pertumbuhan masyarakat secara keseluruhan.

---

[23] Ideologi lebih merupakan suatu paham pemikiran. "Ideologi berada di antara agama dan ilmu.... Kalau ideologi berubah akan terjadi pengurangan nilai. Namun dibanding dengan agama, ideologi lebih fleksibel". "Baik agama maupun ideologi sama-sama memberikan penjelasan secara komprehensif tentang manusia dan tujuannya di dunia ini" dikutip dari Arief Budiman "Sosialisme, Kapitalisme, dan Agama" dalam Maksum. Ed. (1995*). Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad 21*. Mizan. Bandung. Kinloch (1981) seperti dikutip oleh Marvin E. Olsen, Dora G. Lodwick, and Riley E. Dunlap. *Viewing the World Ecologically*. Boulder, CO:Westview Press, 1992. Pp. 13-23, mendefinisikan ideologi sbb. : *" An ideology is an argument derived from a worldview or social paradigm that a group of people purposefully use to justify their action".*

Ideologi dan Pengelompokan Masyarakat di Kampung Gunung Kembang

Pada masyarakat Kampung Gunung Kembang, permasalahan yang berkaitan dengan ideologi keagamaan cenderung muncul lebih kuat. Persoalan etnis tidak muncul sebagai masalah yang mendasar di dalam masyarakat karena dominan beretnis sama yaitu Sunda. Sementara permasalahan ideologi keagamaan menjadi masalah 'laten' dan selalu muncul dalam interaksi antaranggota masyarakat. Di dalam perkembangan masyarakat tersebut, terjadi pengelompokan masyarakat berdasarkan keagamaan yang seolah membentuk kelompok 'etnis' tersendiri.

Pengelompokan masyarakat di Kampung Gunung Kembang berkaitan erat dengan proses perkembangan keagamaan di tingkat nasional. Pada mulanya secara administratif Kampung Gunung Kembang merupakan satu kesatuan wilayah Rukun Warga yang kemudian dibagi menjadi tiga Rukun Warga. Perpecahan wilayah yang terjadi sekitar tahun 1989 ini dilatarbelakangi oleh konflik perbedaan pemahaman dalam keagamaan, yaitu agama Islam. Perkembangan keislaman merebak dengan cepat ke daerah Kampung Gunung Kembang melalui organisasi Islam NU sekitar awal abad dua puluh[24]. NU yang beraliran tradisional dengan cepat diterima masyarakat Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler[25]. Sementara di masyarakat Kampung Gunung

---

[24] "Dasawarsa 1920 an -1930 an menurut Taufik Abdullah merupakan 'dasawarsa ideologi' dalam sejarah modern Indonesia" Seperti dikutip, Drs. Suhelmi Ahmad, MA. *Soekarno Versus Natsir : Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Darul Falah. Jakarta. 1999. Dari Taufik Abdullah. 1987. *Islam dan Masyarakat : Pantulan Sejarah Indonesia*. LP3ES. Jakarta. Perkembangan ideologi tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan keagamaan dan gerakan perjuangan.

[25] Saat itu Kampung Gunung Kembang belum terbagi menjadi tiga , tetapi secara kewilayahan mental sebutan kidul, kaler dan tengah sudah ada sejak kampung itu berdiri, sebutan tersebut cenderung lebih berkonotasi geografis.

Kembang Tengah dalam waktu yang hampir bersamaan, berkembang pula suatu pemahaman kepercayaan bersifat sinkretis yang dibawa oleh Eyang Lamsari dari daerah Jawa Tengah. Eyang Lamsari dikenal sebagai tokoh yang memiliki kesaktian supranatural dan dianggap sebagai dukun yang ampuh. Pegangan kesaktian supranaturalnya diyakini berasal dari perenungan dan pengamalan kitab-kitab kepercayaan karangan Joyoboyo[26]. Eyang Lamsari diyakini pula mempelajari ilmu-ilmu magis dan kanuragan dari banyak guru, di antaranya yang mengajarkan ajaran Ronggowarsito[27]. Kondisi alam pikiran masyarakat pada masa tersebut khususnya masyarakat pedesaan di Jawa memang umumnya masih dipenuhi oleh pemikiran-pemikiran kepercayaan terhadap roh leluhur dan mahluk-mahluk halus[28]. Kondisi tersebut mempermudah proses pengadopsian ajaran Eyang Lamsari oleh warga Kampung Gunung Kembang Tengah.

Pengaruh sinkretisme di wilayah tengah cukup kuat sehingga sulit bagi organisasi NU untuk menarik orang-orang dari wilayah ini masuk menjadi bagian dari organisasi tersebut.Praktek-praktek pengobatan dan 'kesaktian' lainnya dari Eyang Lamsari bisa langsung dirasakan sebagian besar masyarakat wilayah tengah sehingga banyak warga masyarakat yang tertarik dengan 'kesaktian' dan petuah-petuah filosofisnya. Akhirnya tejadilah proses penyebaran ajaran dan kesaktiannya kepada warga wilayah tengah yang secara informal menjadi murid-muridnya.

---

[26] Joyoboyo dalam kepercayaan Jawa dikenal sebagai seorang tokoh spiritual pada jaman kerajaan di Pulau Jawa beberapa abad lampau. Di daerah Sunda, Joyoboyo dikenal pula dengan nama Jayabaya.

[27] Dalam kepercayaan Jawa, Ronggowarsito dikenal pula sebagai tokoh spiritual yang sejajar dengan tokoh Joyoboyo.

[28] Suasana batin penduduk desa di Jawa saat itu masih dipenuhi dengan kepercayaan tradisional yang magis-religius. Lihat Wieringa, op cit.

Proses tersebut lambat-laun membentuk wilayah mental baru dalam pikiran masing-masing warga yang kemudian melekat pada pengelompokan wilayah mental mereka yang awalnya hanya dalam konteks geografis. Wilayah mental terbentuk menjadi dua yaitu (1) wilayah NU untuk warga masyarakat di bagian Kidul dan Kaler, dan (2) wilayah Tengah yang warganya sebagian besar terpengaruh kepercayaan sinkretisme. Proses perkembangan keagamaan (atau ideologi) di dua wilayah tersebut secara tidak disadari menerbitkan rasa antipati tokoh-tokoh agama Islam dari wilayah organisasi NU terhadap warga wilayah Tengah, sehingga kemudian pada masa Masyumi bentukan Jepang memunculkan istilah 'mikung'[29].

Setelah masa Masyumi dibubarkan oleh Sukarno, di Kampung Gunung Kembang terjadi perkembangan baru dengan masuknya aliran organisasi Islam Persis[30] yang berkembang di bagian kaler. Persis masuk ke wilayah ini dari daerah Kecamatan Cikeusik yang merupakan salah satu basis perkembangan Persis di wilayah Tasik. Persis yang modernis cenderung bersikap keras terhadap hal-hal yang berbau magis-religius. Kekerasan sikap keagamaan yang berkembang di Persis membawa warga masyarakat Kampung Gunung Kembang Kaler kedalam konflik ideologis dengan warga masyarakat dari dua bagian wilayah lainnya[31]. Dengan demikian di masyarakat

---

[29] Sebutan mikung yang muncul saat itu lebih mengacu pada definisi mikung no. 2. Lihat kembali definisi mikung pada Bagian Pertama tulisan ini.

[30] "Persis dibentuk tanggal 12 September 1923 oleh sekelompok Muslim yang menaruh perhatian pada kajian dan kegiatan keagamaan" Dikutip dari Drs. Ahmad Suhelmi, MA. 1999. Op cit.

[31] Dalam ideologisasi Islam, ideologi berpengertian sebagai 'seperangkat kepercayaan-kepercayaan yang terlembaga dan berfungsi mempersatukan gagasan-gagasan, tingkah laku dan karakter individu serta menuntut suatu kekuatan pengikat'. Ideologisasi semakin memperjelas identifikasi diri dan integrasi kelompok manakala terjadi pertarungan dalam struktur sosial. Lihat, Drs. Ahmad Suhelmi, MA. 1999. Ibid.

Kampung Gunung Kembang kembali terbentuk kewilayahan mental baru yang melekatkan wilayah mental berdasar geografis dengan perbedaan-perbedaan ideologis dalam sikap dan pandangan masing-masing warga berdasarkan keagamaan mereka. Dalam alam pikiran masing-masing warga masyarakat kemudian terpatri label-label yang mengidentifikasikan wilayah Kidul adalah wilayah NU, wilayah Kaler adalah Persis, dan wilayah Tengah adalah wilayah 'mikung'.

Secara ideologis Persis berawal dari perhatian terhadap reformasi Islam. Persis bahkan bersifat militan dalam membela prinsip-prinsip Islam ketika dipimpin oleh Ahmad Hassan[32] . Persis mengutip ayat Al Quran sebagai dasar ideologi Islam yaitu : "Tidaklah Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi pada-Ku"[33] dengan kesimpulan bahwa cita-cita hidup seorang Muslim adalah menjadi 'hamba Allah' untuk mencapai kejayaan dunia dan akhirat[34] . Persis mewujudkan ideologinya ke dalam gerakan pembaharuan pemurnian agama Islam, yang juga menjadi ciri gerakan pembaharu Islam modernis yang lain. Semangat pemurnian agama yaitu membersihkan ajaran Islam dari hal-hal yang bersifat bid'ah, takhayul dan khurafat yang diyakini masih terjadi pada masyarakat Islam tradisional. Ajaran Islam dalam pandangan Persis sangat rasional. Seperti juga golongan modernis lainnya, Persis menolak keterikatan dogmatis (taqlidisme) kepada satu imam mazhab.

---

[32] Pada masa sekitar tahun 1930 -an sebagai gerakan Muslim terhadap misi kristen dukungan pemerintah kolonial Belanda. Sikap mereka tegas dan tidak kompromistis. Lihat Drs. Ahmad Suhelmi, MA. 1999. Ibid.

[33] Al Quran 51 : 56

[34] Diangkat dari Drs. Ahmad Suhelmi, MA. 1999. op cit.

Berbeda dengan Persis, NU yang mengambil posisi sebagai tradisionalis menegaskan dalam anggaran dasar organisasinya bahwa mereka mengikuti satu imam mazhab (Syafi'I)[35]. NU mewakili corak Islam fenomena pedesaan yang menyerap sinkretisme yang hidup di masyarakat pedesaan. Praktek-praktek ritus tradisional seperti ritual untuk orang meninggal (tahlilan), pemujaan para wali dan ziarah ke makam-makam, dilegitimasi dalam kitab-kitab klasik yang dipelajari didalam NU. Kiai sebagai pemegang kewenangan keagamaan menempati posisi yang sangat penting dan kerap dianggap sebagai orang yang memiliki kekuatan supranatural.

Perbedaan ideologis kelompok NU dan Persis terlihat sangat mendasar. Kondisi tersebut menimbulkan konflik berkepanjangan antara kedua warga masyarakat di Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler. Konflik tersebut semakin memperkuat batas-batas perbedaan yang seolah telah membentuk kelompok-kelompok 'etnis'. Di masing-masing kelompok terjadi solidaritas internal berdasarkan ikatan-ikatan pandangan keagamaan yang masing-masing menganggap ideologi keagamaan mereka lebih baik daripada yang lainnya. Konflik muncul dalam bentuk pertentangan 'laten' didalam praktek keagamaan. Warga Persis menyerang praktek penggunaan 'bedug' di masjid-masjid warga NU, pelaksanaan tahlilan, hingga pelafalan *usshalli* (niat) dalam sholat, sebagai hal yang tidak berdasar keislaman dan karenanya termasuk dalam kategori bid'ah. Sebaliknya warga NU menyerang balik bahwa ijtihad (penafsiran berdasarkan penalaran sendiri terhadap Al Quran dan Hadits) justru sebagai cara yang bid'ah[36]. Konflik mengenai penggunaan 'bedug' yang dipicu oleh hujatan yang 'diselipkan' dalam khutbah-khutbah Jum'at sempat meletus menjadi konfrontasi fisik

---

[35] Lihat Bruinessen, 1994, op cit.

[36] Mengenai perdebatan antara organisasi NU dan golongan pembaharu, antara lain bisa merujuk Bruinessen, 1994, ibid.

terbuka di antara kedua warga. Rombongan warga NU membawa dan menabuhi beduk-beduk besar menyerang masjid warga Persis dan rumah tokoh agamanya. Akan tetapi konflik terbuka yang terjadi sekitar tahun 1987 itu tidak menimbulkan korban jiwa dan berhasil diredam oleh para petugas Koramil yang segera datang menengahinya setelah mendapat laporan warga.

Pada kenyataannya konflik antara kedua warga masih berlanjut hingga tahun 1988 terjadi kembali konflik terbuka yang diselesaikan dengan pembagian wilayah Kampung Gunung Kembang secara administratif. Konflik tersebut bermula dari pembagian daging kurban yang dikaitkan dengan antusiasme warga terhadap kegiatan pengajian keliling diantara tiga wilayah Kampung Gunung Kembang. Pengajian keliling dilakukan secara rotasi bergantian di tiga tempat tersebut. Tokoh koordinator keagamaan kampung yang berasal dari wilayah NU, tidak puas terhadap tingkat kehadiran warga Persis Dalam kegiatan pengajian tokoh tersebut menyinggung soal kehadiran ini dan mengaitkannya dengan antusiasme warga yang lebih tinggi dalam acara pembagian daging kurban. Lontaran pernyataan tersebut membuat beberapa warga Persis merasa tersinggung dan mengadukannya sebagai penghinaan kepada warga Persis lainya. Sehingga kemudian terjadi reaksi protes yang keras dan timbul tuntutan warga wilayah kaler kepada pihak pemerintahan desa untuk memisahkan diri secara administratif dari warga Kampung Gunung Kembang.

Konflik Persis-Nu ini kemudian dimanfaatkan oleh warga dari bagian tengah yang sejak semula memiliki konflik ideologis[37] terhadap warga dari kedua wilayah itu untuk

[37] Konflik yang terjadi antara warga masyarakat bagian tengah dan warga bagian kidul lebih merupakan konflik ideologi politik yang memunculkan label DI versus komunis, diperburuk dengan peristiwa pembunuhan tokoh DI yang menyeleweng.

menuntut pemisahan wilayah. Pemerintahan desa pada mulanya berupaya menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah bersama-sama tokoh-tokoh masyarakat dari masing-masing wilayah. Namun, tuntutan pemisahan diri masing-masing warga nampaknya lebih kuat sehingga akhirnya ketiga wilayah tersebut secara administratif terpisah satu sama lain. Pembagian wilayah yang disetujui dilakukan berdasarkan batas alam yang secara geografis memang sudah membagi wilayah mental kampung menjadi tiga wilayah. Pembagian wilayah ini sebenarnya tidak menyelesaikan masalah 'laten' konflik ideologis yang sudah tercipta di antara ketiga kelompok warga masyarakat tersebut karena stigma yang melekat pada masing-masing kelompok warga masih selalu muncul dalam momen-momen penting yang melibatkan interaksi sosial ekonomi antar warga, terutama momen politis dan keagamaan.

Kelompok "Mikung" dan "Jiwa Tengah"

Istilah 'mikung' muncul dalam proses perkembangan ideologi keagamaan kelompok-kelompok di dalam masyarakat di Kampung Gunung Kembang. Mikung sebagai stigma[38] sebenarnya merupakan ejekan yang dilontarkan warga masyarakat pendukung NU semasa Masyumi kepada beberapa orang warga Kampung Gunung Kembang Tengah. Pada perkembangannya sebutan itu kemudian lekat dengan komunitas warga masyarakat tersebut. Makna denotatif mikung[39] dalam istilah lokal adalah sejenis

---

[38] Pengertian stigma mengacu pada pemberian tanda pada tubuh yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tidak biasa dan buruk berkenaan dengan status moral si pemilik tanda. Lihat, E. Goffman 1979. *Stigma : Notes on the Management of Spoiled Identity*. Pelican Books. New Jersey USA.

[39] Lihat kembali definisi mikung pada Bagian Pertama tulisan ini.

anak serangga gangsir yang hidup di dalam lubang tanah dan tinggal menunggu diberi makan oleh induknya. Ilustrasi berikut ini menggambarkan munculnya istilah mikung tersebut.

> *"Istilah Mikung teh saleresna mah sebatan ti urang Gunung Kembang Kidul atanapi blok NU ka jalmi tertentu nu ti Gunung Kembang Tengah. Sebatan ieu ayana teh mangrupa ecean kusabab aya perbentenan dina masalah ngalaksanakeun ajaran Islam. Ku urang Kidul mah, urang Tengah teh dianggap tara pernah aktif dina kagiatan agama, nya diantawisna mah kedah rajin ngiring sholat berjamah di masjid, sareng kedah rajin ngiringan pangaosan. Hartos nu saleresna tina istilah mikung teh nyaeta sapertos anak kasir <binatang sejenis dengan jangkrik> anu hirup dina jero liang handapeun taneuh. Urang Kidul mah nyebat kitu teh pangna nganggap yen mikung teh teh teu gaduh jangjang jeung cicing wae di jero liang tara disada".*
>
> (Istilah Mikung sebenarnya adalah sebutan orang Gunung Kembang Kidul atau blok NU kepada orang tertentu di Gunung Kembang Tengah. Sebutan ini sebenarnya ejekan karena ada perbedaan dalam melaksanakan ajaran Islam. Orang Kidul menganggap Orang Tengah tidak pernah aktif dalam kegiatan agama Islam, <orang tengah> harus rajin mengikuti sholat berjamaah di mesjid dan harus ikut kegiatan pengajian. Arti sebenarnya mikung adalah sejenis anak gangsir <binatang sejenis jangkrik> yang hidup di dalam lubang di bawah/ dalam tanah. Orang Kidul menyebut begitu sebab menganggap <mengartikan- pen> mikung tidak punya sayap dan selalu diam di dalam lubang tanpa pernah bersuara). Sumber : interview ethn record.

Pada mulanya kata mikung menjadi ejekan terhadap perkembangan penganutan paham keagamaan tradisional warga masyarakat yang sinkretis *vis a vis* perkembangan ideologi Islam yang berlangsung pada warga kampung Kidul dan Kaler. Mikung dianggap tidak pernah melaksanakan ajaran agama Islam 'sebenarnya' seperti yang dilakukan warga Kidul dan Kaler. Ilustrasi berikut memperlihatkan pandangan orang di luar mikung terhadap orang-orang mikung.

> *" Da kadang seueur nu teu kahartosna atuh tapi da kitu buktosna...Bade ngabangun bumi diitung, bade dagang diitung, mun tea mah nincak dina poe anu tah kusabab wetonna kitu mangka dagang teh kudu ka belah kaler, malihan sigana teh mening teu janten nikah lamun itung-itungan wetonna teu ngepas...". Dugi kakayeuna ge masih keneh aya sabaraha katurunan anu keukeuh muntang kana ajaran karuhun siga kitu teh. Ari sugan abdi mah di jaman siga kieu, nu kitu teh tos moal diarulik deui."*(Terkadang banyak sekali hal yang sulit dimengerti, namun demikianlah adanya...Mau membangun rumah dihitung, mau berdagang dihitung, kalau mau dagang hari anu, dan karena weton-nya hari anu maka harus berdagang menuju Utara, bahkan sepertinya suatu pernikahan juga bisa menjadi batal jika hitung-hitungan weton-nya tidak pas. Sampai sekarangpun masih ada beberapa keturunan yang berpegang kuat terhadap ajaran leluhur seperti demikian). Sumber : interview ethn record.

Orang-orang yang diberi stigma mikung mengaku sebagai orang Islam. Mereka memandang ajaran Islam tidak hanya merupakan aturan ibadah yang bersifat transendental seperti yang tampak dilakukan oleh warga kidul dan kaler, tetapi juga aturan hubungan antarsesama manusia. Para mikung menganggap relasi dan interaksi antar manusia yang dilakukan oleh warga Kidul dan Kaler ~ yang mengaku Islam 'sebenarnya' ~ ternyata dibatasi pandangan mereka sendiri tentang Islam 'sebenarnya', sehingga membatasi kedalaman pemahaman mereka dalam membangun hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horisontal antar manusia. Kondisi tersebut dipantau para mikung dari kenyataan bahwa aktivitas ibadah transendental yang dilakukan warga muslim dari wilayah Kidul dan Kaler tidak diwujudkan dalam aktivitas kehidupan sosial mereka sehari-hari. Kenyataan tersebut membentuk citra para mikung bahwa ideologi Islam yang diwujudkan oleh warga masyarakat kidul dan kaler menjadi dangkal terbatas pada syari'at (aturan hukum) saja sehingga tidak mencapai hakikat dari ajaran Islam itu sendiri.

" Da apan Islam teh salamet, tapi lain ngan saukur nu lima waktu teu absen 'assalamu'alaikum' pas kaluar tuluy ngomongkeun batur, pelit tea ... Di dieu teh urang kudu sing waspada ngaji diri ... geus neupi ka mana urang teh nulung kanu butuh...hubungan jeung tatangga... leu teh anu saur sepuh kapungkur dicarioskeun 'Urang teh kudu bisa ngajaga wudu ulah nepi ka batal wudu anu teu bisa diwuduan deui' Batal kahampangan mah atanapi kabeuratan tiasa wudu deui tapi mun nganyerikeun hate batur...sok geura...." (Bukankah Islam itu selamat, tetapi bukan hanya sekedar yang lima waktu (solat lima waktu) tidak pernah absen 'assalamu'alaikum' ketika keluar terus membicarakan orang lain, kikir...Di sinilah kita harus selalu waspada mengkaji diri... sudah sampai mana kita menolong orang yang membutuhkan ...hubungan dengan tetangga... Inilah yang oleh orang tua jaman dahulu dipesankan 'Kita harus bisa menjaga wudlu jangan sampai batal wudlu yang tidak bisa disucikan wudlu lagi'. Batal wudlu karena buang air kecil, atau buang air besar bisa wudlu lagi tapi bagaimana dengan menyakiti hati orang lain ...coba...). Sumber : interview ethn record.

"Cik geura urang diaji bareng ... coba naon ari tugasna ulama atawa ustadz teh naon... apan ngalelempeng... nyaeta ngalelempeng umat... kumaha carana ?, diceramahan, dikhutbahan atawa ku conto?, da ari agama mah teu kudu dikeukeuweuk dibabacan, tapi sapopoena kudu bisa mawa diri ...". "Apan ku sara geu diterangkeun na Qur'an; iqro ... nyaeta maca...Maca lalampahan hirup di dunya jeung di dunya teh urang kudu tuluy maca ulah nepi ka sagawayah... Tah didieu na mah Islam sara teh sok ngadon dibaraca wungkul ngan teu dugi keun diaji..."
(Coba kita kaji bersama ... apa tugas ulama atau ustadz itu? bukankah meluruskan... yaitu meluruskan umat ... bagaimana caranya?, dengan ceramah, dengan khutbah atau lewat contoh?, sebab agama bukan untuk disimpan baik-baik (untuk kepentingan sendiri) hanya dibaca, tetapi sehari-harinya harus bisa membawa diri. Bukankah oleh sara [Islam Syari'at - pen] juga diterangkan dalam Qur'an; iqro ... yaitu baca... Bacalah perjalanan hidup di dunia dan di dunia itu kita harus terus membaca jangan sampai ceroboh ... Nah dalam masalah begini Islam sara cuma hanya dibaca saja tetapi tidak sampai ke direnungkan). Sumber : interview ethn record.

Bagi kelompok mikung, hakikat dari ajaran Islam lebih penting dan tidak terpaku pada aktivitas ibadah transendental seperti *sholat* dan pengajian. Orang yang shalat

tapi berperilaku buruk dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang tidak mengerti hakikat shalat. Hakikat shalat bukanlah gerakan tubuh dan membaca ayat-ayat Al Quran, melainkan pemahaman dan penghayatan terhadap makna gerakan tubuh dan bacaannya yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Mikung melakukan penafsiran-penafsiran filosofis yang cenderung *'kirata'*[40] dari syari'at dan istilah-istilah keagamaan Islam dalam bahasa lokal sunda seperti sholat, pengajian, bahkan tentang Tuhan dan Rasul-Nya[41] Pengaruh kepercayaan tradisional sinkretis nampak jelas dalam

---

[40] Kirata adalah kependekan dari kalimat 'dikira-kira tapi nyata' , yaitu perumpamaan terhadap suatu kondisi atau kebendaan yang mendekati kebenaran makna dari kondisi atau kebendaan tersebut (pengertian penulis tentang kirata).

[41] Misalnya kata Tuhan di daerah lokal bisa disebut dengan kata lain yaitu *Gusti, Pangeran, Allah* (tetap bahasa Arab) yang artinya berlainan tetapi menjadi satu kesatuan. *Gusti* berarti *Nu Maha Welas Asih* (Yang Maha Pengasih), *Pangeran* berarti *Nu Ngaganjar Ku Nikmat Sareng Ku Siksa* (Yang Memberi Ganjaran Nikmat dan Siksa), *Alloh* berarti *Nu Murbeng Alam* (Yang Menguasai dan Mengatur Alam). Kata Rasulullah menurut para mikung selain merupakan istilah dalam syari'at, juga mempunyai arti lain yang berasal dari kata *Rasa*. Menurut mikung, *Rasul teh rasa, rasa eta anu nepikeun pesen-pesen ka-Alloh-an ka unggal jelema* (Rasul itu rasa, rasa itulah yang menyampaikan pesan-pesan Ketuhanan kepada setiap orang, misalnya melalui panca indra manusia, dengan mendengar, melihat, rasa sakit, rasa nikmat, dll.). Penjelasan mengenai 'rasa' orang Jawa yang sama dengan mikung juga bisa dilihat pada Clifford Geert, *1992. Kebudayaan dan Agama*. Hal 61 - 62. Terjemahan dari *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. Hutchinson & CO Publisher LTD. London. Penafsiran lain, misalnya mengenai Sholat. Sholat berasal dari kata ushalli yang artinya niat atau janji. Jadi Sholat adalah janji kepada Yang Maha Pencipta bahwa manusia diciptakan oleh-Nya dan akan kembali kepada-Nya yang diwujudkan dalam gerakan sholat yang menurut para mikung diabstraksi dari empat unsur alam semesta milik Maha Pencipta, yaitu Api, Angin, Air, Tanah. Api yang selalu arah geraknya ke atas melambangkan sikap berdiri dalam sholat. Angin yang selalu bergerak ke segala arah melambangkan sikap *ruku'*. Air yang bergerak ke tempat rendah melambangkan sikap *sujud*. Sementara sikap duduk *tahiyat* dilambangkan dengan Tanah yang tidak bergerak dan tetap diam walaupun diinjak. Pada poin penggunaan unsur-unsur alam ini tampak jelas pengaruh kepercayaan sinkretisme. Unsur-unsur tersebut menjadi simbol kepasrahan diri manusia kepada Tuhan dengan menerapkan sifat-sifat unsur

hal ini. Bahkan penafsiran tersebut dilakukan dengan menciptakan *tarucing* (teka-teki) untuk memahami hakikat diri, masyarakat, alam, dan Tuhan.

Mikung memandang kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan orang Islam dalam kehidupan sosial lebih humanistik dan universal. Kewajiban-kewajiban sosial bukan hanya harus dilakukan oleh Muslim tetapi itulah tugas dan kewajiban manusia di dunia, seperti kasus merawat orang mati. Para mikung biasanya menjadi orang yang pertama datang dan sibuk mempersiapkan keperluan pemakaman hingga turun tangan menggali tanah kuburannya tanpa mau menerima imbalan berupa apa pun dengan dalih mereka tidak sedang mencari nafkah (*teu buburuh*), meskipun si mati adalah warga dari dua kampung lainnya. Biasanya setelah selesai menggali tanah kubur dan menguburkan si mati, mereka langsung pulang. Para mikung ini tidak datang berkelompok, di antara mereka terjalin pengertian bahwa semua orang mikung pastilah ada di tempat kejadian untuk melakukan kewajiban kemanusiaannya. Kewajiban kemanusiaan mikung lainnya yang mengemuka ialah kemampuannya mengobati orang sakit serta melakukan perkiraan mengenai kesembuhan bahkan kematian si sakit. Kemampuan tersebut diperoleh dari proses pengajaran keilmuan mikung yang dilakukan dengan mendalami ilmu Joyoboyo yang penuh dengan filsafat kepercayaan jawa.

Kelompok mikung dalam stratifikasi ekonomi tidak berbeda dengan warga masyarakat lain. Beberapa informan mikung ada yang termasuk dalam kategori Pra-KS menurut

---

tersebut dalam kehidupan sosialnya, selalu mengingat Yang Diatas, selalu bersikap baik antar sesama, selalu melihat kepada yang berada dibawahnya, harus selalu bersikap sabar. Sementara pengajian, hakikatnya adalah 'ngaji diri' (introspeksi) dan 'ngaji rasa' (tenggang rasa, toleransi dan solidaritas). 'Ngaji' seperti halnya 'mengkaji' atau 'membaca'.

kriteria BKKBN. Filosofi ajaran mikung yang menyatakan bahwa hidup di dunia itu hanya sementara menjadi bagian justifikasi kondisi obyektif kesejahteraan mereka.

> *"Hirup di dunya mah ngan ukur sasampayan, ulah ngudag-ngudag teuing dunya, kedah saimbang dunya aherat. Kumargi dunya mah sasampayan janten keuna ku seep, sanaos bade kumaha ge upami keuna ku seep mah seep we. Kahirupan teh ngagilinding, Kantun urang na kedah kiat jeung sabar bari tong hilap kedah usaha. Kahoyong teh kedah diperhetangkeun sareng kamampuhan. Ukuran miskin jeung beunghar mah kan saleresna ngan ukuran jalmi ari kanggo nu Kagungan Sajagad mah sanes kitu. Kumargi kitu abdi dina icalan asongan di Pom teh henteu gurung gusuh, tenang we, dugi ka rerencangan mah nyarios naha cenah ari Pa' A mah icalan teh kalahka ngobrol wae. Da rejeki mah tos diatur ku nu Kagungan. Buktosnya cekap we kangge neda sadidinten mah".* (Hidup di dunia hanya sementara, jangan terlalu mengejar keduniawian, harus seimbang dunia akhirat. Karena dunia itu hanya sementara jadi akan habis, bagaimanapun kalau saatnya habis maka akan habis. Kehidupan itu bergulir. Tinggal kita harus kuat dan sabar sambil jangan lupa harus berusaha. Keinginan itu harus diperhitungkan dengan kemampuan. Ukuran miskin dan kaya kan sebetulnya hanya ukuran manusia sedangkan untuk Yang Maha Memiliki bukan itu ukurannya. Karena itu saya saat jualan asongan di Pom tidak tergesa-gesa, tenang saja, sampai teman saya ada yang mengatakan kenapa ya Pa' A itu kalau berjualan malah selalu mengobrol saja. Rejeki itu sudah diatur oleh pemilik-Nya. Buktinya cukup untuk makan sehari-hari). Sumber : interview ethn record.

Sementara itu perjalanan politik nasional dan lokal menimbulkan kembali tumpang-tindih label stigma yang melekat pada warga masyarakat bagian tengah yang sebelumnya telah diberi stigma sebagai anti-Darul Islam. Stigma mikung melekat dengan stigma anti-DI. Bahkan dalam perkembangan berikutnya stigma bagi kelompok tengah bertambah sehubungan dengan dukungan mereka terhadap partai komunis. Stigma-stigma tersebut dalam perkembangannya menjadi label yang sangat krusial dimunculkan pihak-pihak yang berhadapan dengan mereka karena kepentingan

tertentu dalam momen-momen tertentu. Seperti pada kasus Pemilu tahun 1997 yang menghasilkan Orde Reformasi, di Kampung Gunung Kembang Tengah partai pemenang pemilu adalah PDIP sementara sisa suaranya adalah partai Islam. Kondisi ini menjadi sorotan tajam para tokoh agama Islam dari wilayah Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler. Merekamenghubung-hubungkan stigma 'PKI' yang telah menempel pada warga masyarakat wilayah tengah dengan kemenangan partai merah yang bukan partai Islam. Penggunaan stigma-stigma tersebut dalam skala sosial ekonomi dan politik tertentu menjadi bentuk pemiskinan masyarakat.

Walaupun stigma mikung beserta stigma lainnya masih melekat hingga sekarang, kenyataannya proses sosialisasi ajaran sinkretisme mikung kepada generasi muda warga masyarakat di Kampung Gunung Kembang Tengah mengalami stagnasi. Proses perubahan sosial dalam pembangunan masyarakat menyebabkan terjadinya pergeseran sikap dan ideologi generasi muda. Bentuk-bentuk pengendalian dan pendisiplinan seperti institusi pengajian yang hingga sekarang masih dilakukan secara ketat turut berpengaruh pula menghambat proses sosialisasi ajaran sinkretisme tersebut. Kondisi ini seolah membuat hubungan antara wilayah tengah dengan wilayah kidul dan kaler menjadi harmonis. Padahal stigma dan konflik yang ada tetap merebak. Walaupun jumlah orang dalam kelompok yang disebut mikung itu tidak bertambah tetapi keyakinan para mikung terhadap pemahaman keagamaannya menguat. Proses sosialisasi ajaran sinkretisme mikung harus terjadi dari bawah ke atas, dari keinginan individu untuk belajar. Proses belajar seperti itulah yang memungkinkan keyakinan yang kuat pada diri para mikung tersebut. Generasi muda Kampung Gunung Kembang Tengah sekarang lebih tertarik mengikuti gaya hidup modern perkotaan dan menganggap ajaran mikung sebagai tradisi yang sudah ketinggalan jaman. Selain

itu, pengaruh golongan agama Islam yang mencap mikung sebagai ajaran bid'ah turut menyebabkan stagnasi sosialisasi ajaran mikung .

Hal yang menarik adalah munculnya istilah 'Jiwa Tengah' yang dilontarkan oleh warga Kampung Gunung Kembang Tengah, khususnya mikung. Istilah tersebut mengandung konsep 'nasional' dan 'netral'. Konsep nasional di dalam istilah 'jiwa tengah' memiliki makna politis dalam kaitannya dengan keamanan posisi politis mereka sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat. Konsep netral di dalam istilah tersebut berkaitan erat dengan konflik ideologis yang terjadi di dalam Kampung Gunung Kembang secara keseluruhan. Jiwa Tengah ini pada kenyataannya juga berlaku bagi warga masyarakat Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler yang tidak mengambil sikap bermusuhan dengan warga masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah dalam konteks konflik ideologis dan politis yang terjadi dan menghargai perbedaan yang ada diantara mereka.

Kelompok Masyarakat dan Model Institusi Masyarakat dalam Orde Baru

Salah satu keberhasilan para perintis kemerdekaan Indonesia dalam membangun pondasi berbangsa dan bernegara adalah penciptaan pandangan hidup yang disebut Pancasila. Di dalam proses perumusannya, terjadi konflik yang sangat tajam antara berbagai golongan terutama golongan nasionalis sekuler dan agama Islam. Sikap golongan agama Islam yang menginginkan dasar negara berdasarkan Islam bertentangan dengan sikap golongan nasionalis yang memisahkan agama dan negara. Walaupun pada akhirnya golongan nasionalislah yang mendapat kesempatan lebih besar dalam memutuskannya, pertentangan tersebut sebenarnya masih berlangsung hingga sekarang. Di tingkat lokal masyarakat Kampung Gunung Kembang, pertentangan

yang terjadi di tataran nasional berpengaruh dalam sejarah perkembangannya. Munculnya gerakan Darul Islam oleh kelompok S.M. Kartosoewiryo merupakan satu peristiwa besar yang sangat berkaitan dengan kondisi pertentangan pandangan mengenai negara dan bangsa berdasarkan agama dan sekularisme tersebut. Demikian juga dengan tumbuhnya organisasi-organisasi dan partai politik beraliran komunis sebelum terjadinya peristiwa G30 S, diakomodasi oleh dasar negara Pancasila yang sekuler.

Pemerintahan Orba di setiap kesempatan selalu membuat penegasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepentingan pemerintah untuk mempertahankan status quo. Pemerintah Orba melakukan strategi pemisahan agama dan negara, yang membungkam gagasan-gagasan ke arah geraka negara Islam kembali sekaligus membabat habis pemahaman dan penyebaran komunisme. Pancasila digelar secara besar-besaran untuk "mengakomodasi" kompleksitas masyarakat Indonesia. Program pembangunan berpesan penjabaran Pancasila pada masa Orde Baru justru menjadi sarana kontrol yang sangat represif terhadap masyarakat.

Masyarakat Kampung Gunung Kembang dikontrol ketat oleh pemerintahan desa, terutama terhadap kelompok masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah yang secara umum dikenai stigma PKI. Para terdakwa organisasi dan partai komunis selama dalam proses 'pesantren' dan setelah dikembalikan ke kampungnya diharuskan mengikuti pembinaan mental spiritual P4 agar kembali ke jalan Pancasila. Sedangkan warga kampung Kidul dan Kaler yang pernah menjadi pendukung gerakan Darul Islam tidak mengalami pengontrolan yang sedemikian ketat. Bahkan ada kerabat tokoh DI dari kampung Kidul yang menjadi perpanjangan tangan kekuasaan pemerintah

lokal dengan menjabat wakil kepala keamanan tingkat desa. Tokoh masyarakat tersebut melakukan kontrol ketat terhadap penyelenggaraan aktivitas keagamaan pengajian di Kampung Gunung Kembang Tengah. Kondisi ini perlu dicermati dengan seksama. Bisa jadi terdapat banyak kepentingan dibalik penyelenggaraan aktivitas tersebut, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan organisasi NU tempat tokoh bergabung. Dendam pribadi tokoh — sebagai kerabat tokoh DI— terhadap orang-orang di wilayah Tengah bisa menjadi motif pengontrolan represif yang dilakukannya dengan menggunakan aksesnya terhadap kekuasaan pemerintah lokal. Posisinya sebagai anggota organisasi NU memungkinkannya memiliki motif syiar Islam yang juga berlatar belakang stigma DI versus anti-DI dan NU versus PKI.

> *"Muhun da di Gunung Kembang Tengah mah seueur korban, korban dendam pribadi lah kitu. Nya eta dendam pribadi kusabab aya tokoh DI tea anu ku urang Gunung Kembang Tengah dituduhkeun ngarusak masyarakat anu terus nepi keun ka dipangkekna. Dendam eta teh teu acan bergerak keneh, ngan saatosna janten Orde Baru ngawitan diangge kasempetan"* (Iya di Gunung Kembang Tengah itu banyak korban, korban dendam pribadi begitu. Yaitu dendam pribadi yang disebabkan adanya tokoh DI yang oleh orang Gunung Kembang Tengah dianggap merusak masyarakat hingga dia dibunuh. Dendam itu masih belum bergerak, setelah jadi Orde Baru mulai dipakai sebagai kesempatan). Sumber : interview ethn record.

> *"Jalmi eta ogen anu ngiring ngagebruskeun seueur jalmi, sepuh-sepuh di daerah ieu ku pitenahan yen aranjeunna teh PKI, kalebet rama abdi. Jalmi ieu teh ayeuna ngajabat janten kaamanan RW, ogen DKM Masjid di Tengah padahal anjeunna teh pan asalna mah urang Kidul nya NU keneh, da anjeunna ogen saderek keneh ka gegedug DI nu dipangkek tea. Tapi ari ceuk abdi mah eta teh ngan ukur keur nutupan kagorenganana"* (Orang itu juga yang ikut menjerumuskan banyak orang, orang-orang tua di daerah ini oleh fitnahan bahwa mereka itu PKI, termasuk ayah saya. Orang itu sekarang menjabat sebagai keamanan RW, juga DKM Masjid di [daerah] Tengah padahal orang itu berasal dari Kidul ya NU, dia juga masih saudara

dengan tokoh DI yang digorok itu. Tapi menurut saya sih itu Cuma untuk menutupi kejelekannya saja). Sumber : interview ethn record.

Sementara itu pemerintah juga membangun pondasi kekuasaannya untuk mengontrol masyarakat melalui penggunaan institusi-institusi lokal masyarakat. Institusi-institusi sosial ekonomi seperti gotong-royong dan musyawarah didorong bahkan diciptakan untuk difungsikan kembali dengan dalih merupakan sifat khas masyarakat Indonesia. Di tingkat masyarakat lokal seperti di Kampung Gunung Kembang, gotong-royong dan musyawarah tidak lagi disosialisasikan melainkan diinstruksikan oleh Kepala Desa Sukaati kepada para Ketua RW. Para Ketua RW menginstruksikannya langsung kepada masyarakat melalui pengeras suara masjid ketika pengajian atau sholat jumat. Selain itu RW menginstruksikan juga kepada pengurus RT dan ketua RT bersama petugas Hansip mengumumkannya kepada masyarakat dengan cara yang sama atau mendatangi rumah warga satu per satu.

Gotong-royong dan musyawarah menjadi salah satu alat mobilisasi pemerintah menghimpun massa pendukung bagi kepentingan penguasa. *Rereongan sarumpi* (saratus rupia per umpi) adalah salah satu contohnya. Program ini merupakan upaya menghimpun dana bantuan dari masyarakat untuk membantu rumah tangga-rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer (misalnya pangan) dan sekunder (misalnya kesehatan dan pendidikan anak). Program tersebut digarisbawahi sebagai bentuk gotong-royong masyarakat walaupun pada akhirnya tidak lebih dari pungutan-pungutan yang tidak jelas fungsi dan pemanfaatannya sehingga tidak efektif.

Di ketiga wilayah kampung di Gunung Kembang cenderung terbentuk institusi sosial ekonomi masing-masing. Misalnya kelompok pengajian sebagai institusi keagamaan

di wilayah kampung bagian Kidul dan Kaler yang lebih tertutup berkembang lebih baik dan stabil ketimbang kelompok pengajian di wilayah kampung bagian Tengah yang lebih terbuka tetapi mengalami penurunan dari sisi keikutsertaan warga didalamnya. Kelompok pengajian di wilayah Tengah cenderung lebih terbuka karena seringkali kiai atau ustadz yang memberikan ceramah pengajian berasal dari kampung lain. Penurunan partisipasi warga masyarakat dalam kelompok pengajian menjadi salah satu efek dari terjadinya proses perkembangan masyarakat dalam kerangka modernisasi (pembangunan). Sementara institusi ekonomi di tiga kelompok warga berkembang lebih terbuka bagi semua warga karena bermainnya *trust* (kepercayaan) dan sistem kekerabatan untuk menjalin relasi ekonomi di antara mereka.

EMPAT

PENGARUH PERUBAHAN SISTEM PEMERINTAHAN DARI ORDE LAMA KE ORDE BARU TERHADAP MASYARAKAT GUNUNG KEMBANG

Kondisi eksisting masyarakat dipengaruhi oleh peristiwa sejarah lokal yang dialaminya. Peristiwa masa lalu seringkali muncul atau dimunculkan kembali dalam momen tertentu atau bahkan selalu membayangi setiap individu dalam melakukan aktivitasnya di masyarakat. Terutama apabila peristiwa masa lalu tersebut dianggap sebagai peristiwa buruk nasional seperti G30S PKI yang berpengaruh terhadap masyarakat lokal.

Sepintas Sejarah Gerakan Sosial Politik di Jawa antara 1920 - 1965

Partai politik dan organisasi kebangsaan sebenarnya sudah tumbuh sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dan merupakan gerakan sosial terhadap represi pemerintahan saat itu. Golongan nasionalisme, pembaru Islam, sosialisme dan emansipasi perempuan[42] berkembang dalam pergerakan tersebut. Dalam perkembangannya timbul konflik yang semakin menajam antara beberapa golongan, misalnya Sarekat Islam (SI) yang pecah menjadi kelompok SI 'merah' dan SI 'putih'.

---

[42] Saskia Eleonora Wieringa. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Garba Budaya. Jakarta.

Perpecahan terjadi akibat masuknya ideologi tokoh cikal bakal partai komunis yang kemudian bertentangan keras dengan kaum konservatif dalam organisasi. SI putih yang mendukung gerakan Pan-Islam menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) sementara SI merah menjadi Sarekat Rakyat yang merupakan organisasi massa PKI[43]. PKI kemudian melakukan pemberontakan tahun 1926 di Banten dan di Minangkabau tahun 1927[44], tetapi dapat diredam pemerintah . Momen ini menjadi penting bagi kaum nasionalis sekuler memperkuat diri. PNI dibawah Sukarno berdiri, diikuti dengan partai-partai lainnya. Sekularitas yang dibangun kaum nasionalis membuat jurang yang lebar dengan golongan muslim, sehingga pada golongan muslim timbul ide negara Islam yang kemudian dipupuk dalam Masyumi yang dibentuk pada jaman penjajahan Jepang.

Pemerintahan Jepang melakukan depolitisasi terhadap semua partai politik dan membentuk Masyumi[45] yang menjadi satu-satunya partai politik yang diperbolehkan hidup. Pemerintahan Jepang berupaya memobilisasi rakyat Indonesia melalui pembentukan organisasi-organisasi massa seperti Gerakan Tiga A (Pemimpin Asia, Pelindung Asia, Cahaya Asia), kemudian Pusat Tenaga Rakyat (Putera), dan Hokokai. Bagi kepentingan perangnya, para pemuda dididik kemiliteran dalam *Seinendan* (Barisan Pemuda) dan *Keibodan* (Pertahanan Sipil) kemudian menjadi balatentara

---

[43] Sarekat Rakyat berhasil menarik banyak pengikut yang kemudian mendukung upaya pemberontakan tersebut. Lihat Frans Husken. 1998. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 - 1980*. PT Grasindo. Jakarta. p145.

[44] Wieringa, op cit.

[45] Kepengurusan Masyumi diambil dari kalangan Muhammadiyah dan NU di desa, lihat Wieringa. Op.cit. Juga dalam Martin van Bruinessen. 1994. *NU : Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru.* LKIS. Yogyakarta.

Jepang dalam Heiho dan Pembela Tanah Air (Peta). Momen tersebut dimanfaatkan oleh S. M. Kartosoewiryo[45] ~ yang saat itu memimpin Komite Pembela Kebenaran (KPK) mengorganisir sebuah lembaga pendidikan Islam bernama Suffah Institute[47] di daerah Malangbong Garut~ untuk memberikan latihan kemiliteran pada para pemuda Masyumi yang dikenal dengan nama Hizbullah. Unit militer inilah yang kemudian berperan dalam upayanya menggalang gerakan Darul Islam.

Kekalahan Jepang dalam perang melawan Sekutu menciptakan kondisi vakum kekuasaan sebelum pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh S.M. Kartosoewiryo dan para pendukungnya untuk memproklamasikan negara Darul Islam yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1945[48]. Namun, kemudian terjadi kompromi dengan kaum nasionalis yang berjanji mengakomodasi syariat Islam, sehingga kemudian berpihak pada kemerdekaan Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

---

[45] Sekar Maridjan Kartosoewiryo adalah tokoh utama gerakan Darul Islam di Jawa Barat. Ia berpendidikan eropa dan pernah menjadi siswa Netherland Indies Medical School, sebelum akhirnya dikeluarkan dan bergabung dengan PSII dan menjadi sekretaris pribadi HOS Cokroaminoto, kemudian Sekjen dan sebagai Wakil Ketua PSII. Setelah dikeluarkan dari PSII, ia mendirikan KPK. Lihat dalam Karl D. Jackson. 1980. *Traditional Authority, Islam and Rebellion : A Study of Indonesian Political Behavior*. University of California Press. Berkeley, Los Angeles, London. Bahkan menurut Chaidar, ide negara Islam telah dicita-citakannya bersama dengan HOS Cokroaminoto. Lihat Al Chaidar. 2000. *Sepak Terjang KW 9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo*. Madani Press. Jakarta

[47] Suffah Institute adalah sebuah lembaga pendidikan Islam yang namanya diambil dari lembaga serupa pada jaman Nabi Muhammad. Lembaga ini mendidik para muridnya selama 4 - 6 bulan dengan tujuan utamanya meningkatkan semangat Islam, lihat Karl D. Jackson 1980. Ibid.

[48] Lihat Karl D. Jackson 1980. Ibid., dan Al Chaidar. 2000. op cit.

Memasuki masa setelah kemerdekaan, pertumbuhan partai terjadi kembali. PKI kembali hidup tahun 1945, PNI bangkit tahun 1946. Muncul pula partai PSI pimpinan Syahrir dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) pimpinan Amir Sjarifuddin. Pada bulan November 1945, Masyumi di-reorganisasi[49]. Saat itu S.M. Kartosoewiryo merupakan salah seorang anggota eksekutif dari Masyumi[50] dan menjadi penanggung jawab wilayah Jawa Barat. Ketika pemerintah melakukan negosiasi dengan Belanda yang menghasilkan Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947[51], Kartosoewiryo melihatnya sebagai pengkhianatan terhadap kesepakatan antara golongan Muslim (dirinya) dan golongan nasionalis. Oleh karena itu, ia melakukan gerakan perlawanan secara gerilya terhadap pemerintah (RI) dan Belanda[52]. Sementara itu pasukan sekutu dan Belanda berhasil menduduki kota-kota penting di Jawa melalui Perjanjian Renville tahun 1948 sehingga pemerintahan Republik sempat berpindah ke Yogyakarta, demikian pula dengan pasukan TNI yang harus hijrah ke sana. Pada saat itu, Kartosoewiryo bersama pasukannya bermarkas di Gunung Cupu yang terletak di daerah Ciamis berbatasan dengan Tasikmalaya. Mereka membentuk Tentara Islam Indonesia (TII) dan organisasi pemuda Pahlawan Darul Islam (PADI). Perjanjian Renville

---

49 Dilakukan dalam Kongres umat Islam di Yogyakarta tanggal 7 November 1945 didukung oleh seluruh umat Islam dari golongan tradisional dan modernis sebagai satu-satunya institusi politik umat Islam, sekaligus tidak mengakui lagi Masyumi buatan Jepang. Al Chaidar. op cit. Hal 46.

50 Pada golongan Muslim terjadi dua aliran, yang memilih jalur kooperatif dan nonkooperatif (hijrah). Ini yang membedakan secara mendasar Masyumi dengan Darul Islam, bahwa Masyumi menyetujui rumusan Pancasila, berbicara tentang masyarakat islami tetapi bukan negara Islam sebagaimana Darul Islam. Lihat Al Chaidar. 2000. op cit.

51 Belanda kenyataannya melanggar perjanjian dengan melakukan tindakan Agresi Militer yang pertama.

52 Kartosoewiryo keluar dari Masyumi secara de facto ketika Darul Islam-nya berkembang menjadi sebuah pemerintahan tandingan, seperti yang dikutip Bruinessen dari Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945 - 1965*. Grafiti. Jakarta. Terjemahan.

dan Agresi Militer Belanda yang kedua mengakibatkan terjadinya kekosongan kekuasaan kembali, yang kemudian dimanfaatkan Kartosoewiryo untuk memproklamasikan kembali berdirinya Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia (NKA-NII) pada tanggal 7 Agustus 1949 di daerah Kabupaten Tasikmalaya[53]. Bentrokan antara TNI (Divisi Siliwangi) dengan TII tidak bisa dihindarkan lagi, karena kedatangan kembali pasukan TNI ke Jawa Barat dianggap mengancam kekuasaan NII atas wilayah mereka. Bentrokan ini berakhir dengan tertangkapnya S.M. Kartosoewiryo pada tahun 1962.

Sementara itu situasi politik ikut diramaikan oleh PKI yang melakukan aksi massa militan pada tahun 1948 di Madiun dibawah pimpinan Musso. Berbagai aksi yang dilakukan menimbulkan ketegangan dengan angkatan perang dan golongan santri anggota Masyumi. Pemberontakan di Madiun dapat diakhiri setelah terjadi penyerbuan dan perebutan kekuasaan dari PKI[54]. Namun, pada tahun 1950 PKI kembali pulih di bawah pimpinan Aidit dan dengan cepat meraih posisi penting. Dengan politik berbasis massa, PKI mampu menggalang kekuatan massa yang luas terutama di daerah pedesaan Jawa, antara lain melalui organisasi Barisan Tani Indonesia (BTI) yang meluncurkan isu-isu *land reform*. PKI mempolitisasi karakter masyarakat pedesaan Jawa yang terbelah secara vertikal[55] misalnya dengan mengedepankan polarisasi kelas tuan tanah dan penggarap. Kenyataannya kekuatan PKI semakin membesar terlihat dari hasil Pemilu 1955, walaupun isu religius/agama saat itu berkembang

---

[53] Al Chaidar. 2000. op cit.

[54] PKI dalam aksinya tersebut digambarkan telah membunuhi banyak tokoh Masyumi dan PNI. Lihat dalam, Wieringa, op cit.

[55] Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani. Bentang*. Yogyakarta. Lihat juga, Wieringa, op cit.

seperti kasus di Pasuruan saat Masyumi menyerang PKI sebagai atheis, kelompok tertentu dalam NU menyerang PKI sebagai organisasi anti-Islam[56].

Di dalam perkembangan selanjutnya, Sukarno merangkul PKI sebagai sekutu politik yang efisien dalam menggalang massa. Ideologi Marhaenisme dan Nasakom (Nasionalisme, Agama dan Komunisme) yang digelar Sukarno dalam upayanya menuju persatuan nasional seolah mengakomodasi kepentingan politik PKI, terbukti dalam masa Demokrasi Terpimpin-nya Sukarno PKI menjadi aktor politik penting ketiga setelah presiden dan ABRI. PKI mendapat kesempatan untuk membersihkan noda peristiwa Madiun antara lain dengan pernyataan bahwa mereka menyerang Masyumi bukan karena menentang agama melainkan karena anti-nasional yang bersarang di tengah Masyumi[57] akibat imperialisme Amerika.

Organisasi-organisasi massa yang erat hubungannya dengan PKI seperti Pemuda Rakyat, SOBSI, BTI dan Gerwani memperbesar peluang PKI untuk menambah kekuatannya. PKI menciptakan relasi 'kerukunan keluarga' antara dirinya dan ormasnya. Pembagian peranan diatur sedemikian rupa sehingga terbentuk kerja sama antar ormas yang kuat dalam setiap aksi mereka. Kondisi ini tampak dalam kasus *land reform* radikal, bila terjadi perselisihan dengan tuan tanah pasti melibatkan seluruh aktivis ormas tersebut. Aksi-aksi yang dilancarkan PKI beserta ormasnya menimbulkan perlawanan golongan Muslim karena seperti pada tahun 1964 di Jawa Timur golongan yang memiliki tanah luas adalah para ulama NU[58].

---

56 Robert W. Hefner. 1990. *The Political Economy of Mountain Java an Interpretive History*. University of California Press. California.

57 Wieringa, op cit.

Berbagai intrik yang terjadi dalam struktur politik kemudian membawa Indonesia pada peristiwa Gerakan 30 September yang bersejarah[59]. PKI sebagai tertuduh benar-benar dihancurkan. Soeharto muncul sebagai pimpinan Angkatan Darat yang memulihkan keamanan dan ketertiban. 'Serah terima' Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) tahun 1966 menandai pergantian kekuasaan politik sekaligus pembersihan Indonesia dari PKI dan ormas-ormasnya. Kemudian dimulailah babak Orba sistem politik Indonesia beserta segala bentuk wacana kekuasaannya.

Sejarah Gerakan dan Perkembangan Sosial Politik pada Masyarakat Kampung Gunung Kembang

Dinamika struktur politik Indonesia secara nasional sangat berpengaruh terhadap sistem kehidupan masyarakat di pedesaan, seperti juga terjadi di Kampung Gunung Kembang. Isu Kampung Gunung Kembang sebagai basis PKI dan pertentangannya dengan Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler sebagai tempat berkembangnya gerakan Darul Islam cukup mengemuka dalam kaitannya dengan kondisi politik tersebut.

Masyarakat Kampung Gunung Kembang mulai tergiring ke dalam pergolakan politik nasional ketika terbentuknya Masyumi pada saat pendudukan Jepang. Masyumi yang menjadi satu-satunya organisasi politik yang diijinkan hidup saat itu memasuki Kampung Gunung Kembang melalui organisasi NU. Organisasi NU di Kampung Gunung Kembang sebenarnya tidak terwujud seara fisik, tetapi berupa pengakuan warga Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler bahwa mereka menginduk pada NU dalam

[59] Berbagai interpretasi tentang kejadian 'sebenarnya' lihat dalam Wieringa, opcit.

aktivitas keagamaannya. Sementara di Kampung Gunung Kembang Tengah organisasi tersebut tidak bisa berkembang karena berkembangnya kepercayaan mikung. Organisasi NU merupakan organisasi agama Islam yang mengambil posisi tradisionalis yang berpegang teguh pada satu mazhab fiqih ortodoks[60] Dalam perkembangannya NU mampu menarik massa pengikut yang luas melalui berbagai kegiatan pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya. NU mengembangkan sikap apolitik dan bermain dalam peningkatan pendidikan melalui pendirian pesantren dan madrasah. Sikap ini berperan besar terhadap pesatnya jumlah pendukung. Tampaknya pengembangan sikap demikian berpengaruh terhadap perluasan pendukung di Kampung Gunung Kembang.

Setelah masa kemerdekaan, terjadi pertumbuhan partai yang marak di Kampung Gunung Kembang. Pelatihan kelompok pertempuran Hizbullah sekitar tahun 1945 yang dilancarkan oleh Masyumi[61] banyak menarik pendukung dari Kampung Gunung Kembang. Hal ini bisa dimengerti karena pusat pelatihan Hizbullah yang berada di daerah Malangbong yang menjadi perbatasan antara Garut dan Tasikmalaya dan Kampung Gunung Kembang termasuk dalam daerah perluasan pendukungnya. Akan tetapi tidak diperoleh data yang cukup mengenai proses perekrutan keanggotaan Hizbullah dan mekanisme pergerakan yang dibangun di tingkat lokal. Demikian juga saat terjadinya proklamasi Negara Darul Islam yang pertama kali.

---

60 Mazhab fiqih Syafi'i. Posisi tradisionalis diambil NU juga sebagai salah satu reaksi terhadap kelompok muslim pembaru. Lihat Bruinessen, op cit.

61 Saat Hizbullah dibentuk tahun 1945, NU masih tergabung dalam Masyumi (hasil re-organisasi).

Masyumi di bawah Kartosoewiryo melakukan aksi menentang Perjanjian Linggarjati tahun 1947 dan mengkonsentrasikan kekuatan di Gunung Cupu untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan mengerahkan pasukan Hizbullah di daerah Garut dan Tasikmalaya. Masyarakat Kampung Gunung Kembang mendukung aksi perlawanan tersebut, demikian juga dengan TNI. Sebuah Monumen peringatan perjuangan rakyat ~ masyarakat Kampung Gunung Kembang ~ dan TNI[62], yang didirikan oleh Kodam Siliwangi hingga sekarang dapat dilihat di Taman Wisata Kembang Asri, sebagai tanda bahwa di Kampung Gunung Kembang, tepatnya di daerah perbatasan Tasikmalaya - Ciamis pernah terjadi pertempuran antara rakyat bersama TNI melawan Belanda.

Aksi Kartosoewiryo semakin menguat setelah Belanda menguasai kembali daerah-daerah koloninya akibat Perjanjian Renville. Perlawanan dilakukannya secara gerilya, untuk kemudian mendeklarasikan Negara Islam Indonesia tahun 1949. Ketika TNI kembali ke daerah Tasikmalaya, dan masuk ke Kampung Gunung Kembang, terjadi bentrokan dengan pasukan DI-TII yang berlanjut bahkan setelah Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik pada bulan Desember 1949. Pasukan DI-TII selalu melakukan teror kepada TNI-pemerintah dan masyarakat. Secara diam-diam warga Kampung Gunung Kembang membantu gerakan DI antara lain dalam kebutuhan makanan dan pakaian. Bantuan diberikan oleh masyarakat karena ada yang takut akan ancaman dan teror pembunuhan serta perampokan, yang banyak terjadi di daerah itu. Sebagian lagi membantu karena ada anggota keluarganya yang turut dalam gerakan DI tersebut. Situasi daerah Kampung Gunung Kembang sangat genting dan menegangkan. Kehidupan masyarakat seolah hanya berlangsung pada siang hari

[62] Tidak tertera sedikitpun kata tentang keberadaan Hizbullah dalam monumen tersebut.

yang terang, menjelang malam hampir semua warga mengungsi ke kota Tasikmalaya yang lebih aman karena terjaga TNI. Menurut informan, pembunuhan dan perampokan dilakukan oleh kelompok tertentu didalam tubuh DI ~ PADI ~ yang dipimpin seorang tokoh DI dari Kampung Gunung Kembang Kidul. Tokoh DI ini memanipulasi instruksi pimpinan DI pusat untuk kepentingannya sendiri. Bahkan ia diduga melakukan pembunuhan dengan tangannya sendiri terhadap beberapa orang warga yang mempunyai perselisihan pribadi dengannya. Tidak ada orang yang berani menentangnya karena posisinya di DI dan karena isu 'kesaktian' yang dimilikinya. Namun, akibat pengaduan warga yang merasa gerakan DI tidak sesuai lagi dengan tujuan gerakan yang islami kepada pimpinan pusat DI, maka tokoh tersebut kemudian dibunuh oleh orang-orang DI sendiri. Tokoh tersebut dibunuh dengan keji, lehernya[63] dipotong dan mayat dibuang terpisah, bagian kepalanya dibuang ke Sungai Cibodas dengan alasan apabila potongan badan dan kepala dikubur bersatu akan membuatnya hidup kembali. Peristiwa pembunuhan tokoh DI tersebut menimbulkan kebencian dari pihak keluarga korban terhadap beberapa orang warga Kampung Gunung Kembang Tengah yang mereka sangka sebagai pelaku pembunuhan tersebut.

Perkembangan yang menarik di Kampung Gunung Kembang adalah terjadinya perpindahan keanggotaan organisasi dan partai yang cukup besar pada akhir tahun 1948. Kondisi ini terjadi ketika muncul ketidakpercayaan anggota gerakan Darul Islam terhadap tujuan gerakan, akibat tindakan-tindakan kelompok tertentu gerakan DI[64] ~ dalam hal ini PADI[65] dan Hizbullah ~ yang dianggap menyelewengkan tujuan

[63] Pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok DI yang dipimpin tokoh terbunuh tersebut juga melakukan cara yang sama yaitu pangkek (potong leher), tetapi tidak berkaitan dengan kepercayaan tentang 'kesaktian' seperti yang terjadi pada tokoh terbunuh.

[64] Tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh tokoh DI yang kemudian dibunuh.

[65] Menurut Jackson, op cit. PADI muncul tahun 1948 sebagai pasukan elit dari TII Islam (Tentara Islam Indonesia) bentukan Masyumi dibawah komando Kartosoewiryo.

demi kepentingan pribadi. Selain itu tindakan antipati yang ditunjukkan oleh kelompok tersebut terhadap para anggota TNI yang pulang hijrah[66] mempengaruhi sebagian pendukung gerakan yang merasa tidak adanya sikap persatuan yang seharusnya dituju oleh gerakan. Maka banyak pendukung gerakan PADI dan Hizbullah pindah haluan bergabung dengan organisasi sosialis dan komunis yang mulai masuk ke Kampung Gunung Kembang sekitar tahun 1952. Bahkan ada pula anggota TNI yang menjadi anggota PADI, berbalik arah kembali dan bergabung dengan Organisasi Keamanan Desa[67] (OKD) dan partai seperti Pemuda Rakyat.

Kampung Gunung Kembang Tengah yang tidak menginduk pada organisasi NU lebih menerima kehadiran banyak organisasi massa sosialis dan komunis yang bermunculan kembali pada tahun 1945-1946. Organisasi massa sosialis dan komunis dianggap mampu mengakomodasi kepercayaan mikung yang berkembang di dalam masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah. Pesindo yang kemudian menjadi Pemuda Rakyat, BTI, SOBSI, dan Gerwani, yang menginduk pada PKI mulai masuk ke wilayah Kampung Gunung Kembang sekitar tahun 1952. Sementara gerakan Darul Islam tetap dibangun oleh S.M Kartosoewiryo. Pada masa ini di Kampung Gunung Kembang mulai terjadi konflik antar warga pendukung gerakan Darul Islam yang tetap mengusung ide Negara Islam di wilayah Kidul dan Kaler dengan warga pendukung organisasi sosialis dan komunis di wilayah Tengah. Konflik muncul dalam bentuk pengkotak-kotakan warga secara sinis. Muncul istilah DI versus anti-DI atau Komunis versus anti-Komunis yang cenderung merupakan stigma antar warga. Kebencian yang ditimbulkan oleh peristiwa pembunuhan tokoh DI terakomodasi dalam konflik tersebut. Padahal di dalam Kampung

---

66 Peristiwa penarikan pasukan TNI karena momen pengungsian pemerintahan Republik ke Yogyakarta.

67 OKD merupakan sebuah institusi keamanan pemerintahan yang dibentuk di tingkat desa, mirip dengan Hansip sekarang, hanya saja OKD saat itu dipersenjatai.

Gunung Kembang terdapat hubungan antar warga yang saling terkait silsilah kekerabatan bahkan sebenarnya pihak keluarga tokoh DI yang terbunuh dengan warga yang dituduh sebagai pelaku pembunuhan terhitung dekat dalam silsilah. Namun konflik-konflik yang ada mengakibatkan renggangnya hubungan persaudaraan.

S.M. Kartosoewiryo beserta seluruh pasukannya pada tanggal 4 Juni 1962 berhasil ditangkap melalui strategi 'pagar betis' setelah beberapa lama mengepung Gunung Cupu yang dijalankan TNI. Sebenarnya sebelum menyerah secara keseluruhan, banyak anggota pasukan yang tidak bisa bertahan hidup di gunung sehingga secara diam-diam turun ke kampung, tetapi ada juga yang langsung lari ke kota. Masyarakat biasanya menerima kembali yang datang ke kampung karena bagaimanapun mereka masih berkerabat dan berharap bisa berubah, tetapi bagi mereka yang lari ke kota biasanya ditangkap dan disiksa sebelum dikembalikan ke kampung.

Organisasi komunis berkembang di Kampung Gunung Kembang Tengah dengan damai. Aktivitas organsisasi dilakukan melalui pengembangan kesenian. Para pemudi dirangkul dalam kegiatan seni tari yang digelar oleh Gerwani. Para pemuda diajak ikut serta dalam barisan drumband yang dipertunjukkan Pemuda Rakyat. Organisasi-organisasi ini, terutama Pemuda Rakyat secara rutin melakukan sosialisasi pemahaman komunisme kepada masyarakat antara lain melalui pertemuan-pertemuan yang dikemas menjadi semacam rapat warga biasa atau kelompok belajar. Sosialisasi pemikiran Marxisme ini dilakukan oleh seorang tokoh masyarakat yang mempunyai hubungan dengan partai komunis PKI di tingkat nasional. Tokoh ini berasal dari daerah Jawa Tengah, pernah tinggal lama di Bandung dan bekerja pada perusahaan milik Belanda sebelum kemudian menetap di Kampung Gunung Kembang. Walaupun ia tinggal di daerah Gunung Kembang Kidul tetapi ia lebih banyak berinteraksi dengan

warga Kampung Gunung Kembang Tengah. Kemungkinan karena ia mendapatkan istri keturunan orang asli Kampung Gunung Kembang Tengah. Pendekatan melalui kesenian dan pertemuan-pertemuan ini cukup efektif bagi PKI untuk mengumpulkan massanya. Hasil Pemilu di tingkat nasional dan di tingkat lokal desa menempatkan PKI pada posisi ketiga partai dengan perolehan suara terbanyak setelah Masyumi dan NU[68].

Masyarakat Kampung Gunung Kembang, Kelompok Mikung, dan Tragedi 1965

Organisasi massa komunis Pemuda Rakyat dan Gerwani berkembang cukup rapi dan cepat terutama dengan ideologi Nasakom-nya Sukarno yang memberi keleluasaan tumbuh bagi PKI dan ormasnya. Sementara massa NU di Kampung Gunung Kembang semakin bertambah luas setelah Masyumi dibubarkan oleh Sukarno[69] pada tahun 1960. Para pendukung Masyumi ~ yang merupakan massa pendukung gerakan Darul Islam ~ banyak yang 'kembali' ke NU karena umumnya mereka pendukung NU.

Peristiwa kup Gerakan 30 September tahun 1965 yang dituduhkan kepada PKI sebagai biang keladinya, berdampak sangat besar terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat Gunung Kembang Tengah terutama kelompok Mikung. Dampak ikutan dari pembasmian partai komunis dan ormas-ormasnya merembet ke seluruh pelosok. Rumah-rumah warga kelompok Mikung yang dituduh sebagai pendukung ormas PKI segera dihancurkan oleh sekelompok orang tak dikenal yang menyebut dirinya gerakan

---

[68] NU yang memisahkan diri dari Masyumi pada tanggal 8 April 1952. Lihat, Bruinessen. 1987. op cit.

[69] Lihat Bruinessen. 1987. op cit.

anti-PKI dan komunisme. Peristiwa yang terjadi beberapa bulan setelah peristiwa G30S nasional, yaitu sekitar bulan Desember 1965, disebut masyarakat lokal sebagai peristiwa 'Baledogan'[70] yang disertai -penjarahan barang di rumah-rumah yang dihancurkan itu. Tidak diperoleh data tentang korban jiwa, mungkin warga "Tengah" sudah cukup waspada dengan situasi yang terjadi di tingkat nasional sehingga mereka sempat menyelamatkan diri bersembunyi di pinggir-pinggir Sungai Cibodas.

> *"Waktos kajantenan eta, ibu teh tos nyumput di bumi urang Karees. Sanes saderek tapi karunyaeun. Bumi Ibu teh ... ah tos we ancur, dibaledogan batu-batu arageung. Parabot seep, nya dipejet-pejetkeun ... nya dicarandakan. Ibu teu tiasa nanaon"*
> (Waktu kejadian itu, Ibu sudah sembunyi di rumahnya orang Karees. Bukan saudara tapi dia merasa kasihan. Rumah Ibu itu ... ah sudah hancur, dilempari batu-batu besar-besar. Perabotan habis, ya dihancur-hancurkan ... ya diambili/ dijarah. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa). Sumber : interview ethn record.

Ada beberapa rumah yang selamat dari pelemparan karena lolos dari tuduhan terlibat dalam organisasi dan partai PKI. Mereka yang selamat ini telah beralih ke PNI sekitar tahun 1964 dengan tujuan sebenarnya adalah mendapatkan 'lisensi' dari Koperasi Mitra Batik dalam melakukan usaha tenun. Dengan 'lisensi' tersebut mereka berdalih bukan anggota atau pendukung organisasi atau partai PKI[71].

> *"Bumi abdi gen waktos eta teh bade dibaledogan. Aya sarombongan jalmi anu maledoganna teh. Waktos dugi ka caket pager eta, abdi enggal ka luar. Ceuk abdi teh, aya naon, teras aya jalmi anu nyarios naha ieu teh PNI*

---

[70] Baledogan merupakan Bahasa Sunda yang berarti 'pelemparan'.

[71] Huskens (1998) memperlihatkan proses penyelamatan diri yang mirip dalam kasus yang terjadi pada masyarakat Kampung Gondosari, para tokoh PKI dapat menyelamatkan diri melalui pertolongan kerabat mereka yang menjadi tokoh-tokoh partai politik lain seperti PNI dan NU.

Asu atawa PNI gadungan cenah. Ceuk abdi deui ah urang mah teu nyaho PNI Asu, PNI gadungan, urang mah PNI pro nasional. Sigana manehna pangna nanyakeun kitu gen pedah ningali aya gambar tempel PNI dina panto. Geus abdi ngajawab kitu teh laleos we ngabring deui ka palebah tonggoh. Bumi abdi salamet, mun taeun mah wah cilaka seep we jiga batur. Abdi teh teu kenal saha-sahana maranehanana, ngan aya anu abdi teh rada apal nyaeta urang palebah Kidul." (Rumah saya juga waktu itu akan dilempari. Ada serombongan orang yang akan melempari. Waktu mereka sampai dekat pagar, saya cepat-cepat ke luar. Saya tanya ada apa, kemudian ada orang yang bicara apakah ini [maksudnya rumah ini] PNI Asu atau PNI gadungan. Saya jawab ah saya tidak tahu apa itu PNI Asu, PNI gadungan, saya PNI pro nasional. Sepertinya dia menanyakan itu karena melihat ada gambar tempel PNI di pintu. Setelah saya menjawab begitu, mereka kemudian pergi ke arah daerah tanjakan. Rumah saya selamat, kalau tidak wah celaka habis seperti yang lain. Saya tidak kenal siapa mereka, Cuma ada yang saya hapal yaitu orang dari daerah Kidul). Sumber : interview ethn record.

Pada kasus Kampung Gondosari yang juga mengalami hal yang sama (Huskens, 1998) hubungan kekerabatan berperan dalam proses penyelamatan warga dari aksi pembersihan PKI. Sementara dalam kasus masyarakat lokal Kampung Gunung Kembang Tengah proses penyelamatan yang terjadi tidak terlalu dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan.

Peristiwa tersebut berbekas sangat mendalam dalam jiwa dan pikiran keluarga-keluarga kelompok Mikung. Kesaksian beberapa orang warga yang selamat dari pelemparan tersebut menyatakan bahwa sebagian kelompok pelempar adalah orang-orang yang pernah mendukung gerakan Darul Islam.

"Saatos baledogan eta, abdi ngiring ka sepuh abdi pun biang, di caket Lindung ayeuna. Bumi pan teu tiasa dieusian da tos ruksak kitu. Nya caroge teu aya tos dicandak ti payun, jaba murangkalih masih keneh orok. Wargi-wargi teu aya nu ngabarantosan da meureun sieun kacacandak. Abdi

didamel we sabisa-bisa, buburuh naon we, bari ngabeberes bumi sakedik-sakedik. Da sieunna moal aya atuh, dugi keun ka ayeuna gen abdi mah sok ngadegdeg teu tiasa nanaon mun aya rame-rame teh. Ningal jalmi kempel-kempel gen abdi mah sieun. Emut wae kajantenan eta" (Setelah peristiwa baledogan itu, saya numpang ke orang tua, ibu saya, di dekat daerah Lindung sekarang. Rumah kan sudah tidak bisa diisi lagi sudah rusak.. Mana suami saya tidak ada sudah diambil [ditahan] lebih dulu, mana anak saya masih bayi. Saudara-saudara tidak ada yang membantu karena mungkin takut akan terbawa-bawa. Saya bekerja sebisa saya, menjadi buruh apa saja, sambil membereskan rumah sedikit-demi sedikit. Takut sekali, sampai sekarang pun saya masih suka gemetar tidak bisa berbuat apa-apa kalau ada keramaian. Melihat orang berkumpul saja saya takut. Selalu ingat kejadian itu). Sumber : interview ethn record

Kampung Gunung Kembang di Masa Orde Baru

Pada masa pergantian kekuasaan pemerintahan dari Orla ke Orba pada tahun 1966 PKI dan organisasi-organisasi massanya dilarang hidup dengan terbitnya TAP No. XXV/MPRS/1966. Hal ini kemudian berlaku untuk semua yang berbau sosialisme, komunisme, dan marxisme. Penangkapan dan pendataan orang-orang yang diduga terlibat dalam organisasi dan partai terlarang dilakukan dimana-mana, termasuk di Kampung Gunung Kembang. Dari data sekunder tingkat desa tercatat sekitar 198 orang terlibat PKI dan hampir seluruhnya (90 %) berasal dari Kampung Gunung Kembang Tengah. Namun tidak satupun tercatat\terlibat dalam gerakan DI. Mereka yang tercatata digolongkan menjadi tiga golongan yaitu, golongan A, B dan C[72]. Dari jumlah tersebut 12 orang termasuk golongan B dan sisanya golongan C, sementara

[72] Mengenai penggolongan tersebut tidak diperoleh keterangan yang jelas kategori apa yang digunakan. Golongan A adalah orang-orang yang menjadi tokoh pengurus organisasi dan partai komunis. Golongan B adalah orang-orang yang aktif dalam organisasi dan partai komunis. Golongan C adalah orang-orang yang menjadi anggota atau pendukung organisasi dan partai komunis. Penjelasan penggolongan ini diperoleh dari keterangan Kepala Desa Sukaati.

golongan A tidak ada. Lima orang yang termasuk golongan B sempat 'dipesantrenkan'[73] ke Pulau Buru dari tahun 1970 hingga tahun 1978. Sebelum diberangkatkan ke Pulau Buru mereka terlebih dahulu dipenjara di daerah Simpang Tasikmalaya selama lima tahun. Sepulang dari 'pesantren' mereka diharuskan melaporkan diri ke Koramil (Komando Rayon Militer) untuk mengikuti pembinaan. Dalam 'Pembinaan' tersebut mereka bersama-sama dengan 'pesakitan' lain yang tidak 'dipesantrenkan diberi ceramah-ceramah mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) agar pikiran mereka yang sesat menjadi lurus kembali. Para tertuduh ini ditangkap dan dihukum tanpa proses peradilan. Mereka ditangkap atas "jasa panduan" orang-orang yang pernah menjadi pendukung gerakan DI. Konflik DI versus anti-DI (komunis) yang menimbulkan rasa saling tidak suka mendapat jalan dalam momen tersebut.

Stigma sebagai orang PKI tidak hanya melekat secara individual pada tertuduh saja tetapi juga pada keluarga dan keturunannya. Kepala desa dan aparatnya segera menggelar berbagai wacana penghapusan pemahaman segala hal berbau sosialis-komunis untuk menjaga stabilitas keamanan desa. Slogan 'bersih diri' dan 'bersih lingkungan'[74] menjadi saringan birokrasi sosial politik yang sangat rapat bagi masyarakat. Warga yang 'tidak bersih' tidak dapat menjadi bagian dari struktur formal pemerintah seperti pegawai negeri, ABRI, dan guru. Penggelaran wacana ini dapat dijadikan alat oleh pihak warga Kampung Gunung Kembang Kidul yang memiliki

---

[73] Kata 'dipesantrenkan' sering digunakan oleh warga Kampung Gunung Kembang untuk mengistilahkan pengasingan orang yang terlibat dalam organisasi/ partai komunis ke Pulau Buru, tempat hukuman khusus bagi mereka yang terlibat komunisme.

[74] Slogan bersih diri dan bersih lingkungan ini mempunyai makna bersih dari pengaruh-pengaruh pemikiran yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah secara politis. Lihat dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. Ed. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru.* Mizan. Bandung. Hal 31-32.

konflik pribadi ~ berlatar belakang kebencian karena peristiwa pembunuhan tokoh DI yang berkerabat dekat dengannya ~ untuk mencegah orang yang tidak disukainya mendapatkan posisi dalam struktur formal pemerintah seperti tergambar dalam Ilustrasi berikut.

> *"Sikap anjeunna masih keneh we kitu, pan abdi gen kantos gagal lebet ka ABRI teh lantaran anjeunna, ngalaporkeun yen si anu teh anak si anu nu kantos kitu kitu ...abdi terang da aya nu nyarios ka abdi ... ka abdi mah aya nu nyarioskeun yen jalmi eta teh nyarios kieu, si A rek asup ABRI ? yeuh keureut ceuli aing mun katampa ... ".* (Sikapnya masih begitu saja, saya kan pernah gagal masuk ABRI karena ulahnya, melaporkan bahwa si anu itu anak si anu yang pernah begitu begitu ... saya tahu sebab ada yang bilang sama saya ... sama saya ada yang bilang bahwa orang itu bilang begini, si A mau masuk ABRI ? nih potong telinga saya kalau dia diterima ..."). Sumber : interview ethn record.

Hal yang sangat nyata adalah pemberian tanda khusus pada kartu pengenal diri warga bahwa orang tersebut termasuk dalam daftar hitam orang-orang 'terlarang'. Sementara warga masyarakat yang pernah mendukung gerakan DI menjadi orang yang cukup 'bersih' bahkan dapat memiliki posisi penting tidak hanya di tingkat kampung tetapi juga tingkat desa. Salah seorang di antaranya bahkan pernah menjadi lurah, posisi yang kemudian memberi kemudahan lain kepada kerabatnya untuk memegang kekuasaan sebagai pejabat pengendalian keamanan kelurahan. Bahkan selama masa Orba, hak suara mereka yang diberi label terlarang tersebut diawasi dan 'dibina' secara khusus dan tempat khusus yang terkendali seperti keharusan memberikan suaranya dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di kelurahan.

Di tingkat kampung, pengendalian dan pengawasan terhadap warga masyarakat terus dilakukan dengan sangat ketat hingga sekarang melalui kegiatan keagamaan seperti

pengajian-pengajian di masjid. Bahkan diberlakukan absensi, warga yang tidak hadir mendapatkan nilai negatif. Pengendali kegiatan tersebut adalah seorang tokoh yang mempunyai hubungan erat dengan keluarga pendukung gerakan DI dan menjadi tokoh pengendali keamanan kampung dan desa. Struktur organisasi pemerintahan desa menurut UU no. 5 tahun 1974 menempatkan pemimpin desa yang ditunjuk dari atas mengandung salah satu tujuan pengendalian tersebut. Hal ini terlihat dari fakta bahwa orang yang menjadi Kepala Desa di Desa Sukaati yang mencakup Kampung Gunung Kembang, selama beberapa periode sejak undang-undang tersebut dilaksanakan hingga sebelum masa reformasi, adalah orang dari militer.

Kehidupan keluarga dan keturunan orang berstigma PKI menjadi sulit. Banyak yang harus memulai lagi usahanya karena harta bendanya dihancurkan pada saat peristiwa 'baledogan'. Mendesaknya kebutuhan keluarga dan adanya perasaan tertekan akibat stigma yang harus ditanggung menyebabkan banyak warga dan keturunannya melakukan migrasi Apalagi saat itu mulai terjadi kondisi *tugerat,* yaitu krisis ekonomi yang menyebabkan terjadinya rawan daya beli. Stigma tersebut mengakibatkan trauma dan tekanan yang mendalam, bahkan berakibat kematian. Terdapat kasus seorang anak perempuan berusia sekitar 18 tahun, anak perempuan satu-satunya dari seorang 'PKI' yang 'dipesantrenkan', meninggal dunia karena menderita stress akibat dari tekanan yang harus selalu ditelannya. Ejekan teman-teman dan bahkan cercaan para pendidik di sekolahnya selalu menempatkan dia sebagai 'anak PKI' yang seolah tidak berhak berada satu lingkungan dengan mereka.

Kasus lain ialah kondisi kehidupan Ibu E yang suaminya 'dipesantrenkan' ke Pulau Buru. Perjuangan hidupnya menjadi sangat berat karena dikucilkan dari masyarakat sekitar. Ia harus berusaha keras menghidupi diri dan anaknya yang masih bayi serta

ibunya yang tinggal bersamanya. Ia pun harus menjenguk suaminya dua kali sehari — yang dia lakukan hingga selama 5 tahun sebelum suaminya dipindahkan ke Pulau Buru kira-kira selama 10 tahun — untuk mengantarkan makanan karena dalam tahanan suaminya tidak diberi makan.Seorang warga Kampung Gunung Kembang Kaler yang mempunyai usaha batik tulis, merasa iba kemudian memberinya pekerjaan membatik. Pihak keluarga suami dan dirinya tidak ada yang memberikan bantuan, mungkin mereka takut terbawa akibat dari peristiwa tersebut. Simpanan uang dan perhiasan yang dimilikinya habis dijual. Setelah suaminya dibebaskan dan mereka berkumpul lagi, mereka harus memulai lagi usaha dari nol.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan beberapa proses marjinalisasi yang terjadi didalam masyarakat lokal sebagai pengaruh perubahan atmosfir politik dan kekuasaan di tingkat nasional. Hak-hak warga masyarakat sebagai individu dan bagian dari masyarakat dicabut sedemikian kuatnya hingga tidak berdaya secara sosial ekonomi dan politik.

Kampung Dalam Pembangunan

Perkembangan masyarakat Kampung Gunung Kembang, tidak bisa dilepaskan dari proses pembangunan yang terjadi di tingkat desa, tingkat kabupaten/kotatif bahkan tingkat nasional. Kekuasaan hirarki pemerintah pusat demikian kuat hingga ke tingkat masyarakat lokal. Kepala Desa dan aparatnya menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. LKMD sebagai institusi kelembagaan masyarakat bentukan pemerintah[75] yang mengklaim membawa bendera partisipasi masyarakat melalui

[75] Dr. Mochtar Mas'oed. op cit.

musyawarahnya, dalam kenyataannya tidak mencerminkan suara masyarakat lokal dari tingkat yang lebih rendah.

Pembangunan daerah lokal masih berfokus pada pembangunan fisik yang seringkali dijalankan tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum atas proses dan hasil pembangunan tersebut. Jalan raya dan bangunan sekolah menengah negeri boleh jadi merupakan pembangunan sarana fisik yang cukup diperlukan masyarakat Kampung Gunung Kembang. Namun, pembangunan obyek taman wisata Kembang Asri (dan pembangunan kompleks perumahan di lingkup desa yang sama) hanya untuk memenuhi kepentingan pelaksana program pembangunan yakni Bupati Tasikmalaya dan pengusaha swasta. Pembangunan Obyek taman wisata pada awal tahun 1990-an menyebabkan terjadinya pembelian tanah secara paksa dengan harga murah oleh Pemda bersama pengusaha swasta. Sawah-sawah produktif milik masyarakat beralih bentuk menjadi bangunan dan taman yang ternyata tidak memiliki nilai jual yang tinggi. Bahkan pada tahun 1997 terjadi kerusuhan massa akibat aktivitas di taman wisata dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Kehadiran aktor swasta pemilik modal besar dari luar daerah membawa dampak terhadap perkembangan pembangunan daerah lokal. Pembangunan obyek taman wisata tidak terlepas dari kepentingan aktor swasta yang dilegitimasi oleh bupati. Demikian pula dengan proyek pembangunan kompleks perumahan swasta yang sedang dilakukan. Masyarakat lokal tidak mempunyai suara yang cukup kuat untuk berargumentasi terhadap kekuatan legitimasi tersebut. Ironisnya pengusaha swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dalam hal ini bupati, kenyataannya adalah pejabat instansi pemerintah pula. Semakin jelas ada Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam kasus ini. Permainan ini tentunya selalu dimenangkan pihak seperti

bupati dan pejabat yang punya modal. Masyarakat harus tunduk pada kemauan mereka.

Selain adanya upaya pemaksaan untuk tunduk, terjadi pula penyeragaman pikiran dan tindakan dalam pola pembangunan yang dijalankan pemerintah. Jargon-jargon pembangunan pun bermunculan di setiap daerah. Di Tasikmalaya muncul kata "Bersinar" yang merupakan kependekan Bersih, Indah, Aman dan Rindang. Jargon tersebut menghiasi setiap sudut wilayah Tasikmalaya, mulai dari papan iklan layanan masyarakat hingga pemasangan spanduk-spanduk ke pelosok. Bahkan, warna pagar rumahpun dibuat seragam putih biru! mulai dari pusat kota hingga ke dalam kampung.

Program-program lain yang dilancarkan pemerintah di tingkat masyarakat lokal desa atau kampung juga cenderung dangkal dan tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi warga. Program-program KB, PKK dan Posyandu, atau Siskamling dilakukan dengan penekatan *top down*, bukan atas inisiatif warga. Wacana pembangunan nasional berusaha mengontrol masyarakat untuk berlaku sesuai dengan konsep yang diciptakan oleh pemerintah. Secara statistik memang tampak bahwa selama 30 tahun lebih pemerintahan Orde Baru, masyarakat berhasil dibawa kedalam wacana ciptaannya. Sistem kekuasaan hirarkis yang mengakar dan selalu ingin menyenangkan atasan menutup kesadaran bahwa masalah sebenarnya belum selesai. Bahkan pejabat RT, RW dan istri-istrinya menjadi perpanjangan tangan wacana.

> *"Ari penduduk mah diteken gen nampi we da upami henteu nampi, disebatkeun ngahambat pembangunan, janten bade kumaha deui"*
> (Kalau penduduk itu ditekan juga menerima saja sebab kalau tidak menerima, disebut menghambat pembangunan, jadi mau bagaimana lagi).
> Sumber : interview etn record.

Masyarakat bukan tidak paham dengan program-program tersebut, tetapi bisa jadi berlagak tidak paham atau pura-pura tidak mengerti. Keengganan-keengganan warga mengikuti program-program fisik maupun non fisik hanya dipahami sebagai kebodohan individu. Ancaman terselubung sebagai 'penghambat pembangunan' seolah membayangi kepatuhan semu yang diberikan masyarakat karena mereka tahu risiko yang diterima apabila menentang pemerintah. Ilustrasi di atas menggambarkan ketidakmampuan masyarakat, bahkan keputusasaan mereka dalam menghadapi wacana kekuasaan pemerintah.

Istilah pemberdayaan masyarakat menjadi isu yang hangat bersamaan dengan program-program bantuan seperti IDT, JPS dan KUT yang dijalankan pemerintah. Pengalaman warga masyarakat terhadap tindakan represi pemerintah serta kegagalan programnya bagi mereka, membuat tingkat kecurigaan dan kewaspadaan masyarakat tinggi. Pada masyarakat Kampung Gunung Kembang pelaksanaan program pemberian bantuan JPS (PDMDKE) berjalan cukup lancar. Penerima bantuan JPS ditentukan bersama melalui mekanisme tertentu. Warga yang ingin mendapatkan bantuan tinggal meminta persetujuan dari pihak RT dan RW di tempat tinggalnya kemudian berurusan langsung dengan LKMD. Kondisi ini kemudian menimbulkan kompetisi kurang sehat di antara warga orang-orang yang diberi dana JPS ternyata adalah mereka yang kenal dekat dengan pihak LKMD.

> *"Ari saur ibu-ibu mah ayeuna teh tos ngawitan saha wae anu sering ngobrol teras nyaketan ka Kalurahan eta anu sok dipayunkeun kenging JPS teh..."* (Katanya ibu-ibu itu sekarang ini sudah mulai siapa saja yang sering ngobrol dan mendekati orang-orang di Kelurahan itulah yang akan didahulukan dapat JPS...) Sumber : interview ethn record.

Mekanisme relasi KKN dalam penyaluran dana tersebut, tentunya akan merugikan warga Kampung Gunung Kembang Tengah ~ terutama yang berstigma PKI ~ yang tidak memiliki relasi demikian dekat. Warga Kampung Gunung Kembang Tengah jelas kalah kalau harus berkompetisi melalui mekanisme hubungan seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada pengecualian terhadap setiap warga, tetapi dengan mekanisme demikian otomatis warga yang terkena stigma mengalami pengabaian karena tidak bisa membangun relasi yang sama dengan warga yang lain.

LIMA

KEMISKINAN, RESISTENSI MASYARAKAT, DAN PEMBERDAYAAN

Proses marjinalisasi yang dialami kelompok mikung membawa mereka pada posisi yang secara sosial ekonomi dan politik sangat rentan atau mendorong masyarakat ke dalam kemiskinan. Masyarakat tidak mempunyai cukup energi untuk menghindar dari proses yang didorong oleh kondisi struktur yang lebih besar. Namun, sebenarnya mereka tetap melakukan perlawanan terhadap proses marjinalisasi tersebut agar tidak terlempar lebih jauh lagi. Tidak seperti golongan buruh atau gerakan mahasiswa yang melakukan perlawanan dengan berbagai aksi unjuk rasa massal disertai tindakan anarkisme secara terbuka. Masyarakat Gunung Kembang dan khususnya Mikung melakukan perlawanan dengan sangat samar dan terselubung, sehingga sulit untuk dideteksi sebagai bentuk perlawanan.

Kemiskinan Masyarakat

Kemiskinan mempunyai pengertian sebagai kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak bisa mengakses sumber daya dan kekuasaan sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan memiliki keterbatasan dalam bidang sosial politik. Kemiskinan ekonomi yang dialami masyarakat Kampung Gunung Kembang saling berkaitan erat dengan kemiskinan di bidang lainnya.

Secara umum berdasarkan kategorisasi pemerintah (dalam hal ini BKKBN) warga masyarakat yang tergolong kedalam kelompok miskin adalah warga yang berstatus Pra- Keluarga Sejahtera (Pra-KS). Kategorisasi tersebut menggunakan ukuran-ukuran fisik yang tidak jelas seperti lantai rumah yang terbuat dari tanah, kemampuan berganti pakaian untuk dirumah dan untuk bekerja, dan ketaatan menjalankan ibadah agama. Padahal sebenarnya persoalan pendapatan (*income*) merupakan hal yang krusial bagi kelompok miskin tersebut. Umumnya mereka bekerja sebagai pedagang kecil (pedagang barang kredit, pedagang asongan, pedagang ikan) dan sebagai buruh (buruh bangunan, beberapa orang tukang becak dan buruh tani) yang pendapatannya kecil sehingga daya belinya rendah, apalagi saat terjadinya krisis ekonomi.

Pada umumnya, masyarakat Gunung Kembang memiliki mata pencaharian sebagai pedagang kecil. Pekerjaan ini tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar. Sementara pasar dipengaruhi oleh permintaan yang juga sangat terkait dengan kondisi inflasi mata uang secara global. Situasi demikian membuat mereka menjadi sangat rentan secara ekonomis. Pada situasi krisis saat ini, posisi mereka makin rentan, ditambah kebiasaan 'obor barangbang' yang memunculkan kompetisi tidak sehat membuat kelompok pedagang kecil ini kian terpuruk. Secara umum kondisi yang kerentanan yang sama dialami oleh warga yang bermata pencaharian sebagai buruh, seperti misalnya buruh bangunan. Proyek pembangunan fisik bangunan atau jalan yang menurun mempengaruhi pula ketersediaan pekerjaan bagi buruh-buruh tersebut.

> *"Anu pasti mah ayeuna-ayeuna teh masarakat nuju ripuh katingalna khususna mah di erte hiji masarakat abdi. Anu sok kana tani paling tinggal nu sararepuh tah sapertos mertua abdi nya... eta gen ngan saukur maro, anu dararagang angot raripuh...da naon anu bade didagangkeunana ayeuna mah ?, Basa jaman kamari-kamari tah saacan krismon, rame konpeksi... apan seueur nu maruka nya sapertos Kang A abdi gen kantos ngiringan*

mangicalkeun ka wetan [Jawa Tengah -pen]. Tah mun aya we nu katingal maju dina hiji usaha breng wae nu sanes teh ngariringan bari jeung dina itung-itungannana teh teu dielmuan nya puguh we atuh sakedap ogen kababayut... Teu lami ti usum konpeksi rame kana lauk... abdi kantos ngiringan ngadagangkeun lauk teh di pasar-pasar, tapi da teu lami da bongan didieu mah tara aya nu keyeng... teu kaur ningal batur maju usaha ditarurutan... Obor barangbanglah sapertos nu sering ku abdi dicarioskeun ... Tah ayeuna teh asa teu katingal aya usaha nu rame deui... paling nya kararitu weh... icalan saaya-aya"

(Yang pasti itu sekarang-sekarang ini masyarakat sedang repot kelihatannya khususnya itu di rt satu yang merupakan masyarakat saya. Yang bertani paling tinggal yang tua-tua nah seperti mertua saya... itupun hanya sekedar maro, yang dagang apalagi mereka sangat repot... soalnya apa yang bisa mereka dagangkan saat ini ?, Pada saat kemarin-kemarin tuh pada saat sebelum krismon, ramai konveksi ... kan banyak yang membuka yah seperti Kang A, saya juga pernah ikut menjualkan ke Timur. Nah kalau saja ada yang terlihat maju dalam usaha dengan segera saja yang lain itu akan ikut-ikutan sementara di bidang hitung-hitungannya [manajemen usaha -pen] tidak dibarengi pengetahuan tentu saja dalam waktu sebentar saja sudah runtuh ... Tidak lama dari musim konveksi ramai usaha ke perikanan ... saya pernah ikutan menjualkan ikan itu di pasar-pasar, tetapi nyatanya nggak lama ya karena disini itu tidak pernah ada yang bertahan lama ... setiap lihat orang lain berhasil dalam usaha pasti akan pada ngikut... Obor barangbanglah [peribahasa Sunda: Obor yang sebentar-sebentar menyala sebentar-sebentar padam -pen] seperti yang sering saya bicarakan ... Nah sekarang itu perasaan nggak terlihat ada usaha yang ramai lagi ... paling ya begitu sajalah ... berjualan ala kadarnya). Sumber : interview ethn record.

Ketiadaan aset yang dimiliki secara historis berkaitan dengan usaha yang berskala lebih kecil. Sementara pada perkembangan berikutnya peluang bagi warga kampung untuk mendapatkan pekerjaan di pemerintahan yang dianggap lebih mapan, tertutup. Padahal menjadi pegawai negeri identik dengan gaji/penghasilan tetap yang juga berarti akan terjaminnya kebutuhan hidup. Konflik politis masa lalu dan stigma yang melekat pada masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah khususnya kelompok

Mikung telah menutup peluang tersebut. Tidak ada peluang sama sekali bagi orang yang diberi stigma PKI beserta keturunannya untuk memperoleh pekerjaan kepemerintahan. Secara politis kontrol terhadap orang berstigma PKI bahkan terus dilakukan, misalnya keharusan menghadiri pembinaan setiap bulan di Kecamatan atau Koramil dan keharusan setiap tahun memberikan hak suara yang juga dikontrol disana.

Kemiskinan ekonomi pada gilirannya mempengaruhi tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat. Warga Kampung Tengah yang miskin tidak dapat menikmati pendidikan yang layak. Penduduk yang rata-rata pedagang kecil dan buruh tidak dapat membiayai pendidikan anak-anaknya yang mahal. Demikian juga dengan tingkat kesehatannya. Masyarakat tidak mampu membayar biaya kesehatan yang juga mahal.

Kemiskinan ideologi dan politik yang dialami warga Kampung Gunung Kembang Tengah sangat erat kaitannya dengan stigma mikung dan stigma PKI. Stigma-stigma ini menjadi legitimasi bagi pemerintah desa dan tokoh agama Islam dari golongan NU dan Persis untuk melakukan kontrol terhadap warga Kampung Gunung Kembang Tengah. Bagi pemerintah desa Kampung Gunung Kembang Tengah adalah daerah basis PKI yang perlu diwaspadai. Sementara Bagi tokoh-tokoh Islam golongan NU dan Persis, wilayah tengah adalah tempat kelompok Mikung yang menjadi pendukung utama PKI. Pengawasan terhadap warga melalui kegiatan pengajian dan ronda keliling kampung hampir tiap malam merupakan bentuk-bentuk kontrol yang dilakukan tokoh agama NU setempat yang direstui pemerintah. Pemberian tanda organisasi terlarang pada kartu identitas diri dilakukan pada orang-orang dengan stigma PKI. Bahkan dalam memberikan hak suara saat Pemilu dilangsungkan, orang-orang berstigma PKI ini diharuskan memberikan suaranya di TPS khusus di kelurahan atau kecamatan.

Tindakan-tindakan seperti itu jelas sangat mengekang, karena mereka benar-benar diawasi penuh kecurigaan.

Resistensi Terhadap Pemerintah dan Aktor Swasta

Struktur masyarakat lokal di pedesaan sangat dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial ekonomi dan politik nasional bahkan internasional. Pertumbuhan dan perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang mengarahkan masyarakat dunia pada modernisasi membawa serta aksi-aksi peminggiran terhadap keberadaan masyarakat akar rumput. Masyarakat di Kampung Gunung Kembang sebagai bagian dari masyarakat Indonesia mengalami perlakuan peminggiran akibat gelombang kekuasaan pemerintah nasional yang menggelar pembangunan berpijak pada jalannya percaturan relasi negara-negara internasional.

Kebijakan-kebijakan yang diciptakan pemerintah Orba menuntut berbagai pembenahan kondisi masyarakat sesuai dengan kerangka pemerintah. Konsep 'masyarakat yang diimajinasikan' dan 'masyarakat yang diciptakan'[76] yang sangat top-down mengontrol dinamika masyarakat. Didalam wacananya pemerintah memang menggunakan istilah-istilah yang mengangkat kata 'berpusat pada masyarakat' (*people centred*) tetapi kenyataan tetaplah 'berpusat pada pemerintah'. Kondisi ini bisa dilihat dari fakta-fakta pembangunan yang memperlihatkan aspirasi masyarakat akar rumput sama sekali dilemahkan. Terlebih ketika aktor swasta pemilik kapital besar turut bermain dalam kebijakan-kebijakan pemerintah.

---

[76] John Sullivan. 1992.

Pembangunan obyek wisata Taman Kembang Asri di Kampung Gunung Kembang merupakan salah satu contoh kasus tersebut. Masyarakat dibuat tidak berdaya dengan keputusan tanah mereka harus 'diserahkan demi pembangunan' kepada pemerintah. Sebagian sawah yang masih produktif dan menjadi lahan nafkah beberapa warga masyarakat harus dikorbankan demi pendirian obyek wisata yang akan menghasilkan sejumlah besar rupiah bagi pemerintah daerah dan pengusahanya. Warga Kampung Gunung Kembang Tengah, khususnya kelompok Mikung yang mempunyai banyak label, 'sudah seharusnya' patuh daripada memperoleh label baru sebagai 'penghambat pembangunan'. Kasus ini kemudian memupuk timbulnya aksi kerusuhan massa yang berakibat berhentinya aktivitas usaha pub di taman wisata tersebut. Hingga saat ini obyek wisata masih berjalan tetapi sangat sepi pengunjung. Kasus ini bukanlah bentuk resistensi terselubung.

> *"Aranjeuna mah teu tarerangeun da saleresna proposal eta teh redaksi na mah ti abdi sareng Pak A. Dina proposalna teh anu dijadikeun bahan pikeun nungtut nu gaduh Kembang Asri teh nyaeta perkawis kamaksiatan-kamaksiatan sapertos gaul bebas istri pameget, teras minuman keras anu diical didinya, janten upami kitu mah langkung kiat kumargi di daerah Gunung Kembang kan aya pasantren".*
> (Mereka semua tidak tahu kalau sebenarnya proposal itu redaksinya berasal dari saya dan Pak A. Didalam proposal yang dijadikan sebagai bahan tuntutan kepada pemilik Kembang Asri yaitu tentang kemaksiatan-kemasksiatan seperti pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, kemudian juga minuman keras yang dijual disitu, sehingga menjadi lebih kuat <tuntutannya - pen> karena di daerah Gunung Kembang ada pesantren).
> Sumber : interview ethn record.

Bentuk resistensi terselubung yang ada dalam aksi kerusuhan massa tersebut , lebih pada kepuasan psikologis dari kelompok Mikung, dengan menjadi aktor intelektual terjadinya peristiwa tersebut. Secara psikologis ini merupakan resistensi terhadap

tekanan yang dibuat pemerintah sekaligus membuktikan bahwa sekalipun mereka melakukan perlawanan tersembunyi, dampaknya ternyata cukup besar.

Bentuk lain resistensi terselubung yang ditujukan pada pengusaha obyek wisata yang juga memiliki sejumlah besar tanah produktif yang dibelinya dari masyarakat, adalah pencurian hasil pertanian. Pengusaha obyek wisata itu membangun lahan pertanian cabai keriting di atas tanah yang dibelinya. Warga yang sebenarnya tidak rela melepaskan tanahnya kerap melakukan pencurian dan perusakan tanaman sebelum panen. Para penjaga kebun cabai tidak menghiraukan perbuatan warga tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada usaha ternak ikan milik pengusaha tersebut. Sebagai sesama warga kampung yang 'senasib' mereka tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah tetapi sebagai orang yang dibayar untuk menjaga kebun tersebut mereka harus menjalankan tugasnya. Tindakan-tindakan pencurian tersebut merupakan upaya penggerogotan kekuasaan dan kekuatan kapital si pengusaha luar yang mengancam pemilikan dan pengalihan sumber daya lokal ke tangannya. Termasuk perlawanan terhadap berdirinya taman wisata yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.

Tindakan 'pengambilan hak' yang mirip dengan tindakan pencurian juga terjadi dalam hubungan kerja antara petani penggarap dan aktor luar pemilik tanah lokal. Satu kasus dalam ilustrasi berikut memperlihatkan tindakan resistensi tersebut.

> *"Mung ... kitu ayeuna mah maro teh rada teu kahartos, teu kahartos na ku lantaran nu gaduh serang teh teu merhatoskeun kana kedahna bagean maro masing-masing. Kedahna pan sadaya kaperyogian ngawitan tina binih, pupuk sareng obat na teh diparo-keun, ari ieu upami emut anjeunna nembe masihan bari nyebatkeuna teh bantosan .. jaba saalit, janten abdi-abdi deui anu nutupan sadaya kaperyogian garapeun teh. Nya .. keuheul mah keuheul*

tapi da kumaha, namina ogen jalmi butuh ku pakasaban ... nya teu tiasa kukumaha deui. Mung ku abdi ayeuna mah sok diakalan. Pan tina 200 bata teh kekenginganana kirang langkung 1,2 ton pare garing, ku abdi teh sok dipotong we saartoseun bagean maro anjeunna saatos pare nu anjeunna mah diical. Da upami teu kitu mah ka abdina abot atuh".

(Tapi ... maro sekarang ini kurang bisa dimengerti <maksud informan ialah sistemnya yang memungkinkan pemilik sawah seenaknya-pen> , tidak dimengertinya sebab pemilik sawah tidak memperhatikan perhitungan bagian maro masing-masing. Seharusnya semua keperluan mulai dari benih, pupuk dan obat dibagi dua, sedangkan ini kalau dia ingat saja baru memberikan bagiannya sambil mengatakan itu sebagai bantuan ... padahal jumlahnya sedikit, jadi saya terus yang harus menanggung semua keperluan penggarapan. Kesal sih kesal tapi bagaimana, namanya juga orang butuh pekerjaan ... ya nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekarang saya suka mengakalinya. Dari 200 bata itu penghasilannya kurang lebih 1,2 ton gabah kering, saya suka potong bagian maro dia dari hasilnya sejumlah bagian seharusnya setelah padi bagiannya dijual. Kalau tidak begitu saya berat.).

Sumber : interview ethn record.

Ilustrasi ini menunjukkan perlawanan halus dari petani penggarap terhadap pemilik lahan, karena ketidakadilan yang dirasakan petani penggarap. Seharusnya, pemilik lahan turut menanggung biaya produksi. Ketidakpedulian pemilik lahan mengarah pada bentuk eksploitasi sumber daya manusia petani penggarap yang semakin melemahkan *bargaining position* petani penggarap tersebut. Perlawanan yang dilakukan merupakan kompromi dari etika subsistensi petani, antara pemenuhan kelangsungan sumber daya ekonomi dan pemberontakan terhadap ketidakadilan pemilik lahan yang kapitalistik dalam pengaruh mekanisme ekonomi global.

Terhadap program-program pembangunan yang diperintahkan pemerintah desa, resistensi tampak dari penghindaran dan kepatuhan pura-pura yang dilakukan dengan

berbagai alasan. Alasan-alasan tersebut kadang naif tetapi cukup efektif menghambat kelancaran program. Seperti pada kasus program PKK dan Penyuluhan KB berikut.

> *"Di dieu PKK teh ayeuna mah rada pareum, duka kumaha ... Ayeuna mah da sanes Ibu anu nyepeng na. Ah cape, seueur teuing cepengeun. Tos diserenkeun ka Ibu R ayeuna mah.... Tapi nya kitu ayeuna teh teu patos jalan. Ibu R na tara kersa turun, da upami aya kempelan-kempelan teh tara sumping sakitu disampeur ogen, alesanna teh aya wae. Upami PLKB mah masih keneh ku Ibu. Tos ampir sadaya PUS lebet KB, tapi nya aya ogen anu alim lebet, Ibu teh meni geregeten da ningal istrina teh tos ngandung deui wae, padahal putrana teh tos tilu aralit keneh. Sataun hiji sugan. Alesana teh ah ka ridu-ridu. Sesah masihan penerangan ka masyarakat teh. Tapi di RW ieu mah kaetang berhasil kana jumlah persentase lebet KB-na. Seseueurna di dieu mah nganggo Pil sareng IUD".*
> (Kegiatan PKK <Program Kesejahteraan Keluarga- pen> disini sekarang agak padam, tidak tahu kenapa ... Sekarang bukan Ibu yang mengurusnya. Ah lelah, terlalu banyak yang diurus. Sekarang sudah diserahkan kepada Ibu R .... Tapi ya sekarang tidak begitu berjalan. Ibu R tidak pernah mau turun <ke masyarakat-pen>, kalau ada pertemuan-pertemuan tidak pernah datang walaupun dijemput juga, selalu ada saja alasannya. Kalau PLKB <Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana-pen> masih Ibu yang pegang. Sudah hampir semua PUS <Pasangan Usia Subur-pen> masuk KB, tapi ya ada juga yang tidak mau masuk, Ibu jadi gemas melihat istrinya sudah mengandung lagi, padahal anaknya sudah tiga masih kecil-kecil. Setahun satu sepertinya. Alasannya ah repot-repot. Susah memberi penerangan kepada masyarakat. Tapi di RW ini terhitung berhasil jumlah persentase masuk KB-nya. Kebanyakan disini menggunakan Pil dan IUD). Sumber : interview ethn record.

Pemerintah memperpanjang kekuasaannya hingga tingkat RW dan RT. Konsep partisipasi menurut pemerintah diaplikasikan dengan tujuan mengejar angka statistik tinggi 'peserta' dalam program KB dan PKK sebagai acuan keberhasilan pembangunan. Sementara keadilan kesejahteraan yang menjadi permasalahan warga masyarakat tidak pernah diwujudkan.

Ideologi pembangunan pemerintahan orba juga dilakukan dengan mengadopsi bentuk-bentuk institusi kemasyarakatan, seperti gotong-royong. Program-program pemerintah yang mengatasnamakan gotong-royong diluncurkan demi mendapatkan dukungan masyarakat luas. Padahal sebenarnya substansi kepentingan pemerintah untuk memobilisasi dana masyarakat demi ideologi pembangunan tetap muncul dalam program tersebut. Oleh karena itu, program rereongan sarumpi, misalnya tidak berjalan karena warga melakukan resistensi diam-diam. Mulai dari alasan tidak mempunyai uang untuk 'iuran' atau akan membayar lain waktu hingga 'menyembunyikan diri' dari petugas penarik iuran

Seringkali pemerintah lokal menganggap penolakan warga terhadap program-program yang bertujuan menciptakan 'kesejahteraan' sebagai kebodohan. Masyarakat dipandang suka seenaknya sendiri dan tidak mau tahu kesulitan pemerintah. Pemerintah tidak menyadari bahwa penolakan tersebut merupakan perlawanan terhadap kekuasaan yang berusaha mencengkeram masyarakat. Resistensi terhadap status pemerintah serta oknum-oknumnya yang menjadi sarang kegiatan KKN dan telah banyak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan diri pribadi dan kerabatnya. Bagi pemerintah lokal 'kebodohan' masyarakat tersebut tentulah mengganggu kelancaran program mereka mendapatkan prestasi dari pemerintah pusat.

Resistensi terhadap Tekanan Politis dan Ideologis

Perjalanan sejarah politik Kampung Gunung Kembang yang penuh dengan konflik antar partai politik dan memunculkan label-label stigma sangat berpengaruh terhadap dinamika struktur masyarakat. Konflik dan label-label stigma yang muncul sangat

kompleks dan berjalin erat dengan konflik ideologis yang terjadi antar kelompok warga masyarakat. Konteks pemanfaatan label stigma menjadi sangat luas dan seringkali digunakan dalam momen-momen kritis beratmosfir politis kepentingan pemerintah dengan ideologi pembangunannya juga kepentingan warga kelompok masyarakat bahkan kepentingan individu tertentu dalam kelompok-kelompok tersebut.

Kampung Gunung Kembang Tengah yang mendapatkan stigma secara keseluruhan sebagai 'basis PKI' menjadi daerah perhatian khusus pemerintah lokal dalam pembangunan. Pemerintah menempatkan orang dari angkatan bersenjata sebagai kepala desa berturut-turut setelah terjadinya peristiwa G30 S dengan tujuan memperketat kontrol politis terhadap masyarakat. Golongan agama Islam yang menjadi lawan konflik ideologis warga masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah mendapatkan kepercayaan pemerintah lokal sebagai salah satu alat pengontrolan tersebut. Organisasi NU memperoleh kesempatan melakukan penekanan terhadap lawan ideologis mereka yaitu kelompok mikung. Aktivitas keagamaan Islam menjadi marak kembali di daerah Kampung Gunung Kembang Tengah. Golongan agama Islam melalui tokoh masyarakat yang Kampung Gunung Kembang Kidul mempunyai wewenang mengatur dan menyelenggarakan kegiatan keagamaan, terutama kegiatan pengajian.

Warga Mikung dan warga lain yang dikenai stigma PKI wajib hadir dalam kegiatan pengajian rutin, karena ada absensi dan ada penilaian negatif bila tidak hadir. Ketidakhadiran seringkali diperluas konteksnya, dihubungkan dengan stigma-stigma PKI dan mikung sebagai 'ketidakislaman', bahkan secara eksplisit sering pula nama-nama tertentu dimasukkan dalam isu tersebut. Tak jarang tokoh masyarakat akan mencerca mereka yang tidak hadir dengan kata-kata yang kasar sekalipun terhadap

orang-orang yang lebih tua. Akibatnya justru terjadi aksi mangkir orang orang dan tanpa dikomando aksi ini semakin menjadi-jadi. Mereka yang tidak hadir melakukan resistensi terhadap kondisi represif yang menimbulkan stigma-stigma negatif terhadap mereka.

Selama masa Orba tindakan pengontrolan juga dilakukan melalui kontrol 'keamanan' keliling kampung yang hampir setiap malam dilakukan tokoh dengan mengatasnamakan kegiatan siskamling. Selain sebagai orang yang berasal dari organisasi NU di wilayah kidul, si tokoh menampilkan diri sebagai pengendali keamanan kampung berkat posisinya sebagai mantan wakil kepala keamanan di tingkat desa. Dengan potensi tersebut ia menempatkan diri sebagai ketua keamanan dan ketua DKM RW. Warga kampung memandang tindakan tersebut sebagai salah satu bentuk unjuk kekuasaannya 'memenangkan' konflik politis dan ideologis dalam masyarakat. Bahkan ia kerap mendikte pengurus RW apalagi warga untuk mengikuti keinginannya

> *"Si Pak O mah sok barang geureuh, nanaon teh kudu nurut kahayangna. Siga pangaosan di masjid kan anjeunna anu hoyong eta teh. Kedah eta teh, pengurus RW wae pami teu sumping ka pangaosan teh sok diseuseulan ku anjeunna mah, Ah da ka anu yuswana langkung sepuh wae wantun nyeuseulan anjing goblog. Dina kempelan RW gen kitu deui sok alim eleh nyarios. Ketua RW na deui di dieu mah teu patos vokal, janten nya ngiringan we ka anjeunna".*
> (Si Pak O itu suka menegur, apa-apa harus menurut keinginannya. Seperti pengajian di masjid itu dia yang ingin. Harus itu, pengurus RW saja kalau tidak datang ke pengajian suka dimarahi olehnya. Ah sama orang yang lebih tua saja dia berani memarahi anjing goblok. Dalam pertemuan RW begitu juga suka tidak mau kalah bicara. Ketua RW disini lagi tidak begitu vokal, jadi ya mengikuti saja apa maunya dia). *Sumber : interview ethn record.*

Keberhasilan tokoh ini dalam menciptakan suasana represif dalam masyarakat membuatnya buta akan sikap warga yang mulai melakukan 'kasak-kusuk' untuk mengangkat tokoh pemuda dari kelompok Mikung sebagai ketua RT menggantikan ketua RT lama yang menjadi bonekanya. Bukan hanya itu Bendahara RW dan salah satu staf keamanan RW digantikan pula oleh orang-orang dari kelompok Mikung. Posisi ini menjadi bagian dari resistensi kelompok Mikung[77] dan umumnya warga Kampung Gunung Kembang Tengah terhadap pemerintahan lokal serta untuk membendung kekuasaan si tokoh yang berlebihan. Kelompok Mikung secara diam-diam selalu melakukan pertemuan yang disebut acara 'ngawadul'[78] di kediaman salah seorang anggotanya.

> *"Pa' H, Pa' D, Pa' As mah sok sering ka darieu ... ngadon ngawadul. Nya ngawadulkeun sanes kanten ngaler ngidul. Ari di bumi Pa' A didieu mah bebas nyarios teh, teu sapertos di teun Pa' H, di dieu mah moal was-was kadangu ku batur. Ngawadulkeun berita-berita politik dina tipi sareng kaayaan di Gunung Kembang. Upami kamari waktos nuju rame sateuacan reformasi mah sering ngadangukeun siaran berita ti BBC. Berita-berita na terbuka nyarioskeun masalah politik di urang teh, langkung enggal tibatan berita dina koran di dieu. Janten abdi sok atos terang langkung tipayun berita anu muncul dina koran teh. Saatos reformasi mah tos rada sami lah sareng berita di tipi ayeuna mah".*
>
> (Pak H, Pak D, Pak As sering kesini ... untuk mengobrol. Ya, mengobrolkan segala macam kesana kemari. Kalau di rumah Pak A, disini, bebas mau bicara apa saja, tidak seperti di tempat Pak H, disini tidak akan khawatir terdengar oleh orang lain. Mengobrolkan berita-berita politik dari teve dan juga keadaan di Gunung Kembang. Kalau kemarin waktu sebelum terjadi reformasi, sering mendengarkan siaran berita dari stasiun BBC. Berita-beritanya terbuka membicarakan masalah politik di <negara -pen> kita,

---

[77] Dalam proses sejarah, stigma PKI tidak terpisahkan dengan stigma mikung ini. Lihat uraian pada bagian sebelumnya dalam tulisan ini.

[78] Ngawadul dalam Bahasa Indonesia berarti mengobrol bohong, mengobrol sambil lalu kesana-kemari.

lebih cepat dibandingkan dengan berita di koran. Jadi saya suka lebih dulu tahu berita yang muncul di koran. Setelah reformasi beritanya sudah agak sama lah dengan berita di teve sekarang). Sumber : interview ethn record

Pertemuan *ngawadul* itu sendiri sebenarnya merupakan kebiasaan masyarakat secara umum. Pada kelompok mikung, sejak masa tokoh Eyang Lamsari, 'ngawadul' menjadi bagian dari proses pembelajaran orang-orang menjadi 'mikung'. Konteks 'ngawadul' yang dipenuhi filosofi sinkretisme. Pertemuan *ngawadul* yang ada sekarang selain sebagai proses pembelajaran mikung juga menjadi ajang pembahasan kondisi sosial ekonomi politik masyarakat yang dialami oleh mereka.

Pertemuan *ngawadul* ini menjadi bagian yang penting bagi para mikung dalam proses resistensi terhadap tekanan ideologis dan politis yang harus mereka hadapi. 'Ngawadul' menjadi bentuk resistensi diam-diam terhadap proses pengontrolan 'keislaman' yang secara ideologis berkonflik dengan mereka melalui pembahasan-pembahasan kondisi mereka. *Ngawadul* menjadi salah satu cara untuksekaligus memperkuat 'kemikungan. Sekalipun proses sosialisasi dalam konteks regenerasi mengalami stagnasi, namun sosialiasi dalam arti konsolidasi antar-mikung terbangun cukup kuat.

> *"Ari nu di dieu mah disebat kitu teh nampi wae. Da pangertosan 'mikung' numutkeun urang dieu nu disebatkeun mikung na nyalira mah mikung teh justru gaduh kaistimewaan anu langkung sae kumargi sanaos mikung teh cicingna dina jero liang sareng tara disada tapi cobi geura tingal ka jero liang eta ... di dinya teh mikung seueur bahan katuangeunana ... pan diberean terus ku indungna. Janten saleresna mah mikung teh sanaos cicing tapi katerang na teh seueur. Abdi ogen sok tiasa lah ari diajak dialog kana naon wae mah. Nu langkung penting kanggo mikung mah nyaeta pengamalan, kaikhlasan sareng karidhoan hate".*

(Orang sini menerima saja disebut begitu. Pengertian mikung menurut orang sini yang disebut mikungnya sendiri justru mempunyai keistimewaan yang lebih bagus sebab walaupun mikung tinggal didalam lubang dan tidak pernah bersuara tapi coba lihat kedalam lubang itu ... disitu mikung mempunyai banyak bahan makanan ... sebab selalu terus diberi oleh induknya. Jadi sebenarnya walaupun mikung itu diam tapi pengetahuannya banyak. Saya juga bisa lah kalau diajak berdialog soal apapun. Yang lebih penting untuk mikung yaitu pengamalan, keikhlasan dan keridhoan hati). Sumber : interview ethn record.

Ilustrasi itu menunjukkan perlawanan yang lebih halus dari kelompok orang yang dimiskinkan dengan simbol mikung sebagai kelompok yang dianggap mencampurkan Islam dengan aliran kepercayaan tertentu. Simbol tersebut diberi makna yang lebih dalam dan 'melawan' miskinnya makna awal yang diberikanada kenyataannya dengan 'ngawadul' selain memperkuat solidaritas, juga mempertahankan basis pengetahuan mikung yang diturunkan kepada mereka bahkan memperluasnya kedalam konteks konflik yang terjadi dalam masyarakat.

Didalam pertemuan yang tidak terstruktur itu, mereka bisa dengan bebas berinterpretasi dan berdialektika diantara mereka. Informasi berita dari televisi dan siaran radio memperkaya pengetahuan sosial ekonomi politik nasional bahkan internasional mereka. Pertemuan ini seringkali menghasilkan atau memperkuat gagasan yang timbul dalam upaya melakukan resistensi terhadap proses pemiskinan, terutama dalam menyikapi kondisi represif politis yang mereka alami dalam masyarakat. Seperti yang dilakukan tokoh mikung yang menjadi ketua RT di wilayahnya. Tokoh mikung ini berhasil memanfaatkan Pemilu untuk bernegosiasi dengan pejabat pemerintah. Ia berhasil menukarkan dukungan warganya bagi kemenangan Golkar dengan dana pembangunan fisik bagi kampungnya. Sebagai kampung yang mendapat perhatian khusus, Gunung Kembang Tengah sangat sulit

memperoleh dana pembangunan fisik kampung. Dengan pendekatan pribadi kepada warga kampung, hampir seluruh suara warga mendukung strateginya. Akhirnya, Kampung Gunung Kembang Tengah dapat memperbaiki prasarana kampungnya.

> *"Didieu kenging dua periode sateuacan Pemilu 1997 kamari, koneng. nya, abdi nyalira nu janten pangurus ka-RW-an nyaketan ka Camat. Saur Pa' Camat teh, kumaha atuh Kembang Asri teh ... abdi nyarios nya tiasa wae hoyong koneng, mah da ti kapungkur ogen Kembang Asri mah pro pemerintah ... sok lah ku abdi diusahakeun ngan abdi teu tiasa ngajamin saratus persen kenging ... tapi nyuhunkeun kapentingan masyarakat Kembang Asri teh atuh diperhatoskeun. Tah ... kitu, dugi ka tiasa ngalereskeun jalan di Gunung Kembang Tengah teras gorong-gorong na ogen lantaran eta. Saur Pa' Camat teh, heug ukur we perlu na sakumaha da dana na mah aya. Ku abdi teh diukur teras dikalkulasi, sadaya bahan na mah nyandak we ka matrial kantun laporan we ka ditu seep sakitueun. Abdi gen da saleresna mah patojaiyah jeung hate kitu teh. Janten abdi mah ka masyarakat ogen henteu maksakeun tapi masihan pangertosan yen masalah milih mah kumaha pribadi tapi kudu dipikirkeun ogen yen milih naon wae ogen da diluhurna mah angger-angger keneh engke mah meunang ku Golkar. Hasilna nya didieu dua periode koneng. Aya nu nyarios ah licik maneh mah door to door pantes we rek meunang ogen. Anu terangeun yen saleresna abdi mah sanes koneng teh ngan seuri we".*

> (Disini dua periode <pemilu - pen> sebelum Pemilu 1997 lalu, kuning <Golkar- pen>. Ya, saya sendiri yang jadi pengurus ke-RW-an mendekati Camat. Kata Pak Camat, bagaimana ini Kembang Asri ... saya katakan kalau ingin kuning bisa saja, dari dulu juga Kembang Asri itu pro pemerintah ... biar saya usahakan cuma saya tidak bisa menjamin menang seratus persen ... tapi minta kepentingan masyarakat Kembang Asri diperhatikan. Nah... begitu, sampai bisa membetulkan jalan di Gunung Kembang Tengah

kemudian gorong-gorong juga karena itu. Pak Camat mengatakan, ukur saja sebagaimana perlunya dananya ada. Saya ukur dan hitung, semua keperluan bahan bangunan mengambil ke matrial <toko bahan bangunan -pen> tinggal memberi laporan ke sana <ke Pak Camat- pen> berapa besar habisnya. Melakukan itu sebenarnya saya merasa bertentangan dengan hati. Jadi ke masyarakat pun saya tidak memaksakan tapi memberi pengertian bahwa masalah memilih itu bagaimana pribadi tetapi harus dipikirkan juga bahwa memilih apa saja juga nanti diatasnya <di pihak pemerintah -pen> tetap saja akan dimenangkan Golkar. Hasilnya disini dua periode kuning. Ada yang bilang ah kamu curang, *door to door* pantas saja menang. Yang tahu kalau saya sebenarnya bukan kuning cuma tersenyum). Sumber : interview ethn record.

Ilustrasi tersebut menunjukkan strategi yang dilakukan oleh aktor masyarakat lokal yang memanfaatkan permainan elit birokrat-politik yang menjadikan masyarakat desa sebagai massa mengambang (*floating mass*) dalam upaya mempertahankan kekuasaan politik mereka. Strategi tersebut mungkin bisa dikategorikan sebagai bentuk resistensi warga Kampung Gunung Kembang Tengah yang menampilkan ideologi 'Jiwa Tengah' dengan mengikuti 'arus besar politik' yang ada untuk mendapatkan perhatian dan jatah program pembangunan yang seharusnya sejak dulu mereka dapatkan. Strategi ini sebenarnya berlaku dan banyak dijalankan oleh aktor-aktor di daerah lain karena kondisi ketidakadilan pemerataan pembangunan yang sama-sama dirasakan oleh banyak daerah. Namun bagi wilayah Gunung Kembang Tengah, strategi ini mengandung tujuan lain, yaitu untuk menunjukkan bahwa masyarakat lokal adalah masyarakat yang mendukung pemerintahan yang sah. Dengan demikian, stigma yang menempel pada mereka sebagai pendukung PKI akan terhapus.

Ilustrasi di atas sekaligus pula memperlihatkan ketimpangan proses negara masuk ke desa dan desa masuk ke negara[79]. Institusi RT atau RW sebagai bagian dari proses pembenahan birokrasi pemerintah orba, sebenarnya merupakan perpanjangan tangan penguasa untuk pengendalian, kontrol, maupun untuk mengakomodasikan kepentingan mereka. Kepentingan atau "suara" masyarakat akar rumput tidak terakomodasi lewat saluran ini, kecuali bila ada jaminan bahwa kepentingan penguasa (dalam kasus ini kepentingan dukungan suara secara politis) bisa dipenuhi. Pemilu menjadi momen menguatnya *bargaining position* masyarakat terhadap pemerintah karena kebutuhan dukungan suara dan hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok mikung.

Resistensi dalam Angin Reformasi

Angin reformasi yang mulai dihembuskan sejak kejatuhan Soeharto dari kursi kepresidenan semakin merebak ke segala aspek kehidupan masyarakat di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Orang mulai berani berbicara lantang tentang ketidakadilan pemerintahan Orba. Berbagai aksi dilakukan menuntut perubahan segera dilakukan terutama menuntut pergantian pejabat pemerintah yang dianggap telah menciptakan sistem pemerintahan orba yang sangat hegemonis. Soeharto dengan para pejabat pendukungnya dipaksa turun dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan KKN-nya, walaupun hingga kini belum diselesaikan juga.

Beraneka ragam partai politik menggunakan isu reformasi bermunculan dengan kepentingannya masing-masing. Setiap partai berupaya tampil paling reformis dan

---

[79] Mas'oed, Mochtar. DR. 1994. *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

demokratis. Pada Pemilu tahun 1999, perolehan suara besar jatuh pada 7 partai politik yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK) dan Partai Bulan Bintang (PBB). PDIP memperoleh dukungan suara paling besar yang datang dari masyarakat akar rumput. Walaupun kemudian dalam pertarungan memperebutkan kursi kepresidanan, Gus Dur dari PKB tampil sebagai presiden mengalahkan Megawati dari PDIP melalui proses pemungutan suara anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini juga tidak terlepas dari polemik panjang antara berbagai pemikiran terutama pengaruh mayoritas pemikiran dalam agama Islam mengenai posisi perempuan sebagai presiden di Indonesia. Terlepas dari masalah itu dibawah pimpinan Megawati, PDIP menjadi semacam simbol kebebasan masyarakat dari tekanan pemerintahan orde baru.

Di tingkat warga Kampung Gunung Kembang simbol kebebasan ini juga ditangkap dalam bentuk dukungan suara terhadap PDIP yang merebak secara otomatis khususnya pada warga masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah. Warga yang tertekan dengan stigma PKI seolah mendapatkan saluran. Dukungan terhadap partai politik ini menjadi salah satu bentuk resistensi terselubung yang bisa dilakukan warga berstigma PKI terhadap kekuasaan pemerintahan lokal juga terhadap tekanan dari pendukung NU di Kampung Gunung Kembang Kidul dan pendukung Persis di Kampung Gunung Kembang Kaler. Kondisi ini sendiri menimbulkan kecaman terutama datang dari pihak tokoh NU yang banyak melakukan kontrol melalui pengajian. Kecaman sinikal karena sebagai warga berstigma PKI dan sebagai warga islam tidak menyatakan dukungannya terhadap partai islam seperti yang dilakukan warga pendukung NU dan Persis yang memilih partai islam seperti PKB, PPP atau PAN.

> *"Waktos Pemilu kamari di dieu kenging PDIP teh anjeunna nyarios kieu ka abdi, naha ngaku Islam tapi lain ngadukung anu hejo partai Islam kalahka ngadukung anu beureum, padahal di dinya teh loba anu lain urang Islam, cenah. Ari saur abdi teh nya di dieu mah bisa beureum bisa hejo, tergantung mana we nu alus ngadeketan masyarakatna".*
> (Waktu Pemilu kemarin disini menang PDIP orang itu bicara begini sama saya, kenapa mengaku Islam tapi bukannya mendukung hijau partai Islam malahan mendukung yang merah, padahal disitu kan banyak orang bukan Islam, katanya. Saya bilang disini bisa merah bisa hijau, tergantung mana yang bagus mendekati masyarakatnya). Sumber : interview ethn record.

Gus Dur yang terpilih sebagai presiden ternyata gemar mengeluarkan pernyataan 'kontroversial', di antaranya dengan mengusulkan pencabutan TAP MPRS XXV/ 1966 tentang pelarangan penyebaran ajaran sosialisme, komunisme dan marxisme[80]. Usulan ini tentunya sangat kontroversial, sebab keluar disaat seluruh pandangan masyarakat, pejabat pemerintahan, lawan parpolnya, bahkan dunia internasional difokuskan pada persoalan kemerosotan ekonomi dan kekacauan politik. Namun Gus Dur sendiri menyatakan hal itu sebagai salah satu upaya dalam proses pembelajaran demokrasi dan reformasi yang diinginkan seluruh bangsa. Warga masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah yang dikenai stigma PKI, menyambut gembira usul pencabutan TAP MPRS tersebut. Usulan itu menerbitkan harapan mereka untuk memperoleh kembali hak-haknya sebagai warga negara dan warga masyarakat yang 'normal' seperti yang lainnya. Harapan ini semakin besar dengan adanya permintaan maaf Gus Dur yang ditujukan kepada semua orang yang dituduh terlibat PKI dan telah ditekan selama masa pemerintahan Orba . Warga Kembang Tengah merasa apa yang mereka alami selama masa orde baru adalah kesalahan besar yang sengaja

---

[80] Polemik segera terjadi antara yang setuju dan tidak setuju TAP MPRS tersebut dicabut. Lihat artikel Franz Magnis Suseno dalam Kompas 14 April 2000, juga artikel Dindin S. Maolani SH dalam *Pikiran Rakyat* tanggal 17 April 2000.

ditimpakan (istilah masyarakat lokalnya 'ditulis tonggong') pada mereka. Padahal mereka tidak pernah menjadi bagian dari pemberontakan besar terhadap negara seperti yang digembar-gemborkan pemerintah selama ini. Mereka juga bukan orang atheis (tidak bertuhan) karena dituduh komunis.

Di lain pihak, harapan untuk berdaya juga menyimpan pertanyaan besar karena kekuatan-kekuatan pendukung orde baru sebenarnya masih bercokol dan siap menggeser kembali kekuatan reformasi. Kekuatan-kekuatan pendukung orde baru ini ada dalam kekuatan massa dan partai politik Islam lain yang selalu memandang stigma PKI mereka sebagai lawan ideologi agama. Kekhawatiran ini muncul dalam benak warga Kampung Gunung Kembang Tengah setelah melihat reaksi tokoh-tokoh warga Kampung Gunung Kembang Kidul dan Kaler yang tidak menyetujui usulan Gus Dur tentang pencabutan TAP MPRS. Dalam khutbah-khutbah pengajian atau pun ceramah Jum'at pernyataan ketidaksetujuan tersebut selalu muncul dengan alasan komunis adalah musuh Islam bahkan menyesali sikap dan pandangan Gus Dur yang mereka anggap tidak cocok menjadi seorang presiden.

> *"Tah kitu kuduna mah ti baheula dicabut teh, tapi saenyana mah abdi teh salempang naha bisa teu kitu eta TAP dicabut. Pan pendukung-pendukung orde baru teh loba keneh. Di dieu wae Ustadz A di Kidul ayeuna teh sok nyebut-nyebut Gus Dur salah dina ceramah-ceramahna. Teu pantes jadi presiden cenah. Padahal sarua-sarua NU."*
> (Nah begitu seharusnya dari dulu dicabut, tapi sebenarnya saya merasa ragu apa bisa TAP dicabut. Pendukung-pendukung orde baru itu masih banyak, Di sini saja Ustadz A di Kidul sekarang suka menyebut-nyebut Gus Dur salah dalam ceramah-ceramahnya. Tidak pantas jadi presiden katanya. Padahal sama-sama dari NU). Sumber : interview ethn record

Implikasi Resistensi terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Kondisi miskin dan marjinal yang dialami masyarakat di Kampung Gunung Kembang menimbulkan implikasi terhadap relasi antara kelompok masyarakat yang diberi stigma PKI-mikung dan pemerintah desa beserta kaki tangannya sebagai sumber wacana pembangunan, juga antar kelompok masyarakat yang memunculkan tekanan ideologis-politis. Seperti diuraikan pada bagian terdahulu dari tulisan ini, program pembangunan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan aktor swasta dijalankan dengan cara-cara intervensi yang intimidatif sementara hasil pembangunan relatif tidak menghasilkan manfaat nyata secara langsung bagi masyarakat lokal. Masyarakat merasa terpaksa patuh pada tindakan-tindakan pemerintah beserta aktor swasta berkapital besar dibelakangnya. Khusus bagi warga Kampung Gunung Kembang Tengah yang 'ditulis tonggong' sebagai PKI dan mikung, kondisi represif seolah tidak akan pernah berakhir. Warga dipaksa menyerahkan tanahnya dengann harga murah. Mereka yang menolak dianggap sebagai penghambat pembangunan. Bahkan warga yang tidak mau menjual tanhanya dianggap bagian dari "bahaya laten" yang harus dibasmi karena merupakan pemberontakan terhadap konsepsi pemerintahan Orba. Stigma PKI menjadi sangat efisien dilekatkan pada pembangunan.

Warga kampung tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan terhadap tekanan tersebut secara langsung. Perlawanan langsung dan terbuka kemungkinan besar akan membahayakan keselamatan mereka. Hanya tindakan-tindakan resistensi diam-diam dan terselubunglah yang paling mungkin dilakukan. Mulai dari resistensi per individu yang meluas menjadi tindakan kolektif baik dengan maupun tanpa pengorganisasian sebelumnya. Tindakan penghindaran pada kasus program 'rereongan sarumpi' atau pengembangan program lainnya merupakan bentuk-bentuk

perlawanan warga akibat stigma-stigma dan tekanan yang biasa menyertai program-program tersebut. Padahal baik program rereongan sebenarnya merupakan program pemberdayaan masyarakat. Namun masyarakat terlanjur tidak percaya terhadap program tersebut. Hal yang sama juga terjadi terhadap aksi dan kegiatan yang bernuansa agama dan politis. Pada akhirnya sikap waspada dan curiga dikembangkan terhadap setiap program atau kegiatan yang datang dari luar daerah. Mereka takut aktivitas itu berkaitan dengan pembangunan Orba yang membawa serta stigma-stigma mereka dalam pelaksanaan kegiatannya.

Kondisi marjinal dan miskin yang dialami masyarakat seringkali diartikan sebagai lemah dan tidak bisa bersuara. Ketidakmampuan bersuara disamakan artinya dengan ketidakmampuan membela kepentingannya sendiri. Apabila dicermati berdasarkan kasus-kasus yang diuraikan di atas hal itu tidaklah tepat. Masyarakat marjinal dan miskin ternyata memiliki mekanisme perlawanan terhadap proses marjinalisasi dan pemiskinan tersebut.

Gejala resistensi menjadi penting untuk diperhatikan dalam upaya pemberdayaan karena pemberdayaan yang dilakukan selama ini dilandasi oleh asumsi bahwa orang-orang marjinal dan miskin tertutup salurannya atau tidak mampu untuk menyalurkan kepentingannya. Oleh karenanya berbagai upaya pemberdayaan sering mengupayakan pentingnya partisipasi mereka dalam menyalurkan kepentingan-kepentingannya didalam konteks komunitasnya. Pola-pola resistensi dalam temuan penelitian sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan karena menunjukkan asumsi yang memandang orang miskin dan marjinal tidak mampu memperjuangkan kepentingan-kepentingannya adalah tidak tepat. Kenyataan di lapangan menunjukkan

mereka mampu memperjuangkan kepentingannya sekalipun melalui aksi-aksi terselubung.

Resistensi atau perlawanan terselubung merupakan cara yang mereka pilih untuk menghindari risiko-riesiko yang tidak dapat mereka tanggulangi apabila mereka melakukan perlawanan frontal terhadap pihak yang melakukan tekanan. Mereka juga tidak berani menanggung risiko kalau harus mengutarakan kepentingan atau kebutuhan yang sesungguhnya.

Kenyataan ini memiliki dua implikasi penting bagi upaya pemberdayaan yang sifatnya partisipatif :

1. Kalau modus perlawanan tersembunyi ini sudah jadi sesuatu yang melembaga (menjadi *rules of the game*) maka upaya-upaya untuk mengajak mereka berpartisipasi secara terbuka akan menghadapi kendala besar. Kalaupun dipaksakan, mereka akan mengutarakan masalah lain yang bukan permasalahan mereka, yaitu penindasan atau marjinalisasi. Dengan demikian upaya pemberdayaan hanya akan menjadi upaya semu.
2. Kalaupun upaya pemberdayaan berhasil menciptakan mekanisme demokratis (misalnya rembuk desa, perencanaan partisipatif), hal itu tidak berarti banyak jika tidak ada jaminan atas risiko-risiko yang akan mereka hadapi. Oleh karena itu, harus ada institusi yang menjaminnya. Institusi-institusi ini harus didukung oleh institusi-institusi di jajaran-jajaran berikutnya dan yang paling penting institusi itu harus dapat mengatur kehidupan yang nyata di tingkat komunitasnya. Misalnya ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai penjaminan terhadap keamanan warga dari kelompok marjinal seperti mikung untuk diterima secara

formal dalam struktur kepegawaian pemerintahan, atau hak hidup sebagai warga 'normal'. Aturan seperti ini harus didukung semua kelembagaan baik pemerintahan maupun non-pemerintahan serta diatur pula dengan aturan lain yang mengatur penjaminan resiko atau kondisi informal yang bisa terjadi, seperti misalnya orang pemerintahan tidak suka terhadap mereka dan mengucilkan mereka secara sosial dalam komunitas tersebut.

ENAM
PENUTUP

Kesimpulan

Kemiskinan masyarakat akar rumput seringkali dipandang dari sisi kekurangan materi. Padahal kemiskinan sebenarnya bersifat multi-dimensi dan relatif. Terdapat bentuk-bentuk kemiskinan diluar ekonomi yang dialami masyarakat (Hafidz, dalam Huskens, 1997). Studi kasus di Tasikmalaya ini memperlihatkan bentuk kemiskinan yang dialami masyarakat Kampung Gunung Kembang Tengah khususnya kelompok Mikung memiliki dimensi spesifik. Dimensi spesifik ini tampak dari faktor utama yang berperan penting dalam proses marjinalisasi yaitu faktor perbedaan ideologi dan pengelompokan dalam masyarakat, perubahan sistem politik nasional-lokal dari Orde Lama ke Orde Baru, dan intervensi program pembangunan pemerintah terhadap masyarakat. Ketiga faktor itu saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja dalam sistem sosial ekonomi politik masyarakat secara bersama-sama membentuk proses peminggiran yang sangat solid terhadap masyarakat lokal. Proses marjinalisasi berlangsung dalam dinamika sosial ekonomi politik masyarakat secara sinkronis dan diakronis yang mendorong masyarakat Kampung Gunung Kembang khususnya kelompok Mikung ke posisi marjinal dan miskin.

Relasi sosial ekonomi politik dalam struktur masyarakat Kampung Gunung Kembang yang sangat dikuasai pemerintah dikooptasi oleh tujuan pemerintah. Wacana pembangunan yang diusung pemerintah melalui pemerintahan desa digelar sebagai landasan pembentukan negara dan masyarakat yang makmur dan berkeadilan sosial. Penggelaran wacana pembangunan tersebut tidak terlepas dari pengaruh ideologi-ideologi negara internasional yang sarat dengan kepentingan-kepentingan kapitalisme serta para aktor swasta pemilik kapital besar yang berkepentingan untuk akumulasi kapital. Demi terlaksananya tujuan pembangunan, pemerintah melakukan pengendalian dan pengontrolan yang sangat ketat terhadap masyarakat. Penelitian Khusus (Litsus) bagi orang-orang dari Kampung Gunung Kembang menjadi saringan yang benar-benar menahan mereka dalam posisi marjinal. Ideologi negara Pancasila diturunkan kedalam berbagai politik wacana dengan menggunakan bahasa masyarakat lokal sebagai wacana pengendalian menjadi jalan yang sangat hegemonis untuk memobilisasi berbagai sumber daya negara termasuk membebat manusianya agar taat kepada 'kebenaran' pemerintah. Kondisi seperti ini sebenarnya terjadi pada masyarakat Indonesia, bahkan mungkin seluruhnya. Masyarakat terbius dengan slogan-slogan politik wacana pemerintah. Politik wacana orde baru menguasai pola berpikir masyarakat terutama elit-elit masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber daya sosial ekonomi dan politik.

Peluang partisipasi masyarakat Kampung Gunung Kembang dikontrol dalam lembaga tingkat desa semacam Babinsa dan LKMD yang pada dasarnya menjadi saluran legitimasi kebijakan pemerintah. Fakta menunjukkan bahwa pemerintah selalu menentukan suatu kebijakan tanpa pemahaman mengenai permasalahan utama yang dialami masyarakat. *Rereongan sarumpi*' adalah salah satu bentuk peminggiran lain yang dilakukan pemerintah terhadap partisipasi masyarakat yang terbatas pada upaya

menggalang dana masyarakat tanpa kejelasan pengelolaannya bagi masyarakat lokal yang bersangkutan. Di tingkat masyarakat lokal ketaatan terhadap pemerintah antara lain harus ditunjukkan melalui kerelaan masyarakat 'memberikan' milik mereka seperti tanah untuk kepentingan program pembangunan jika tidak ingin digelari 'penghambat pembangunan'.

Perbedaan ideologi dan pengelompokan dalam masyarakat Kampung Gunung Kembang mempengaruhi proses marjinalisasi pada masyarakat tersebut secara internal. Penganutan ideologi keagamaan yang berbeda membentuk faksi-faksi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, yaitu kelompok Mikung dan kelompok Islam. Pengelompokan ini membuat relasi-relasi horisontal juga vertikal didalam struktur masyarakat mengalami perubahan yang menimbulkan konflik berkepanjangan di antara mereka yang menyebabkan terjadinya pemisahan wilayah administratif. Kelompok masyarakat penganut ideologi keagamaan beraliran Islam menjadi kelompok yang memiliki legitimasi kuat karena Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia dan memperoleh dukungan politis pemerintahan. Sementara kelompok Mikung yang dianggap menyimpang dari Islam. otomatis menjadi musuh Ideologi Islam yang sangat berbahaya. Konflik semakin meruncing ketika secara historis perbedaan pemahaman ideologi ini berkembang menjadi konflik pribadi antara tokoh-tokoh kelompok masyarakat yang turut dikipasi angin struktur pemerintahan Orba. Konflik ini berjalin erat dengan perbedaan dukungan politis masing-masing kelompok seiring dengan perkembangan struktur politik di tingkat nasional yang saling memperebutkan posisi politis pemerintahan.

Perubahan sistem politik nasional secara historis tercermin didalam sistem politik masyarakat Kampung Gunung Kembang yang mengakibatkan konflik antar kelompok

masyarakat yang mendukung faksi-faksi politik besar yang saling bertentangan. Terutama konflik antara kelompok yang mendukung partai politik Islam dan kelompok Mikung yang mendukung partai politik komunis. Konflik antar kelompok dalam masyarakat tersebut menimbulkan stigmatisasi yang berakibat fatal terhadap kelompok Mikung sebagai pendukung partai politik komunis. Pertentangan partai komunis versus anti-komunis yang semakin menajam di tingkat nasional mencapai klimaks dengan terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Peristiwa ini menjungkirbalikkan posisi partai komunis dan organisasi massanya ke posisi yang sangat terhina dari kehidupan politik, termasuk kelompok Mikung. Stigma PKI yang dimunculkan dan dilekatkan pada kelompok Mikung berakibat sangat fatal. Mereka menjadi sasaran 'pembersihan' pemerintah dalam upayanya mempertahankan status quo. Partai komunis dan orang-orang yang dianggap terlibat didalamnya dijadikan musuh bersama nasional secara politis dan ideologis. Kampung Gunung Kembang Tengah dalam pandangan pemerintah desa dianggap sebagai basis orang-orang komunis yang perlu diawasi secara ketat terutama karena kelompok Mikung masih dipandang sebagai kelompok yang menyimpang dan dapat membawa kembali bibit-bibit komunisme.

Akses bagi warga Kampung Gunung Kembang Tengah menjadi sangat terbatas terhadap sumber daya dan kekuasaan. Bagi kelompok Mikung yang lekat dengan stigma PKI penutupan akses berlangsung lebih keras terutama dalam kaitannya dengan hak sosial politik. Kelompok Mikung dicabut hak-haknya sebagai manusia dengan pelarangan-pelarangan yang bahkan diundangkan secara formal. Mereka tidak mempunyai akses untuk masuk kedalam bidang pekerjaan pemerintahan sebagai pegawai negeri. Sementara kehidupan sosial politik mereka diawasi dengan sangat ketat. Akses terhadap sumber daya ekonomi sebenarnya tidaklah terlalu tertutup,

hanya saja terjadi penciutan relasi ekonomi di antara warga tiga kampung di Kampung Gunung Kembang. Sebelum munculnya stigma PKI relasi ekonomi dapat dibangun lebih luas antar warga Kampung Gunung Kembang Kidul, Kaler dan Tengah. Setelah stigma tersebut muncul, relasi ekonomi terbatas dalam masing-masing kampung karena faktor kepercayaan menjadi sangat penting dalam konteks stigma yang ada.

Didalam proses peminggiran kehidupan sosial ekonomi politik, warga masyarakat Kampung Gunung Kembang khususnya kelompok Mikung melakukan aksi perlawanan atau resistensi secara diam-diam. Resistensi terselubung merupakan bentuk perlawanan yang dapat menjaga keselamatan mereka dari tekanan proses peminggiran yang lebih keras lagi. Scott (1993) menyatakan dalam kondisi tanpa nama seperti itulah, keamanan mereka terjaga. Resistensi terselubung yang seperti mereka lakukan seringkali memakan waktu yang sangat lama dan berlangsung terus-menerus. Dampak dari resistensi tersebut seringkali tidak dirasakan langsung , namun kepuasan secara psikologis cukup memberi semangat bagi mereka untuk bertahan dalam dinamika sosial ekonomi politik yang berlangsung. Pengalaman pahit tersebut membuat mereka menjadi sangat waspada terhadap segala bentuk intervensi dari luar kampung.

Rekomendasi

Didalam kaitannya dengan isu pemberdayaan masyarakat yang marak, menjadi penting untuk mengidentifikasi proses penyebab kondisi marjinal yang dialami masyarakat dan bagaimana mereka menghadapi situasi peminggiran itu. Resistensi terselubung yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk upaya memperjuangkan kepentingannya mempunyai efek yang sangat besar dalam menggerogoti bentuk-

bentuk penekanan yang terjadi pada mereka. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat marjinal seperti mereka tidak tinggal diam menunggu vonis 'kematian'.

Implikasi resistensi masyarakat terhadap upaya pemberdayaan partisipatif, antara lain perlunya melihat bahwa masyarakat mempunyai pandangan yang resisten terhadap berbagai upaya dari pihak luar yang dalam kacamata mereka dominan tidak memperhatikan permasalahan sesungguhnya yang mereka hadapi Mereka kerap memilih tidak menyatakan permasalahan yang sesungguhnya. Pendekatan terhadap masyarakat dalam upaya pemberdayaan pun biasanya difokuskan pada sektor ekonomi. Studi kasus ini menunjukkan bahwa permasalahan sesungguhnya yang menjadi faktor penyebab kondisi marjinal yang dialami masyarakat bukanlah ekonomi melainkan sosial politik. Sedangkan proses peminggiran sosial politik tersebut bekerja dengan sangat hegemonis dan represif.

Rekomendasi yang dapat disampaikan dari hasil studi ini antara lain :

1. Agar terlaksananya upaya pemberdayaan partisipatif, perlu mengupayakan terciptanya suatu jaminan keamanan sosial politik yang dilembagakan, misalnya di tingkat pembuat kebijakan. Bagi warga yang dikenai stigma PKI, keberadaan kebijakan formal berkenaan dengan pemberian stigma dan penghilangan akses orang-orang berstigma terhadap resources tertentu serta mekanisme semisal Litsus, merupakan kebijakan pemerintah Orba dalam kepentingannya mempertahankan kekuasaannya yang sangat mengikat menekan mereka. Upaya seperti peninjauan kembali bahkan pencabutan kebijakan tersebut bisa jadi merupakan mekanisme yang dapat membebaskan masyarakat dari kondisi marjinalnya.

2. Upaya tersebut perlu didukung dengan mempersiapkan mekanisme penjamin lain, seperti institusi mediator yang mengatur usaha rekonsiliasi antara warga berstigma dan warga non-stigma. Walaupun hal ini sangat sulit terutama seperti dijelaskan dalam studi kasus ini, stigma tersebut sangat erat kaitannya dengan konflik antar pribadi yang meluas dalam konflik yang lebih besar. Dengan adanya upaya penjaminan keamanan sosial politik dalam tingkat kebijakan kemungkinan upaya rekonsiliasi dapat dilakukan di tingkat pemerintahan lokal sebagai salah satu institusi pendukungnya.
3. Perlu dilakukan suatu studi penelaahan strategi alternatif pemberdayaan masyarakat yang tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi semisal pemberian mikro kredit. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui sektor ekonomi seperti itu bukan tidak perlu dilakukan. Namun, apakah hal itu benar-benar mengangkat masyarakat marjinal dari posisi kemarjinalannya, mengingat berdasarkan studi kasus permasalahan utama ialah marjinalisasi dalam bidang sosial politik. Upaya pemberdayaan melalui sektor ekonomi semisal mikro kredit bisa saja dilakukan tetapi yang menjadi penting adalah bagaimana upaya ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan pengikisan terhadap proses marjinalisasi dan tekanan yang dihadapi masyarakat, bukan sebagai tujuan utamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Akatiga-Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup. September 1998 - Januari 1999. *Studi Implementasi Kelompok Informal Perdesaan Dalam Pembangunan Pertanian yang Berwawasan Lingkungan.* Paper. Bandung: AKATIGA.

Antlov, Hans. 1995. "Exemplary Centre, Administrative Perphery : Rural Leadership and the New Order in Java". *Monograph Series* No. 68. Nordic Institute of Asian Studies: Curzon Press.

AsiaDHRRA Secretariat. 1998. *The Impact of Globalizationon the Social-Cultural Lives of Grassroots People in Asia*. Jakarta: Grasindo..

Bruinessen, Martin van . 1994. *NU : Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*. Yogyakarta: LKIS.

Budiman, Arief. "Sosialisme, Kapitalisme, dan Agama" dalam Maksum. Ed. 1995. *Mencari Ideologi Alternatif : Polemik Agama Pascaideologi Menjelang Abad 21.* Bandung: Mizan.

Chaidar, Al. 2000. *Sepak Terjang KW 9 Abu Toto Menyelewengkan NKA-NII Pasca S.M. Kartosoewirjo*. Jakarta: Madani Press.

Cribb, Robert, dalam : Huskens, Frans. Mario Rutten dan Jan-Paul Dirkse. 1997 hal. 265-271. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial : Indonesia Dibawah Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.

Geert, Clifford. 1992 hal. 61-62. "Kebudayaan dan Agama". Yogyakarta: Kanisius . Terjemahan dari *The Interpretation of Culture: Selected Essays*. 1974. Hutchinson & CO Publisher LTD. London.

Goffman, Erving. 1979. *Stigma : Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey USA: Pelican Books..

Hafidz, Wardah. "Kemiskinan-Kemiskinan di Luar Ekonomi", dalam : Husken, Frans. Dkk.. ed. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial : Indonesia Dibawah Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Hayami, Yujiro dan Kikuchi, Masao. 1987. *Dilema Ekonomi Desa : Suatu Pendekatan Ekonomi Terhadap Perubahan Kelembagaan Desa di Asia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia..

Hefner, Robert W. 1990. *The Political Economy of Mountain Java an Interpretive History*. California: University of California Press.

Hill, Hall. Ed. 1994, hal. 57. *Indonesia's New Order : The Dynamics of Socio-Economic Transformation*. Australia: Allen & Unwim Pty Ltd.

Husken, Frans. 1998, hal. 145. *Masyarakat Desa dalam Perubahan Zaman : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 - 1980*. Jakarta: PT Grasindo.

Jackson, Karl D. 1980. *Traditional Authority, Islam and Rebellion : A Study of Indonesian Political Behavior*. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press. Berkeley, Los Angeles.

Kartasasmita, Ginandjar. 1996. "Upaya Memberdayakan Masyarakat : Memperkuat Pranata Menciptakan Pembaruan Sosial", dalam *PLAN Indonesia* No. 9.

Kuntowijoyo. 1993. *Radikalisasi Petani*. Yogyakarta :Bentang.

Latif, Yudi. dan Ibrahim, Idi Subandy. Ed. 1996 hal. 31-33. *Bahasa dan Kekuasaan : Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.

Mas'oed, Mohtar, Dr. 1994, hal. 4-19. *Politik Birokrasi dan Pembangunan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Noer, Deliar. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945 - 1965*. Terjemahan Jakarta:Grafiti.

Nugroho, Heru. 28-29 Januari 1994." Kemiskinan Ketimpangan dan Pemberdayaan" Makalah dalam *Panel Ahli Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta.

Panitia Kamus Lembaga Basa & Sastra Sunda. 1985, hal. 313. *Kamus Umum Basa Sunda*. Cetakan Kelima. Bandung: Tarate.

S, Mulyadi. 1991. "Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Transformasi Sosial" dalam Ridjal, Fauzie & Karim, M. Rusli. *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Scott, James C. 1985. *Weapons of the Weak : Everyday Forms of Peasants Resistence*. Massachusetts: Yale University.

Scott, James C. 1993, hal.9-10. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Siahaan, Hotman M. 1991. "Proses Keterasingan Potensi Kerakyatan Dalam Kebudayaan Indonesia Masa Kini" dalam; Ridjal, Fauzie & Karim, M. Rusli. (tahun?) *Dinamika Budaya dan Politik dalam Pembangunan*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Soetrisno, Loekman. 28-29 Januari 1994. "Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia" makalah dalam *Panel Ahli Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta.

Suhelmi, Ahmad, Drs. MA. 1999. *Soekarno Versus Natsir : Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*. Jakarta: Darul Falah.

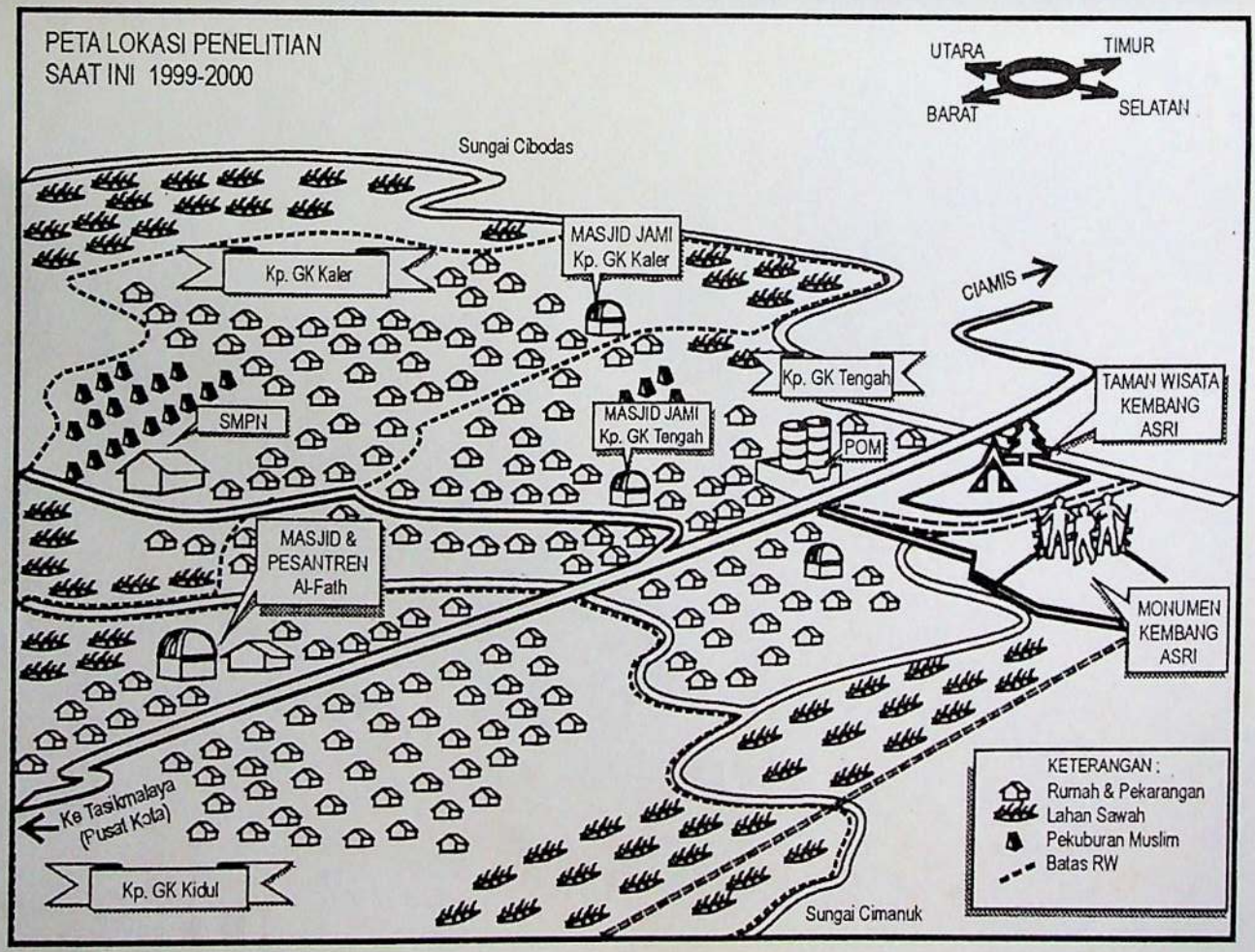
Sullivan, John. 1992. *Local Government and Community in Java : An Urban Case-Study*. Singapore. Oxford New York: Oxford University Press.

Visser, E. Leontine. "Mensiasati Kemiskinan" dalam Husken, Frans. Mario Rutten dan jan-Paul Dirkse. 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial : Indonesia Dibawah Orde Baru*. Jakarta: PT Gramedia.

Wieringa, Saskia Eleonora. 1999. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya.

LAMPIRAN

PETA LOKASI PENELITIAN


PETA LOKASI PENELITIAN
SAAT INI 1999-2000
UTARA
TIMUR
BARAT
SELATAN
Sungai Cibodas
MASJID JAMI
Kp. GK Kaler
Kp. GK Kaler
CIAMIS
Kp. GK Tengah
TAMAN WISATA
KEMBANG
ASRI
SMPN
MASJID JAMI
Kp. GK Tengah
POM
MASJID &
PESANTREN
Al-Fath
MONUMEN
KEMBANG
ASRI
KETERANGAN :
Rumah & Pekarangan
Lahan Sawah
Pekuburan Muslim
Batas RW
Ke Tasikmalaya
(Pusat Kota)
Kp. GK Kidul
Sungai Cimanuk